

D' Risole

“ Data Riau Sosial Ekonomi “

dalam Sebungkus Koran 2020

Kumpulan Tulisan Karyawan BPS Se-Provinsi Riau



D'Risole

“ Data Riau Sosial Ekonomi “

dalam Sebungkus Koran 2020

Kumpulan Tulisan Karyawan BPS Se-Provinsi Riau



D'Risole "Data Riau Sosial Ekonomi" Dalam Sebungkus Koran 2020

ISBN: -

No. Publikasi: 14000.2224

Katalog: 1205033.14

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 94 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Diterbitkan oleh:

© BPS Provinsi Riau

Dicetak oleh:

CV. MN. Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas dirilisnya publikasi **D'Risole dalam Sebungkus Koran 2020**. Publikasi ini merupakan kumpulan dari berbagai tulisan para statistisi dan pegawai struktural BPS se-Provinsi Riau yang dimuat diberbagai media lokal maupun media nasional. Tulisan-tulisan ini memuat berbagai hasil analisis lebih lanjut data BPS Provinsi Riau dan dituangkan dalam bentuk berita opini. Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat merangkum tulisan dari pegawai BPS se-Provinsi Riau dan dapat menjadi motivasi bagi penulis-penulis lainnya untuk dapat menuangkan ide dan fikirannya kedalam sebuah tulisan.

Publikasi **D'Risole dalam Sebungkus Koran 2020** merupakan publikasi yang diterbitkan secara periodik setiap tahun, sehingga tulisan dari para penulis di BPS se Provinsi Riau dapat terkompilasi dan terdokumentasi dengan baik dalam sebuah publikasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah bersedia menyumbangkan tulisannya kedalam publikasi ini dan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Pekanbaru, Juni 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Misfaruddin

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
BAHAGIA MENJEMPUT JODOH, OLEH : LINA AGUSTINA P SST,M.EC.DEV DIMUAT DI RIAUPOS.JAWAPOS.COM, 11 JANUARI 2020	1
PEREMPUAN DI DUNIA BIROKRASI, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST DIMUAT DI DATARIAU.COM, 21 JANUARI 2020	4
MENEPIS TERJANGAN “TSUNAMI INFORMASI” , OLEH : DADANG SUNANDAR,SST,MT DIMUAT DI DATARIAU.COM, 23 JANUARI 2020	7
POTENSI SEKTOR NON MIGAS RIAU, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST DIMUAT DI DATARIAU.COM, 5 FEBRUARI 2020	9
SENSUS JAMAN NOW, OLEH: NELAYESIANA BACHTIAR, SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST, 9 FEBRUARI 2020	12
MENGHITUNG ONLINE JUMLAH PENDUDUK, OLEH : IRFARIAL, SE DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 17 FEBRUARI 2020	14
SEJARAH BARU SENSUS PENDUDUK INDONESIA, OLEH :DADANG SUNANDAR,SST,MT DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 19 FEBRUARI 2020	17
MEMPERBAIKI GIZI GENERASI INDONESIA, OLEH : DESI DAMAIYANTI, SST DIMUAT DI HARIAN RIAU.COM, 6 MARET 2020	19
SEMPITNYA WAKTU, OLEH : IRFARIAL, SE DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 16 MARET 2020	22
LOCKDOWN, SANGGUPKAH KOTA PEKANBARU ?, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 25 APRIL 2020	25
PSBB RASA LOCKDOWN, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 1 MEI 2020	27

EKONOMI RIAU DI TENGAH PANDEMI PANDEMI COVID-19, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 7 MEI 2020 _____	30
MAMPUKAH RIAU SWASEMBADA PANGAN, OLEH : JOKO PRAYITNO, S.SI,MSE DIMUAT DI GORIAU.COM, 7 MEI 2020 _____	33
KONTROVERSI EKONOMI DAN LINGKUNGAN SAAT PANDEMI COVID-19, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID , 15 MEI 2020 _____	36
CUKUP TANGGUHKAH EKONOMI RIAU HADAPI COVID-19, OLEH : FERDIAN FADLY, SST DIMUAT DI THECOLUMNIST.ID, 19 MEI 2020. _____	39
THE NEW NORMAL : HARUS BANGKIT DAN BERTAHAN MENJALANINYA, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 22 MEI 2020 _____	41
DANA DESA : PENGGERAK CAKRA PEMBANGUNAN, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 30 MEI 2020 _____	44
PERUMAHAN DI INDONESIA : HARUSKAH DENGAN TAPER ? OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 7 JUNI 2020 _____	47
PROBLEMATIKA KEHIDUPAN ANAK, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 14 JUNI 2020 _____	49
KEKERASAN PADA PEREMPUAN: DOSA SIAPA ? OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 21 JUNI 2020 _____	53
TENAKER INDONESIA : CAPAIAN KUALITAS ATAU HANYA KUANTITAS ?, OLEH : HENI NAINGGOLAN, SST,MM DIMUAT DI DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 30 JUNI 2020 _____	56
EKONOMI RIAU : UPAYA BERTAHAN MENGHADAPI ANCAMAN RESESI OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 1 JULI 2020 _____	59
BEBASKAN INDONESIA DARI NARKOBA, OLEH : NELAYESIANA BACHTIAR, SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 3 JULI 2020 _____	62
POTENSI KOTA PEKANBARU DI PENAMBAHAN USIA, OLEH : NELAYESIANA BACHTIAR, SST,MM DIMUAT DI BETUAH.COM, 6 JULI 2020 _____	66
RIAU KAYA TAPI TIMPANG, OLEH : FITRI HARIYANTI, SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 10 JULI 2020 _____	69
MENGATASI SAMPAH: ANTARA ETIKA DAN PENGELOLAAN, OLEH : FITRI HARIYANTI,SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 13 JULI 2020 _____	72
PROSTITUSI: MULAI DARI KEMISKINAN SAMPAI TUNTUNAN GAYA HIDUP, OLEH : FITRI HARIYANTI, SST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID, 22 JULI 2020 _____	75

PERILAKU ANTI KORUPSI MASYARAKAT INDONESIA, OLEH : LINA AGUSTINA,SST,M.EC.DEV DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 22 JULI 2020 _____	78
PENYIMPANGAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU, OLEH : FITRI HARIYANTI S.ST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID ,8 AGUSTUS 2020 _____	81
75 TAHUN DAN POTRET LINGKUNGAN INDONESIA, OLEH : FITRI HARIYANTI S.ST,MM DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID ,19 AGUSTUS 2020 _____	84
DATA BERKUALITAS ADALAH EMAS, OLEH : LINA AGUSTINA,SST,M.EC.DEV DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 5 OKTOBER 2020 _____	89
PROFESIONALITAS IBU MENJADI PEREMPUAN BEKERJA, OLEH : ARNI JUWITA NOVISDA, SST DIMUAT DI THE COLUMNIST.ID , 19 DESEMBER 2020 _____	90
PEREMPUAN, KORONA DAN KEMISKINAN, OLEH : LINA AGUSTINA,SST,M.EC.DEV DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 30 DESEMBER 2020 _____	93

<https://riau.bps.go.id>



<https://riau.bps.go.id>



Bahagia Menjemput Jodoh

Oleh : Lina Agustina Pujiwati SST,M.Ec.Dev

DIMUAT DI RIAUPOS.JAWAPOS.COM, 11 JANUARI 2020



Awal tahun telah tiba. Dalam menjalani hidup, setiap kita biasanya mempunyai target-target tertentu untuk diraih, baik itu karir, finansial, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Begitu pula dalam urusan pribadi. Bagi Anda yang sudah berkeinginan untuk menikah, tahun ini mungkin menargetkan untuk segera menggenapkan separuh agama.

Akan tetapi, manusia hanya bisa berencana. Tuhan Yang Maha Kuasa-lah yang pada akhirnya menentukan kehendakNya. Setelah menjalani ikhtiar dan do'a, masa penantian menjemput jodoh yang telah digariskanNya adalah sebuah ujian tersendiri. Dalam menjalani ujian tersebut, kitalah yang menentukan apakah akan melakoninya dengan kebahagiaan atau kegalauan. Itu sepenuhnya menjadi pilihan masing-masing.

Bagaimana agar bisa bahagia di masa menjemput jodoh? Aktivitas lahir maupun batin yang bisa dilakukan sangat bervariasi. Yang terpenting adalah sesuai dengan bisikan hati dan bermanfaat, baik untuk saat sekarang maupun di masa depan. Apalagi, jika kegiatan yang dipilih tidak hanya membahagiakan diri sendiri, tapi juga membahagiakan orang sekitar.

1. Yakin Bahwa Allah SWT Telah Menciptakan Jodoh Bagi Kita dan selalu berdo'a

Keyakinan ini perlu dijaga dan dipegang erat, karena keyakinan inilah yang membuat manusia bersemangat

dalam menjalani ujian. Sebagaimana rezeki dan maut, jodoh juga telah ditetapkanNya. Allah SWT. “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (QS Asy-Syura : 11)

Jangan pernah lelah untuk berdo'a karena do'a adalah senjatanya orang mukmin. Perbanyak berdo'a dan meminta dengan sungguh-sungguh kepadaNya. Allah tidak akan pernah mengabaikan permintaan hamba yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Terlebih, hal yang diharapkan datang adalah sesuatu yang akan membawa banyak kebaikan. Allah juga malu, jika tidak mengabulkan do'a hambaNya sebagaimana dalam hadist riwayat Abu Dawud, Tarmidzi, dan Ibnu Majah. Rasulullah Saw bersabda tentang masalah doa, yang berbunyi : “Sesungguhnya Allah malu terhadap seseorang yang menadahkan tangannya berdo'a meminta kebaikan kepada-Nya, kemudian menolaknya dalam keadaan hampa.”

2. Rajin Bersedekah

Bersedekah dan berbagi adalah hal yang membahagiakan. Bersedekah akan memberikan manfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan

sedekah maka diharapkan segala urusan akan bisa lancar, termasuk dalam urusan jodoh. Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya”. (HR. Muslim, lihat juga Kumpulan Hadits Arba’in An Nawawi hadits ke 36)

3. Bergaul Dengan Orang-orang yang Sholeh

Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam upaya menjemput jodoh adalah dengan bergaul dengan banyak orang. Bagi setiap muslim dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang sholeh karena dari sinilah diharapkan pintu kebaikan akan di berikan.

4. Membuka Diri

Bagaimana anda akan mendapatkan kenalan, teman, sahabat, bahkan jodoh jika tidak membiarkan orang untuk lebih mengenal Anda secara personal?. Hampir semua orang yang berjodoh dimulai dari tahap perkenalan, kemudian membuka diri, dan saling mengenal untuk menemukan kecocokan. Jika Anda tidak segera membuka diri, maka bagaimana Anda akan melewati prosesnya?

5. Memperbaiki Akhlak

Setiap muslim pasti memiliki keinginan untuk memiliki jodoh yang sholeh/sholehah. Namun, jika tidak ada keinginan merubah diri sendiri ke arah

lebih baik, maka hal tersebut mungkin sulit akan terwujud. Sebagaimana pepatah yang mengatakan “Jodohmu adalah cerminan dirimu”, maka memperbaiki diri juga merupakan salah satu upaya dalam menjemput jodoh.

6. Rajin Mengerjakan Shalat Wajib dan Sunnah

Menanti jodoh adalah ujian tersendiri bagi sebagian orang. Kadang kala, ujian ini terasa begitu berat mengingat usia yang terus bertambah atau karena desakan lingkungan sekitar. Seberat apapun ujian itu, Allah SWT telah memberikan petunjuk melalui Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 4: “Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabbnya, dan mereka akan kembali pada-Nya.”

Jadi, rajin shalat baik shalat wajib dan Sunnah juga merupakan rangkaian usaha yang bisa dilakukan dalam menjemput jodoh.

7. Meminta Bantuan Orang Tua/Wali Untuk Dicarikan Jodoh

Meminta bantuan orang tua/wali atau orang sholeh yang dipercaya juga menjadi salah satu cara dalam menjemput jodoh yang belum tiba. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi tentang pasangan hidup. Karena itulah, sangat tepat untuk meminta bantuan mereka agar Anda bisa segera menemukan jodoh terbaik, di dunia maupun di akhirat.

8. Hindari hal-hal yang dilarang agama

Menikah adalah ibadah. Begitu juga jalan untuk menuju pernikahan juga merupakan ibadah. Dalam masa penantian menuju gerbang pernikahan, hindari hal-

hal yang dilarang agama, apalagi berzina. Selain akah mengurangi keberkahan, zina juga salah satu hal yang dilarang Tuhan sebagaimana firmanNya. “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (QS. An-Nur:3).

Terakhir, dalam menjalani masa menjemput pasangan, berbagai cobaan dan godaan bisa jadi datang silih berganti. Janganlah berputus asa. Ingatlah sebuah hadits qudsi berikut, tentang pentingnya berbaik sangka kepada Allah SWT. “Aku selalu sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepada-Ku. Dan jika ia ingat pada-Ku dalam jiwanya, maka Aku pun mengingatnya dalam Zat-Ku. Dan jika ia ingat pada-Ku ditempat ramai, Aku pun mengingatnya ditempat ramai yang lebih baik daripadanya. Jika ia mendekat pada-Ku sejengkal, Aku pun mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, Aku pun mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan, Akupun akan datang kepadanya dengan berlari cepat”. Tidak hanya Anda, setiap orang juga mempunyai ujian masing-masing. Keadaan kita saat ini bukan untuk dibandingkan dengan kehidupan orang lain, karena manusia mempunyai jalan hidupnya sendiri.

Live a beautiful.

Perempuan Di Dunia Birokrasi

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

DIMUAT DI DATARIAUCOM, 21 JANUARI 2020



Dilahirkan menjadi seorang perempuan adalah sesuatu hal yang harus disyukuri, karena banyak kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan untuk kaum hawa ini. Acapkali kita mendengar quote yang tidak asing di telinga kita, “Behind every great man, there’s a great woman- Di balik laki-laki kuat, ada wanita hebat”. Artinya seorang perempuan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang pria. Dalam kehidupan rumah tangga, suami akan merasa sepi tanpa kehadiran seorang istri, anak-anak akan merasakan pilu tanpa kehadiran seorang ibu. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran perempuan juga tidak dapat dipandang sebelah mata.

Saat ini, banyak perempuan yang memilih memiliki peran ganda dalam kehidupannya. Selain berperan sebagai istri dan ibu di rumah, juga berperan aktif di lingkungan masyarakat, bahkan ikut mengambil peran di dunia kerja. Sudah menjadi pemandangan yang lumrah kita temui, perempuan bekerja di perusahaan, kantor pemerintah, dan duduk di parlemen. Data yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau tercatat dari 65 anggota DPRD di Provinsi Riau, sebanyak 18 orang adalah perempuan atau sekitar 27,7 persen.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyebutkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tahun 2018 sebanyak 15.779 orang, yang terdiri dari 7.284 laki-laki (46,16%) dan

8.495 perempuan (53,84%). Dari komposisi ini terlihat jelas bahwa jumlah pegawai negeri sipil perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jika dirinci lebih jauh menurut jabatan (struktural atau fungsional), ternyata lebih dari 90 persen PNS perempuan memilih menduduki jabatan fungsional, dan kurang dari 5 persen yang memilih jabatan struktural. Data yang sama juga menunjukkan bahwa dari 1.165 pegawai yang menduduki jabatan struktural, hanya 33,73 persen yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya 66,27 persen atau sekitar 772 pegawai berjenis kelamin laki-laki. Ini berarti jabatan struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau masih didominasi oleh kaum adam.

Data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga menunjukkan tren yang ‘semakin tinggi posisi jabatan di birokrasi, jumlah perempuan semakin sedikit’. Artinya, ada korelasi negatif antara posisi jabatan di birokrasi dengan jumlah PNS perempuan. Hal ini juga menunjukkan kaum perempuan lebih tertarik pada proses peningkatan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan jabatan fungsional yang diikuti dan lebih memilih berkiprah di belakang layar. Jabatan fungsional itu sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum atau staf. Sebagian besar pegawai perempuan lebih memilih jabatan fungsional umum/staf. Tercatat sebanyak lebih dari 60 persen

pegawai perempuan yang memilih jabatan fungsional umum/staf, dan kurang dari 35 persen yang memilih jabatan fungsional tertentu.

Isu terkini yang berhembus kencang di telinga aparatur sipil negara belakangan ini terkait perampangan birokrasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, terutama di tingkat eselon, menuai pro kontra dari berbagai pihak. Perampangan birokrasi yang dimaksud lebih kepada pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, dimana akan banyak jabatan struktural yang akan dipangkas dan diganti menjadi jabatan fungsional. Berbagai respon pegawai pun terlihat, ada yang merespon negatif dengan rencana tersebut, ada yang bersikap apatis, namun tidak sedikit juga yang memberikan respon positif. Respon yang positif lebih banyak diberikan oleh pegawai negeri sipil perempuan. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat hanya sedikit pegawai perempuan yang memilih meniti karir lewat jenjang jabatan struktural, sehingga isu terkait perampangan jabatan eselon ini tidak begitu menjadi polemik yang berarti.

Jabatan struktural lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan, sedangkan jabatan fungsional lebih kepada proses pengembangan diri dan potensi. Banyaknya pegawai perempuan yang lebih memilih jabatan fungsional dibandingkan jabatan struktural mengindikasikan bahwa dunia kerja bagi seorang perempuan lebih kepada wadah untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri, bukan untuk mengejar karir. Walaupun hal ini tidak berlaku untuk semua kaum perempuan, karena dalam kenyataannya masih ada perempuan yang fokus dan capable dalam menggapai puncak karir. Sementara itu, jika dilihat dari sudut lain, yakni dari profesi yang digeluti, terlihat bahwa di instansi pemerintah, profesi

guru dan perawat masih menjadi profesi primadona bagi kaum hawa. Jika dirinci menurut dinas/instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, terlihat bahwa jumlah pegawai perempuan mendominasi hanya di beberapa instansi saja, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, RSUD Arifin Ahmad, RSJ Tampan, dan RSUD Petala Bumi.

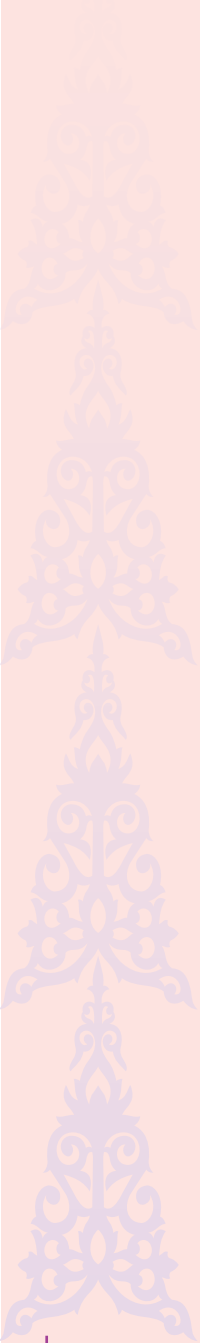
Di dinas pendidikan tercatat pada tahun 2018 jumlah pegawai perempuan (termasuk guru di dalamnya) sebanyak 5.210 atau 63,75 persen. Hampir di setiap sekolah, guru perempuan memang lebih mendominasi dalam segi jumlah. Profesi guru sendiri selama ini memang dipandang sebagai profesi yang cocok untuk perempuan, dikarenakan tugas mendidik pada umumnya melekat pada diri seorang ibu yang notabene adalah seorang perempuan. Kita juga sering mendengar istilah dalam agama Islam bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak.

Di beberapa instansi kesehatan, seperti dinas kesehatan, RSUD Arifin Ahmad, RSJ Tampan, dan RSUD Petala Bumi, pegawai perempuan juga mendominasi. Tercatat pada tahun 2018, persentase jumlah pegawai perempuan (termasuk perawat di dalamnya) di masing-masing instansi tersebut sebesar 71 persen, 74 persen, 71 persen, dan 78 persen. Sama halnya dengan profesi guru, profesi perawat juga lebih banyak digeluti oleh kaum perempuan. Menjadi seorang perawat membutuhkan skill ketelitian dan ketelatenan yang selama ini dianggap lebih cocok dilakukan oleh perempuan.

Bekerja di dunia birokrasi bagi perempuan adalah sebuah pilihan, dan dalam setiap pilihan selalu ada manfaat dan resiko yang mengiringi. Pada kenyataannya, sudah banyak kontribusi

yang diberikan oleh kaum perempuan di dunia kerjanya masing-masing, baik di instansi atau lembaga milik pemerintah maupun swasta. Bagaimanapun, kaum perempuan memegang peranan penting di semua lini kehidupan, mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga, masyarakat, dunia kerja, hingga kehidupan bernegara.

<https://riau.bps.go.id>



Menepis Terjangan “Tsunami Informasi”

Oleh : Dadang Sunandar, SST,MT

DIMUAT DI DATARIAU.COM, 23 JANUARI 2020



Tak sengaja ketika berkendara sambil mendengarkan sesi Smart Parenting di salah satu channel radio di Pekanbaru, narsum menyampaikan terkait bahaya Sosial Media terhadap anak-anak. Dalam salah satu penjelasannya bahwa anak-anak bisa gundah/gelisah/emosi tidak stabil bahkan ada kasus sampai bunuh diri karena begitu banyaknya “informasi” yang diterima melalui sosial media yang terus bergerak setiap detik maupun menit.

Kenapa disebut “Tsunami Informasi”?

Terlepas dari definisi awalnya terkait tsunami, yang jelas tsunami yang kita bayangkan adalah adanya ombak besar menghantam daratan yang memporak-porandakan setiap apa yang dilewatinya dan membawa serta setiap partikel yang dilewatinya. Sehingga yang tadinya murni berupa terjangan air berubah menjadi air yang bercampur tanah, kayu, sampah, alat rumah tangga, plastik, dan apapun yang bisa terangkat oleh air tersebut.

Demikian juga dengan “Informasi” yang bersliweran melalui media online, media sosial, dan sebagainya. Apakah itu fakta, gosip, fake, iklan, hoax, cyberbullying, pornografi, SARA, maupun ujaran kebencian bergerak silih berganti hingga menjadi tsunami yang menerjang para pengguna internet. Dan tidak jarang ditemukan ada ulasan yang dikemas seolah merupakan hasil investigasi, berisi fakta

yang seolah riil, tapi ternyata hanya sebuah kebohongan belaka. Dalam kondisi seperti ini, jika tidak pandai memfilter “informasi” yang sebenarnya bukan sebuah informasi bisa memberikan efek sosial hingga kejiwaan yang mendalam.

Merujuk laporan kemkominfo, hingga tahun 2018 saja jumlah situs yang bermuatan negatif yang “ditangani” mencapai 912.659 situs, 528.262 konten negatif pada media sosial twitter, 2.232 konten pada jejaring facebook, dan 6.123 konten pada instagram. Perlu dicatat angka-angka ini adalah statistik yang telah ditangani oleh pihak kemkominfo, riilnya tentu saja jauh lebih besar dari angka tersebut.

Bagaimana Tsunami Informasi terbentuk ?

Berbeda dengan tsunami, yang terbentuk karena kehendak yang maha kuasa atau sebagian orang mengatakan karena fenomena alam. Dalam posisi itu manusia hanya menjadi Objek dari tsunami tersebut, meskipun para ahli bisa membuat perkiraan, tsunami early warning, dan berbagai cara untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi tsunami namun pada akhirnya manusia hanyalah objek yang tidak bisa menolak datangnya tsunami tersebut.

Lain halnya dengan Tsunami Informasi, subjek maupun objeknya adalah Manusia itu sendiri. Pembuatnya adalah manusia, yang menghembuskannya/

memviralkannya juga manusia yang ditambah robot-robot buatan manusia, dan objeknya juga manusia. Dan tidak jarang dalam beberapa kasus, sang Objek juga berubah menjadi buzzer yang urun rempug menghembuskan “informasi” tersebut hingga menambah dan memperbesar daya sebarannya hingga jadilah tsunami informasi.

Kebiasaan like and share tanpa proses filterisasi bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya gelombang tsunami informasi ini. Satu orang pembuat konten, 10 orang melakukan share di tahap awal, berkembang berikutnya menjadi 100 orang hingga jutaan orang yang membaca, mengomentari, memviralkan hingga sampailah ke gadget bapak, ibu, anak-anak melalui halaman facebook, twitter, instagram maupun saluran online lainnya.

Bagaimana Seharusnya?

Islam demikian lengkap memandu hambanya tidak hanya dalam perihal Hablum Minallah tapi demikian luas mengatur urusan Hablum Minannas salah satunya adalah bab penyebarluasan informasi.

Pertama - Janganlah tergesa-gesa menyebarkanluaskan informasi. Cek and ricek terlebih dahulu. “Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar.” (HR. Muslim no.7)

Kedua - Periksaalah Kebenaran sebuah berita dengan cermat. “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujuraat [49]: 6)

Ketiga - Bertanyalah, Adakah Manfaat Menyebarkan suatu Berita Tertentu?,

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari no. 6018 dan Muslim no. 74)

Potensi Sektor Non-Migas Riau

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

DIMUAT DI DATARIAU.COM, 5 FEBRUARI 2020



Provinsi Riau adalah salah satu dari empat provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan daerah pusat penghasil sumber minyak dan gas alam (migas). Sektor ini memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian di Provinsi Riau secara sangat signifikan, namun demikian, dalam kenyataannya pembangunan ekonomi suatu daerah tidak akan dapat berjalan dalam jangka panjang jika daerah tersebut terlalu bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itu sumber daya alam yang ada perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi yang tinggi.

Pembangunan sistem perekonomian di Provinsi Riau seharusnya lebih mengarah kepada pengembangan sektor-sektor di luar sektor migas. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan sektor migas di dalamnya. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Riau dengan menghilangkan sektor migas di dalamnya pada tahun 2016 sebesar 3,68 persen, meningkat di tahun 2017 mencapai 4,57 persen, dan 3,95 persen pada tahun 2018. Jika ditelusuri menurut kabupaten/kota, tercatat laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kota Dumai dan diikuti

oleh Kota Pekanbaru.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mengetahui sektor ekonomi yang potensial di daerah tersebut untuk kemudian didorong semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau yang tergolong cukup bervariasi. Untuk dapat memanfaatkan dan mengelola kekayaan dan potensi yang dimiliki tersebut, maka perhatian utama ditujukan untuk melihat komposisi ekonomi, yakni dengan mengetahui kontribusi atau peranan yang diberikan oleh tiap-tiap sektor yang ada.

Sektor primer yang meliputi sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian mendominasi struktur ekonomi di delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti lebih didominasi oleh sektor pertanian, khususnya perkebunan, sedangkan Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, dan Rokan Hilir lebih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Di Kabupaten Kuantan Singingi komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit masih menjadi komoditas andalan, namun hendaknya ada komoditas lain yang bisa dikembangkan selain kedua komoditas tersebut. Pemerintah

Daerah Kuantan Singingi hendaknya bisa bersinergi bersama masyarakat dalam upaya mendorong pengembangan sektor pertanian dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian lainnya.

Setiap daerah biasanya memiliki komoditas unggulan yang dapat diandalkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Di Kabupaten Indragiri Hilir misalnya, komoditas kelapa merupakan komoditas unggul yang menjadi urat nadinya masyarakat, bahkan beberapa pihak menyebutkan Indragiri Hilir sebagai “Negeri Hampanan Kelapa Dunia”. Mengingat besarnya peranan komoditas ini dalam menopang perekonomian masyarakat Indragiri Hilir, maka perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Upaya yang perlu dilakukan selain peningkatan hasil produksi juga peningkatan kualitas kelapa rakyat itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah penghasil kelapa terbesar di dunia ini.

Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari data Dinas Perkebunan dan Hortikultura, tercatat ada sebanyak lima komoditas unggulan daerah ini, yaitu sagu, kelapa, karet, kopi, dan pinang. Namun dari kelima komoditas tersebut, sagu merupakan komoditas yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Upaya peralihan dari sektor yang berbasis agraris menuju sektor industri juga harus terus dilakukan. Mengingat besarnya hasil produksi komoditas tersebut setiap tahunnya, maka industri pengolahan dengan bahan baku sagu perlu ditingkatkan, bukan hanya sebatas pengolahan sagu menjadi tepung, tetapi lebih dari itu dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Sektor sekunder yang meliputi sektor industri pengolahan, listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah,

serta konstruksi mendominasi struktur ekonomi di empat kabupaten/kota lainnya, yakni Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai dan Pekanbaru. Besarnya kontribusi sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor ini merupakan penggerak utama roda perekonomian di daerah tersebut. Kabupaten Pelalawan dengan industri kertas yang menjadi icon nya yang juga merupakan industri kebanggaan Provinsi Riau ini harus terus dijaga dan dijamin kelangsungan usahanya. Pentingnya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam upaya mendorong pengembangan industri nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, pengembangan kawasan industri di Kota Dumai juga perlu terus dilakukan. Kawasan industri tersebut menampung beberapa perusahaan industri, salah satunya industri pupuk NPK yang merupakan salah satu industri besar di Asia Tenggara. Posisi Kota Dumai yang strategis menjadikan daerah ini sebagai tujuan investasi para investor. Untuk itu Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menarik minat investor asing agar bersedia menanamkan modalnya di kawasan industri tersebut. Pada tahun 2018, sektor sekunder memberikan kontribusi dalam perekonomian Kota Pekanbaru sebesar 50,05 persen, diikuti oleh sektor tersier dengan kontribusi 48,34 persen. Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru mulai fokus pada pengembangan investasi di tiga sektor unggulannya, yakni industri, perdagangan, dan jasa.

Kontribusi dominan dari sektor-sektor non migas ini diharapkan dapat membangun struktur perekonomian Provinsi Riau yang memiliki daya saing, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019-2024 untuk

pencapaian visi jangka panjang Riau 2025.

<https://riau.bps.go.id>



Sensus Jaman Now

Oleh : Nelayesiana Bachtiar, SST,MM
DITERBITKAN DI THE COLUMNIST, 9 FEBRUARI 2020



Tahukah anda ada yang baru dari sensus penduduk yang akan dilaksanakan pada tahun 2020? Jika anda belum tahu, saatnya sekarang anda harus mencari tahu dan pastikan anda tercatat dalam Sensus Penduduk 2020 yang akan segera dilaksanakan.

Pada sensus 2020 akan menggunakan kombinasi dari dua metode yaitu metode online (Sensus Penduduk Online/SP Online) dan metode wawancara (Sensus Penduduk Wawancara/SP Wawancara), untuk pertama kali metode online ini diterapkan untuk Sensus Penduduk 2020.

Harapannya dengan gabungan metode ini kekurangan-kekurangan sensus pada sensus-sensus sebelumnya akan bisa disempurnakan sehingga data yang terkumpul mengenai penduduk dapat benar-benar valid dan bermanfaat.

Menyasar Generasi Muda dan Milenial

Hadirnya metode sensus menggunakan aplikasi online diharapkan akan memberi solusi yang lebih mudah terutama bagi generasi muda dan milenial untuk tercatat dan berpartisipasi aktif dalam sensus penduduk 2020. Ini dikarenakan bahwa generasi milenial memiliki karakter yang akrab akan teknologi dan intensitas tinggi dalam mengakses internet.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk muda dan generasi milenial Indonesia tahun 2019

adalah sebesar 107,66 juta jiwa; tercatat pula bahwa dari jumlah penduduk muda dan milenial tersebut ada sejumlah 75,57 persen yang memiliki HP serta melek teknologi yang sering mengakses internet. Sehingga diharapkan dengan menggunakan metode aplikasi online ini, generasi milenial yang memiliki mobilitas tinggi namun memiliki kemampuan teknologi dan melek terhadap internet bisa mencatatkan dirinya dan keluarga dalam Sensus Penduduk 2020 melalui metode online.

Generasi milenial tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, dengan nama lain sebagai generasi Y, dicetuskan pertama kali oleh pakar sejarah, William Strauss dan Neil Howe, adalah kelompok manusia yang lahir pada tahun 1981 – 1994. Sedangkan generasi Z, merupakan generasi ramah teknologi, yakni golongan yang lahir pada tahun 1995 – 2010. Kedekatan generasi ini dengan teknologi, karena perkembangan pesat teknologi di era kelahiran mereka. Bahkan, dalam majalah Forbes generasi Z dikatakan sebagai generasi masa depan dan generasi paling berpengaruh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa generasi muda dan aktivitas mengakses internet online ibarat objek dan bayangan, selalu bersisian serta berdampingan dalam setiap waktu. Fenomena inilah yang diharapkan menjadi peluang suksesnya Sensus Penduduk 2020 secara online.

Kini dengan akses internet melakukan berbagai hal menjadi semakin

mudah, begitu juga dengan Sensus Penduduk. Hadirnya Sensus Penduduk Online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik pada saat bekerja, bersantai, berlibur atau menikmati waktu luang, penduduk dapat mengupdate data diri dan keluarga melalui sensus.bps.go.id dalam rentang waktu 15 Februari – 31 Maret 2020.

Selain dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, metode SP Online ini dirasa dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dikarenakan data diri serta keluarga diisi langsung secara mandiri oleh penduduk yang bersangkutan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengisian data diri.

Dari sisi pembiayaan, metode SP Online pun menggunakan biaya yang jauh lebih sedikit dibanding metode SP Wawancara, dapat menghemat pembiayaan dalam pelaksanaan lapangan, baik penggunaan kertas sebagai dokumen maupun penggunaan tenaga sensus lapangan. Namun, SP Online pun belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh penduduk, terutama penduduk di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang lancar, untuk itu penduduk yang belum dapat berpartisipasi pada SP Online, akan dikunjungi oleh petugas sensus pada 1-31 Juli 2020 dalam metode SP Wawancara.

Mencatat Indonesia Secara Utuh

Kita menyadari bahwa ada gap generasi dengan kemampuan teknologi informasi dan kemampuan menggunakan internet yang berbeda-beda mengakibatkan belum bisanya sensus penduduk 2020 ini seluruhnya menggunakan metode online.

Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar generasi dalam kemampuan penguasaan teknologi. Generasi tua dirasa jauh tertinggal dalam

kemampuan, pemahaman dan penggunaan terhadap media-media teknologi informasi yang berkembang semakin pesat. Hal ini berbanding terbalik dengan generasi muda dan milenial yang dengan ciri khasnya fasih dalam penggunaan teknologi dan acap kali menggunakan internet untuk berbagai aktivitas online.

Dengan pertimbangan inilah, SP Wawancara diharapkan dapat menjadi solusi pendataan penduduk Indonesia secara utuh. Selain hal tersebut tipe kewilayahan Indonesia yang berpulau-pulau dan mengakibatkan ada daerah-daerah yang tidak terjangkau teknologi informasi yang mengakibatkan tidak adanya jaringan akses internet, mengharuskan sensus juga harus dilaksanakan secara wawancara langsung.

Harapannya ke depan dengan adanya metode gabungan ini pada Sensus Penduduk 2020 akan mampu mencatat seluruh penduduk Indonesia. Mari bersama #MencatatIndonesia, dengan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen bangsa tentunya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dapat berjalan lancar dan sukses.

Menghitung Online Jumlah Penduduk

Oleh : Irfarial, SE

DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 17 FEBRUARI 2020



Data penduduk memiliki peranan strategis dalam pembangunan. Mustahil pembangunan dapat terlaksana dengan baik jika tidak memiliki data penduduk yang shahih dan akurat. Penduduk merupakan subjek sekaligus menjadi objek dalam pembangunan. Layaknya sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga, seluruh penerimaan atau pendapatan keluarga/rumah tangga pasti akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Demikian juga halnya dengan negara, berdasarkan Amanah Undang Undang Dasar 1945, seluruh penerimaan negara yang triliyunan jumlahnya, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia.

Persoalannya adalah penduduk Indonesia sangat besar jumlahnya, nomor empat terbesar di dunia, atau sekitar 3,52 persen penduduk dunia berada di Indonesia. Berbeda dengan Negara Vatikan yang hanya berpenduduk sekitar 800 jiwa, atau Kerajaan Monaco yang hanya berpenduduk 38.300 jiwa, atau Negara Islandia yang berpenduduk sekitar 350.710 jiwa, dan sebagainya.

Disisi lain kebutuhan penduduk berbeda-beda. Ada kebutuhan berdasarkan kelompok umur, Ada kebutuhan berdasarkan kelompok jenis kelamin. Ada kebutuhan berdasarkan kelompok tingkat pendidikan. Ada kebutuhan berdasarkan kelompok agama yang dianut. Ada kebutuhan berdasarkan tingkat

sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan diketahuinya data penduduk dengan berbagai karakteristik, memudahkan negara atau pemerintah untuk menggelontorkan anggaran kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kebutuhannya dan tepat sasarannya.

Namun yang selalu menjadi persoalan dan menjadi perdebatan di Indonesia adalah mana data jumlah penduduk yang shahih dan akurat itu. Karena di Indonesia ada beberapa instansi yang mengeluarkan data jumlah penduduk dengan konsep dan metode yang berbeda satu sama lainnya, sehingga angka jumlah penduduk yang dihasilkan menjadi berbeda pula.

Menghitung jumlah penduduk tidak sekedar menghitung jumlah kelahiran (diperoleh dari akte kelahiran), dikurangi jumlah kematian (dari surat kematian), kemudian ditambah jumlah penduduk yang keluar masuk wilayah suatu negara (diperoleh dari paspor/visa).

Kalau hanya itu, selesai sudah, karena semua catatan administrasi seperti diatas, dapat diperoleh di instansi-instansi yang membidangi urusan tersebut. Bahkan berkemungkinan sudah tertata rapi dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini.

Tetapi kenyataannya tidak semudah tu. Indonesia memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.240 kecamatan, 83.931 desa/kelurahan, serta ratusan ribu rw/rt. Semakin kecil wilayah administrasi, pergerakan penduduk makin

sulit terdeteksi. Karena pergerakan/perpindahan penduduk adalah suatu keniscayaan. Berbagai keperluan/urusan menjadi alasan terjadinya perpindahan/pergerakan penduduk, baik urusan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Apakah perpindahan permanen atau bersifat sementara. Dan semua itu tidak dapat terdeteksi dengan mudah. Karena tidak semuanya teradministrasi dengan baik dan lengkap.

Kenapa mesti sensus, karena dengan sensus semua populasi penduduk di hitung. Dalam sensus yang paling penting adalah, tidak boleh satupun penduduk yang terlewat cacah, dan atau tidak boleh satupun penduduk yang terhitung dua kali (double counting).

Dengan mengusung konsep SATU DATA KEPENDUDUKAN, tahun 2020 Indonesia kembali melaksanakan sensus penduduk yang sedikit berbeda dengan sensus-sensus penduduk sebelumnya. Ada kolaborasi dari beberapa kementerian/ lembaga dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksananya. Sebagai basis datanya menggunakan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.

Sensus Penduduk Online 2020 (SPO 2020), merupakan sensus penduduk online yang pertama kalinya di Indonesia. Sensus ini memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana teknologi informasi yang telah berkembang pesat saat ini. Penduduk dapat dengan mudah dan cepat memperbaharui data-data kependudukannya. Cukup dengan menggunakan smartphone atau komputer yang dimiliki/dikuasai serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), langsung kemudian berselancar di website Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat sensus.bps.go.id. Sangat mudah dan aman, karena data penduduk langsung terkirim ke server, dan diawasi

oleh Badan Sandi Negara RI.

Sensus online menggunakan dua model, yaitu CAWI (interview tercatat lewat web), dan CAPI (interview tercatat lewat gadget). Tidak ribet dan tidak rumit, ada petunjuknya. Tidak perlu keluar rumah dan hanya butuh waktu beberapa menit saja.

Namun demikian, karena baru 30 persen lebih penduduk Indonesia yang dapat mengakses internet, maka untuk tahun 2020, sensus penduduk dilaksanakan dengan kombinasi antara sensus online (15 Februari-31 Maret 2020), dan sensus wawancara, yaitu petugas sensus mendatangi tempat tinggal penduduk (1-31 Juli 2020).

Dalam statistik dikenal istilah sampling error dan non sampling error. Sampling error adalah kesalahan statistik yang terjadi akibat sampel yang tidak representatif. Ini terjadi untuk survei-survei. Berbeda dengan sensus, karena melibatkan seluruh populasi, maka sampling error adalah 0 (tidak ada). Sedangkan non sampling error adalah kesalahan statistik yang diakibatkan oleh human error (faktor manusia). Dalam hal ini, bisa dari petugas sensus, juga bisa berasal dari pihak responden, dengan berbagai kondisi, seperti tidak mengerti/tidak memahami apa yang ditanya, atau memberikan jawaban yang tidak sebenarnya, atau tidak mau disensus, dan lain sebagainya. Dengan sensus penduduk secara online, diharapkan non sampling error dapat diperkecil seminimal mungkin, karena penduduk secara mandiri memperbaharui data kependudukannya (self updating).

Untuk itu, partisipasi aktif dan antusias penduduk Indonesia sangat diharapkan dalam pelaksanaan SPO 2020 ini, sebagaimana antusiasnya mereka mengikuti pilpres maupun pileg beberapa waktu yang lalu, atau sebagaimana

antusiasnya mereka menyambut tahun baru. Karena SPO 2020 ini akan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk sensus-sensus berikutnya.

Bisa jadi sensus penduduk tidak lagi sekali sepuluh tahun, bisa saja dilakukan secara berkala dengan waktu yang singkat, diperoleh data kependudukan yang riil dan shahih secara statistik. Bukan hasil estimasi maupun proyeksi. Sehingga tidak ada perdebatan tentang jumlah dan lain sebagainya. Bahkan bisa saja jauh lebih murah dan mudah, dengan catatan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS), atau infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator, sudah merata di seluruh Indonesia.

Mari bantu negara menentukan masa depan kita seluruh rakyat Indonesia.

<https://riau.bps.go.id>

Sejarah Baru Sensus Penduduk Indonesia

Oleh : Dadang Sunandar, SST,MT

TERBIT DI KORAN RIAU POS, 19 FEBRUARI 2019



Sebanyak 313 pasukan muslim, itulah angka yang tercatat dalam sejarah sebagai pasukan muslim pertama yang terbentuk menjelang terjadinya perang badar. Guna mengetahui kekuatan pasukan musuh yang akan dihadapi, Rasulullah mengorek informasi tentang jumlah pasukan lawan dari 2 orang tukang masak pasukan Qurais yang tertangkap ketika hendak mengambil pasokan air. Mengingat kapasitasnya hanya sebagai tukang masak, informan ini tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Abu Jahal kala itu. Namun yang pasti, lanjut mereka, kami memotong 9 sampai 10 ekor unta setiap hari untuk kebutuhan makan pasukan Qurais. Dari angka inilah, Rasulullah memperkirakan bahwa jumlah lawan sekitar 900 sampai 1.000 orang, angka perkiraan yang dikemudian hari terkonfirmasi dan tercatat dalam sejarah.

Hasil akhir peperangan itu menorehkan kemenangan besar di pihak kaum muslimin. Tercatat di kala itu 14 orang syahid dari pihak kaum muslimin, di pihak Qurais sebanyak 70 orang tewas serta 70 orang jadi tawanan. Itulah sepenggal kisah Perang Badar dengan beberapa angka statistik yang tercatat dalam sejarah. Bagi kita yang hidup di zaman now, tentu angka statistik sangat penting. Dalam kehidupan yang lebih kompleks di zaman sekarang, angka statistik yang dibutuhkan tentu semakin beragam. Sebut saja angka jumlah penduduk, angka kelahiran, kematian, rasio penduduk, infla-

si, kemiskinan, PDRB, IPM serta beragam statistik lainnya sangat menentukan arah perencanaan, tools evaluasi, hingga mengukur capaian pembangunan. Ujung dari semua itu adalah bagaimana kualitas hidup manusia di masa depan bisa lebih baik lagi.

Basic-nya adalah sensus penduduk. Manusia adalah subjek pembangunan sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Sehingga statistik yang terkait manusia, baik itu jumlah, komposisi, hingga karakteristiknya sangat diperlukan untuk diketahui. Oleh karena itu United Nations (UN/PBB) merekomendasikan seluruh negara yang ada di dunia ini untuk melakukan sensus penduduk (SP) paling tidak sepuluh tahun sekali. Di Indonesia, SP dilaksanakan 6 kali yaitu di 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Membayangkan sensus sama dengan membayangkan adanya petugas pendata, datang ke rumah-rumah yang menanyakan serta mencatat informasi anda, istri, anak-anak, serta siapapun yang ada di rumah Anda. Itulah yang terjadi dalam 6 kali sensus yang telah dilaksanakan. Akankah itu akan terjadi lagi di sensus berikutnya?

Sejarah baru itu adalah SP Online.

Tahun 2020, diwacanakan oleh pemerintah Indonesia melalui BPS sebagai tahun sensus untuk ketujuh kalinya. Combine Method, menjadi

pembeda pertama SP 2020 dengan sensus-sensus sebelumnya. Metode ini mengkombinasikan antara metode canvassing melalui pendataan door-to-door dengan metode registrasi penduduk. Data hasil registrasi penduduk dari Kementerian Dalam Negeri yang mencatat penduduk secara de jure digunakan sebagai data dasar dalam Sensus Penduduk 2020 untuk mendapatkan penduduk secara defacto dalam lokasi tempat tinggal dan termutakhir dalam karakteristik penduduk. Combine method tidak memberikan “rasa” sensus yang berbeda bagi masyarakat.

Mengambil potensi infrastruktur teknologi informasi yang tumbuh dengan pesat, BPS menawarkan “rasa” sensus berbeda melalui penggunaan 3 jenis moda pendataan sekaligus yaitu: Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), dan Paper and Pencil Interviewing (PAPI). CAPI dan PAPI keduanya merupakan tools pendataan canvassing (door-to-door) dengan alat catat yang berbeda, CAPI menggunakan gadget petugas dan PAPI menggunakan kertas. Dari ketiga moda pendataan di atas, CAWI atau BPS menyebutnya dengan istilah SP Online-lah yang akan memberikan rasa sensus berbeda untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan sensus di Indonesia.

SP Online mengubah cara pandang dan bayangan sensus yang telah lalu. Sekaligus mengubah posisi objek sensus (penduduk) dari pasif menjadi aktif. Penduduklah yang aktif memutakhirkan informasi diri dan keluarganya sendiri menggunakan moda SP Online yang telah disiapkan. Kunci sukses itu adalah “response rate”, yang hadir dari kepedulian setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi aktif dalam SP Online. Yang rela mengorbankan waktu barang beberapa menit untuk memutakhirkan data diri serta keluarganya

secara mandiri.

Sejarah itu ditorehkan mulai 15 Februari-31 Maret 2020 melalui sistem SP Online di alamat sensus.bps.go.id oleh para “pahlawan” data bangsa Indonesia. Buktikan bahwa anda adalah Indonesia dan Cinta Indonesia dengan mencatatkan diri anda secara mandiri sebagai bagian dari usaha #MencatatIndonesia.

Memperbaiki Gizi Generasi Indonesia

Oleh : Desi Damaiyanti, SST

DIMUAT DI HARIAN RIAU.CO 6 MARET 2020



Belum banyak masyarakat yang tahu bahwa setiap tanggal 28 Februari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Makna peringatan tersebut adalah untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya mencukupi kebutuhan gizi untuk menunjang pertumbuhan tubuh dan kesehatan manusia. Pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi ini tertuang secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut tertulis upaya untuk melakukan perbaikan atau peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.

Kasus gizi buruk didominasi daerah bagian timur Indonesia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa sekitar 800 juta penduduk dunia menderita gizi kurang dan sebagian besar terjadi di negara berkembang. Meskipun secara nasional status gizi di Indonesia mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun kasus gizi buruk tetaplah menjadi persoalan penting di negeri ini. Data dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) yang dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyebutkan bahwa persentase gizi buruk di Indonesia pada

balita dengan usia 0-59 bulan adalah 3,9 persen, dan persentase gizi kurang 13,8 persen. Sedangkan persentase gizi buruk pada balita 0-23 bulan sebesar 3,8 persen, dan persentase gizi kurang 11,4 persen. Jika dilihat dari sebaran wilayah, persentase gizi buruk yang tinggi didominasi oleh daerah bagian timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Maluku, dengan persentase di atas 5 persen. Bahkan pada balita dengan usia 0-23 bulan persentase gizi buruk di Provinsi Maluku mencapai 10 persen.

Upaya penanganan gizi buruk

Salah satu upaya penanganan gizi buruk pada bayi dan balita adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Tingkat kesadaran para ibu dalam pemberian ASI eksklusif dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti pada tahun 2018, cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif secara nasional mencapai 68,74 persen. Angka tersebut sudah melampaui target Renstra tahun 2018 sebesar 47 persen. Persentase tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusif terdapat di Provinsi Jawa Barat, dengan persentase lebih dari 90 persen. Tingginya kesadaran para ibu dalam memberikan ASI eksklusif selaras dengan rendahnya persentase gizi buruk di wilayah ini, yakni 2,5 persen.

Rendahnya kesadaran generasi milenial

Persoalan gizi buruk (malnutrisi) tidak hanya menimpa bayi dan balita saja, tetapi juga dapat menimpa remaja dan orang dewasa. Pada periode remaja, kekurangan asupan zat gizi tidak hanya menghambat pertumbuhan tetapi juga meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung dan kanker. Kaum remaja sebagai tonggak generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa sangat diharapkan bisa terbebas dari persoalan ini. Namun pada kenyataannya, kesadaran generasi milenial terhadap gizi masih sangat rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah kesibukan, stress yang berlebihan, program diet yang salah, dan gaya hidup yang lebih suka mengonsumsi makanan cepat saji (junk food).

Adanya pengaruh pola konsumsi

Pola konsumsi pangan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan gizi. Dalam mengonsumsi makanan haruslah terpenuhi standar kecukupan konsumsi kalori itu sendiri. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Bulan Maret 2019 menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 15 provinsi dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari yang sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi kalori. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari paling kecil, yaitu hanya 1.765,13 kkal. Jika dilihat dari proporsi konsumsi kalori per kapita sehari masing-masing kelompok makanan terhadap total makanan, terlihat bahwa kelompok makanan padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta minyak dan kelapa merupakan tiga kelompok

makanan yang kandungan kalornya paling tinggi dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Fakta menarik dari sumber data yang sama menunjukkan bahwa selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, terjadi perubahan konsumsi kalori dan protein. Meskipun secara keseluruhan terjadi kenaikan konsumsi kalori selama kurun waktu tersebut, namun bila dirinci menurut kelompok komoditas, terlihat bahwa kelompok komoditas makanan dan minuman jadi memiliki trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan kelompok komoditas padi-padian justru menunjukkan trend menurun. Hal ini berarti bahwa adanya peralihan pola konsumsi masyarakat, dari konsumsi makanan yang dimasak di rumah beralih ke makanan dan minuman jadi.

Hal ini dapat dilihat dari selalu meningkatnya konsumsi kalori yang berasal dari makanan dan minuman jadi yang sejak tahun 2013 hanya sebesar 291,90 kkal menjadi 535,50 kkal pada tahun 2019. Makanan cepat saji yang saat ini menjadi kegemaran masyarakat Indonesia khususnya anak-anak dan remaja, faktanya mengandung kadar lemak dan gula lebih tinggi, yang tentunya menyalahi norma kecukupan gizi. Akibatnya akan menimbulkan permasalahan baru dalam dunia kesehatan, yakni masalah obesitas. Karenanya masalah perbaikan gizi bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi menjadi PR kita semua untuk memperbaiki gizi generasi Indonesia. Mulai dari pemberian asi eksklusif pada bayi, menjaga pola konsumsi yang sehat dengan lebih memperhatikan kandungan gizi di dalamnya, mengurangi mengonsumsi makanan siap saji, dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Gizi Nasional, bersama membangun gizi menuju bangsa sehat

berprestasi.

<https://riau.bps.go.id>



Sempitnya Waktu

Oleh : Irfarial, SE

DIMUAT DI KORAN RIAU POS, 16 MARET 2020



Berapapun banyaknya waktu yang tersedia, tetapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak akan memberikan hasil yang optimal. Waktu terasa longgar, jika sesuatu yang direncanakan berjalan sesuai rencana. Sebaliknya waktu terasa sempit, jika sesuatu yang diinginkan tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan bisa saja sebaliknya, terjadi sesuatu yang menakutkan, yang semestinya tidak perlu terjadi.

Analog atau perumpamaan ini sah-saja jika disematkan kepada era bonus demografi atau masa melimpahnya jumlah usia produktif pada suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Kenapa demikian, karena masa kelimpahan usia produktif jika tidak diantisipasi jauh-jauh hari, seperti perencanaan dan penyiapan lapangan pekerjaan yang luas dan terstruktur, antara lain tersedianya sejumlah lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian serta pendidikan yang dimiliki oleh penduduk usia produktif tersebut, alhasil berkah dari bonus demografi akan menjadi jauh dari makna yang disebut bonus tersebut.

Di dalam analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, usia di bawah 15 tahun; (b) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun; dan (c) kelompok umur tua, usia 65 tahun ke atas. Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk umur muda sebanyak 40 % atau lebih sementara

dengan 5 %. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua apabila kelompok umur mudanya sebanyak 30 % atau kurang sementara kelompok umur tuanya lebih besar atau sama dengan 10 %. Pergeseran struktur umur muda ke umur tua produktif akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja.

Berdasar buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, penduduk Riau pada tahun 2027, penduduk umur mudanya hanya sekitar 25,3 %, dan penduduk umur tuanya 5,4 %. Tetapi penduduk usia produktif mencapai 69,3 % atau sekitar 5,37 juta jiwa dari total penduduk sekitar 7,75 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar, apalagi jika dilihat angka rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Riau mencapai 44,13. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2027-2030 adalah masa puncaknya era bonus demografi di Riau.

Terlebih lagi, usia produktif pada saat itu sebagian besar nantinya berasal dari kelompok generasi milenial dan Z, yaitu kelompok orang yang lahir di media 80-an hingga 2000-an awal. Generasi milenial dan Z adalah generasi yang sangat akrab dengan dunia digital.

Apakah nantinya kelimpahan usia produktif bagi Riau, akan menjadi berkah atau sebaliknya. Sejatinya memang tahun 2027 masih cukup lama. Tetapi jika dilihat angka rasio ketergantungan penduduk, tahun 2019 sudah mencapai 49,47, tahun 2020 turun lagi menjadi 48,80. Artinya adalah permulaan bertambahnya usia

produktif di Riau sudah dimulai, hingga nanti sampai ke puncaknya tahun 2027-2030.

Dari sisi pendidikan tinggi, di Riau setiap tahun, lebih kurang delapan puluh perguruan tinggi baik negeri dan terbanyak swasta, termasuk akademi maupun sekolah tinggi, telah meluluskan puluhan ribu mahasiswa menjadi sarjana ke tengah masyarakat.

Tahun 2019 saja, empat perguruan tinggi ternama di Riau, yaitu Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning dan Universitas Islam Negeri, telah meluluskan lebih dari 18 ribu mahasiswa dari berbagai strata dan disiplin ilmu. Mereka adalah putera-puteri terdidik yang akan memasuki bursa kerja atau akan menciptakan lapangan pekerjaan, baik di wilayah Riau ataupun di daerah lainnya.

NamundarihasilSurveiSosialEkonomi Nasional (Susenas), terlihat beberapa hal yang harus dicermati oleh berbagai pihak. Partisipasi sekolah penduduk kelompok umur setingkat pendidikan menengah, khususnya pendidikan menengah atas hingga ke pendidikan tinggi cukup rendah. Pada tahun 2018, penduduk kelompok umur 19-24 tahun yang masih bersekolah hanya 27,19 persen, sisanya sebesar 0,21 persen tidak/belum pernah bersekolah, dan yang terbanyak adalah tidak bersekolah lagi, yaitu sebesar 72,60 persen. Bagaimana mereka akan bersaing di tengah terbatasnya jumlah pekerjaan, sementara yang punya pendidikan tinggi masih banyak yang belum terserap di dunia kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Tidak jauh halnya dengan penduduk kelompok umur 16-18 tahun. Kelompok umur setingkat sekolah menengah atas (SMA) yang masih bersekolah pada tahun 2018 hanya sebesar 77,27 persen. Sisanya 0,38persentidak/belum pernah bersekolah, dan 22,35 persen tidak bersekolah lagi.

Dapat dibayangkan pekerjaan seperti apa yang akan dimasuki oleh mereka nantinya, itupun kalau tersedia. Sebab mereka mesti mencari pekerjaan, untuk menghidupi dirinya dan orang lain/keluarga.

Dari sisi kesempatan kerja di Riau, dapat dicermati hasil dari survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Februari 2019. Tingkat pengangguran terbuka di Riau sebesar 5,57 persen, artinya dari 100 angkatan kerja di Riau pada Februari 2019, terdapat sekitar 5 orang yang masuk kategori penganggur. Jika dilihat dari kelompok umur muda, maka tingkat pengangguran terbuka di Riau sebesar 16,34 persen. Artinya dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 16 orang yang menganggur. Angka ini meningkat 1,73 poin dibanding Februari 2018 yang sebesar 14,61 persen.

Sebagai gambaran sulitnya peluang kerja, terlihat saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 yang lalu. Terdapat ribuan sarjana/diploma, maupun lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat bersaing memperebutkan formasi pekerjaan yang tersedia. Di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Riau saja, tercatat kurang lebih 76.884 pelamar, sebagian besar adalah lulusan sarjana/diploma, dan sedikit lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat.

Begitu juga penduduk usia produktif Riau yang melamar pekerjaan di berbagai kementerian/lembaga yang membuka lowongan pekerjaan. Seperti di Kemenkum Ham wilayah Riau, tercatat sebanyak 19.745 pelamar lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang sudah lulus seleksi administrasi. Di Kementerian/lembaga lainnya juga cukup banyak jumlah pelamarnya. Dapat dipastikan jumlah yang diterima sangat sedikit, dikarenakan sedikitnya jumlah formasi yang

tersedia. Sehingga akan banyak yang tidak bekerja alias menganggur, atau mencari pekerjaan lainnya.

Tumpah ruahnya penduduk produktif adalah suatu keniscayaan, ditunggu ataupun tidak masa itu akan datang jua. Apakah nantinya mereka akan menjadi penopang yang jitu untuk masyarakat non produktif, atau sebaliknya akan menjadi beban bagi masyarakat produktif lainnya di Provinsi Riau.

<https://riau.bps.go.id>

Lockdown, Sanggupkah Kota Pekanbaru?

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,MM
TERBIT DI [HTTPS://THECOLUMNIST.ID](https://thecolumnist.id) 25 APRIL 2020



Saat ini covid-19 yang disebabkan oleh virus corona dan menjadi pandemik hampir di seluruh dunia masih belum teratasi. Lebih dari 210 negara di dunia sudah terjangkiti virus ini, tidak terkecuali Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau. Saat ini Kota Pekanbaru sudah masuk ke dalam Zona Merah. Sejak mulai diumumkan covid di Indonesia hingga saat ini, jumlah yang dinyatakan positif di Kota Pekanbaru semakin hari semakin meningkat. Perlu langkah dan tindakan yang cepat dan tepat untuk segera mengatasi pandemi covid-19.

Dalam rangka mengatasi penyebaran virus ini, pemerintah daerah mengambil beberapa kebijakan mulai dari memberlakukan social distancing, work from home, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik bahkan sampai melakukan pemberhentian penerbangan komersil maupun carter baik domestik maupun internasional. Semua itu dilakukan dengan harapan dapat segera menghentikan penyebaran virus ini.

Ada satu kebijakan yang sampai saat ini tidak atau belum diambil oleh pemerintah daerah untuk memutus rantai penyebaran virus corona, meskipun banyak negara yang sudah mulai menerapkan aturan ini. Kebijakan tersebut yaitu memberlakukan lock down atau karantina wilayah dengan mengunci semua akses keluar masuk suatu wilayah dan mengatur masyarakat sedemikian rupa agar tidak berkeliaran dan berkerumun di tempat umum. Ada beberapa hal yang mungkin

menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memberlakukan lock down, salah satunya dampak atau resiko ekonomi.

Dampak dan resiko terburuk yang akan dihadapi adalah lumpuhnya perekonomian karena aktifitas ekonomi terhenti. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab terkait dengan suplai kebutuhan masyarakat, tidak hanya makanan tetapi juga obat dan lainnya. Untuk mempermudah, kita coba simulasikan berapa jumlah kebutuhan anggaran Kota Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan makanan saja jika dilakukan lock down.

Simulasi dilakukan dengan tiga kondisi yaitu, pertama, jika hanya penduduk miskin yang dijamin kebutuhan makanan, kedua, jika 40 persen penduduk dijamin kebutuhan makanan dan ketiga, jika seluruh penduduk Kota Pekanbaru dijamin kebutuhan makanan.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), besaran kebutuhan konsumsi perkapita sebulan Kota Pekanbaru untuk makanan adalah sebesar Rp 786.899, jika kita konversikan perhari menjadi Rp 26,229, dan jika lock down dilakukan selama 14 hari, maka simulasi perhitungannya, pertama, kebutuhan anggaran yang diperuntukkan untuk pemenuhan konsumsi makanan seluruh penduduk Kota Pekanbaru yang berjumlah 1,249 juta jiwa adalah sebesar Rp. 422,1 Miliar, kedua, kebutuhan anggaran yang diperuntukkan untuk pemenuhan konsumsi makanan 40 persen

penduduk Kota Pekanbaru yang berjumlah 459,7 ribu jiwa adalah sebesar Rp.168,8 Miliar dan ketiga, kebutuhan anggaran yang diperuntukkan untuk pemenuhan konsumsi makanan penduduk miskin (2,52 persen) Kota Pekanbaru yang berjumlah 28,6 ribu jiwa adalah sebesar Rp.10,6 Miliar.

Dari simulasi penghitungan di atas, terlihat bahwa kebutuhan anggaran Kota Pekanbaru jika melakukan kebijakan lock down selama 14 hari cukup besar. Apakah Pemerintah kota Pekanbaru dapat menanggung biaya tersebut?

Jika kita lihat APBD Kota Pekanbaru tahun 2020 yang sebesar 2,34 triliun, maka anggaran untuk mengatasi kebutuhan makanan seluruh penduduk Kota Pekanbaru saat ini sebesar 18,04 persen dari total APBD dan jika hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan penduduk miskin maka anggaran yang diperlukan adalah sebesar 0,45 persen. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk memenuhi 40 persen penduduk Kota Pekanbaru adalah sebesar 7,21 persen dari seluruh APBD Kota Pekanbaru.

Secara hitungan matematis, Kota Pekanbaru masih dapat mengatasi kebutuhan makanan masyarakat jika memberlakukan kebijakan lock down selama 14 hari, meskipun bantuan diberikan tidak untuk seluruh penduduk Kota Pekanbaru. Bantuan makanan dapat diberikan kepada 40 persen penduduk Kota Pekanbaru dengan anggapan bahwa tidak hanya penduduk miskin saja yang terkena dampak covid-19 tetapi juga penduduk yang rentan karena terdampak covid-19. Langkah yang dapat diambil Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan pengalihan anggaran belanja modal atau pembangunan infrastruktur di tahun ini serta mengurangi pengeluaran pemerintah yang dirasa tidak perlu atau mendesak.

Perberlakuan lock down dapat

dilakukan dengan catatan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru dapat menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesigapan pemerintah daerah untuk mengatasi dan memutus rantai penyebaran virus corona. Hal terpenting dan paling utama lainnya adalah ijin yang diberikan dari pemerintah pusat untuk melakukan karantina wilayah. Tanpa ijin tersebut, kesanggupan Kota Pekanbaru melakukan karantina wilayah tidak akan mungkin dapat terlaksana meskipun secara anggaran mampu menghadapi situasi tersebut.

Semoga pemerintah Kota Pekanbaru dapat lebih serius dan bijak dalam mengatasi masalah pandemik covid-19 dan semoga dunia dapat segera kembali normal seperti sedia kala. Aamiin.

PSBB Rasa Lockdown

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,MM

TERBIT DI [HTTPS://THECOLUMNIST.ID](https://thecolumnist.id) 1 MEI 2020



Tepat sudah dua bulan sejak dikeluarkannya SK Kepala BNPB No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Kejadian Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Informasi terkait Covid-19 pun masih menjadi trending topic di berbagai media, baik elektronik, online maupun sosial media. Bahkan masih menjadi topik obrolan hangat dengan anak-anak atau keluarga di rumah. Tetapi pandemi yang disebabkan oleh virus Corona ini belum juga terlihat akan berakhir.

Berbagai strategi dan kebijakan telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghentikan dan mengantisipasi dampak dari pandemik Covid-19 diantaranya adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan bukan melakukan karantina wilayah (lockdown).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut (PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019).

Dalam pelaksanaannya, PSBB membatasi aktivitas di sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di

tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan operasional transportasi umum. Ojek online roda dua pun tidak boleh membawa penumpang dan hanya diperbolehkan mengantarkan pesanan makanan.

Dampak dari diterapkannya PSBB bagi masyarakat adalah rumah tangga akan mengalami tekanan baik dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan rumah tangga berkurang drastis karena sudah tidak dapat bekerja memenuhi kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal. Begitu juga dengan pengeluaran/konsumsi rumah tangga mengalami tekanan yang disebabkan pembatasan untuk beraktivitas di luar rumah.

Demikian juga bagi usaha-usaha, karena permintaan/pasar berkurang maka proses produksi atau penjualan juga jauh berkurang yang berujung pada berkurangnya keuntungan/pendapatan dan mengakibatkan perusahaan merumahkan sementara beberapa pekerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karantina Wilayah (Lockdown)

Strategi lainnya untuk menghentikan penyebaran Covid-19 adalah karantina wilayah. Strategi ini tidak atau belum diterapkan di Indonesia tetapi telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia

seperti China, Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, dan beberapa negara lainnya. Keputusan menerapkan lockdown disebabkan karena melihat penyebaran jumlah kasus Covid-19 dan jumlah kematian melonjak tinggi di negara tersebut.

Definisi lockdown menurut kamus Merriam Webster artinya adalah tindakan darurat ketika orang-orang dicegah untuk keluar atau memasuki suatu wilayah untuk sementara waktu demi menghindari bahaya. Dengan memberlakukan lockdown maka seluruh aktivitas benar-benar dihentikan; sekolah-sekolah, perkantoran, industri, usaha-usaha dihentikan; sarana transportasi (penerbangan, kereta api, transportasi darat) termasuk jalan tol ditutup dan dihentikan.

Lockdown juga menyebabkan dampak yang cukup serius yaitu terputusnya proses produksi, distribusi, konsumsi perorangan maupun kolektif, dan terhentinya kegiatan sosial. Dengan kata lain kegiatan ekonomi dan sosial akan benar-benar berhenti.

Negara atau pemerintah harus siap menanggung semua kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan pangan, kebutuhan medis, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari, termasuk memperoleh kesamaan hak dalam memperoleh penyelenggaraan kesehatan.

Untuk menanggung seluruh kebutuhan hidup masyarakat selama karantina wilayah dibutuhkan biaya yang sangat besar. Mungkin ini salah satu alasan mengapa Indonesia sampai detik ini belum memutuskan untuk melakukan lockdown.

Ibarat PSBB Rasa Lockdown

Strategi pemerintah untuk menghentikan penyebaran Covid-19 berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah banyak dilaksanakan di beberapa

kota besar di Indonesia. Sampai dengan tanggal 21 April 2020 sudah dua provinsi dan 21 kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan ini, diantaranya adalah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Bogor, Bekasi, Surabaya, Pekanbaru, dll. Beberapa kabupaten/kota lainnya sudah ada yang mengusulkan penerapan PSBB tetapi belum disetujui oleh Menteri Kesehatan dengan berbagai pertimbangan.

Agak sedikit berbeda strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan penerapan PSBB. Strategi ini bukan instruksi dari Pemerintah Pusat kepada seluruh Pemerintah Daerah, tetapi berangkat dari usulan/permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dilengkapi dengan data-data yang menggambarkan kesanggupan wilayahnya untuk menerapkan PSBB, seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dll.

Saat ini pelaksanaan PSBB semakin berkembang salah satu contohnya adalah Kota Pekanbaru. Penerapan PSBB tidak hanya seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi semakin berkembang, misalnya penghentian sarana transportasi penerbangan dan transportasi darat antar wilayah, penutupan jalan keluar/masuk atau perbatasan wilayah, penutupan ruas jalan utama, pemberlakuan jam malam mulai pukul 20.00-05.00 WIB, pelarangan mudik atau pembatasan masyarakat untuk keluar dari wilayah PSBB.

Jika dilihat sepiintas, penerapan PSBB ini hampir sama seperti pelaksanaan karantina wilayah (lockdown). Pelarangan yang dilakukan pada karantina wilayah ternyata juga diterapkan pada wilayah PSBB.

Yang membedakan hanyalah tanggung jawab pemerintah dalam menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Mungkin ini strategi yang dilakukan oleh pemerintah, perlahan tapi pasti melakukan PSBB tetapi juga menerapkan karantina wilayah sedikit demi sedikit tanpa harus menanggung seluruh kebutuhan hidup semua lapisan masyarakat.

Akibat dari apa yang telah diterapkan pemerintah, masyarakat harus menghadapi sendiri kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Meskipun saat ini pemerintah telah menggulirkan bantuan sembako dan BLT Rp 600 ribu perbulan yang diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin. Tetapi masyarakat lainnya yang juga terkena dampak pandemik Covid-19 masih menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan harus menanggung kesulitannya sendiri. Inilah PSBB rasa lockdown.

<https://riah.bps.go.id>



Ekonomi Riau di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,MM

TERBIT DI [HTTPS://THECOLUMNIST.ID](https://thecolumnist.id) 7 MEI 2020



Covid-19 masuk ke Indonesia sejak awal Maret 2020, ditandai dengan pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu: “terdapat 2 WNI di Depok yang positif Corona”.

Sejak diumumkannya informasi tersebut, masyarakat beberapa kota besar di Indonesia (DKI Jakarta dan Surabaya) mulai melakukan panic buying retail. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta pada media cnbcindonesia.com.

Kondisi tersebut mulai mempengaruhi situasi ekonomi daerah dan Indonesia secara umum. Ditambah dengan beberapa kondisi lainnya seperti situasi perdagangan luar negeri, penutupan gerai makanan, dan lain-lain, semakin membuat kondisi ekonomi tidak menentu.

Bagaimanakah dengan kondisi ekonomi Riau pada Triwulan I 2020, apakah sama dengan kondisi nasional atau berbeda?

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tanggal 5 Mei 2020 merilis angka Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan I 2020 sebesar 2,24 persen, bersamaan dengan dirilisnya keadaan ketenagakerjaan berupa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau Februari 2020 sebesar 5,07%.

Untuk kondisi ketenagakerjaan, datanya tidak mencerminkan kondisi

saat terjadinya pandemic Covid-19 karena diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang pencacahan lapangannya dilaksanakan tanggal 8-29 Februari 2020. Sedangkan untuk angka pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 sudah bisa dianggap mencerminkan kondisi pandemi Covid-19.

Struktur Menurut Lapangan Usaha

Riau sebagai provinsi dengan share ekonomi terbesar kedua di luar pulau Jawa memiliki struktur ekonomi yang agak berbeda dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kepemilikan sumber daya alam yang melimpah membuat perekonomian Riau sangat bergantung kepada sumber daya alam, yaitu minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit.

Sektor pertambangan dan penggalian Riau yang didominasi oleh minyak bumi terus mengalami penurunan disebabkan karena produksi minyak semakin berkurang. Ini merupakan pengaruh dari usia sumur-sumur minyak yang ada semakin menua dan ditambah dengan anjloknya harga minyak dunia semakin memperparah pertambangan minyak bumi Riau.

Wilayah dan lahan yang luas menguntungkan bagi Riau untuk meningkatkan perkebunan kelapa sawit. Produksi Kelapa sawit dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) menjadi bahan

baku utama dalam industri Crude Palm Oil (CPO). Kedua sektor inilah (perkebunan dan industri CPO) sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Riau saat ini.

Dengan share lebih dari 50% terhadap PDRB Riau dan ditambah dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 45% dari jumlah penduduk yang bekerja di Riau, kedua lapangan usaha ini menjadi tumpuan baru bagi perekonomian Riau.

Struktur Menurut Pengeluaran

Ada hal menarik dari angka yang dirilis BPS Provinsi Riau. Konsumsi rumah tangga yang diperkirakan akan terdampak parah akibat Covid-19, ternyata masih bisa tumbuh sebesar 1,72 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,25%. Kondisi ini berbeda dengan nasional dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 2,84%. Angka ini sangat rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu 5,02%.

Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar minus 4,83 persen. Kontraksi ini disebabkan adanya kebijakan penggeseran anggaran untuk kepentingan biaya tak terduga dalam menghadapi Covid-19 serta penundaan belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas.

Karena Riau didominasi oleh kelapa sawit dan CPO, hal ini berimbas kepada nilai ekspor Riau yang masih tumbuh sebesar 15,19%. Di luar dari prediksi yang menganggap bahwa dengan terjadinya pandemi Covid-19 di dunia akan menyebabkan ekspor Riau menurun drastis.

Hal tersebut terbantahkan, ternyata meskipun permintaan CPO dari negara China mengalami penurunan, tetapi tertutupi oleh permintaan CPO dari

India yang justru meningkat akibat India memutuskan pembelian CPO dari Malaysia. Peningkatan ekspor juga disebabkan karena Riau melakukan ekspor serat rayon ke Turki dan 14 negara lainnya di dunia (antaranews.com).

Tumbuh Tapi Melambat

Secara umum kondisi ekonomi Riau pada Triwulan I 2020 saat pandemi Covid-19 masih tumbuh, tetapi sedikit melambat. Perlambatan disebabkan karena mulai pertengahan Maret 2020 tepatnya tanggal 17 Maret-15 April 2020 ditetapkan Status Siaga Covid-19. Tepatnya setelah Gubernur Riau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: Kpts.596/III/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non alam akibat virus Corona di Provinsi Riau tahun 2020.

Efek dari penetapan status siaga tersebut adalah memberlakukan social distancing dimana aktivitas masyarakat mulai dibatasi, sekolah/perguruan tinggi diliburkan, kantor-kantor mulai melakukan work from home, dan beberapa aktivitas di luar ruangan dibatasi.

Hal ini berimbas kepada penurunan ekonomi pada berbagai sektor yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat secara umum, seperti menurunnya penjualan/perdagangan kendaraan bermotor, pakaian, dan produk non makanan lainnya, berkurangnya pembelian di rumah makan/restoran, menurunnya penggunaan penginapan/hotel, menurunnya jasa pendidikan, menurunnya jasa lainnya seperti tempat hiburan/rekreasi, salon, dll. Penurunannya ditandai dengan pertumbuhan yang negatif (kontraksi) untuk sektor-sektor tersebut.

Kontraksi/penurunan ekonomi akan semakin berat dirasakan pada Triwulan II tahun ini, dimana banyak daerah yang

sudah menerapkan PSBB secara massif, melakukan penutupan jalur penerbangan, munculnya larangan mudik, dan penutupan usaha-usaha karena sepiya permintaan/penjualan. Hal lainnya yang akan timbul akibat dari penurunan kondisi ekonomi adalah jumlah pengangguran akan semakin besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemberian bantuan berupa sembako dan BLT dari pemerintah perlu disegerakan. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Tidak bisa menunggu nanti atau penundaan lebih lama lagi karena terkait dengan masalah perut manusia. Kita tidak menginginkan kejahatan yang muncul akibat dari perut yang lapar kan? Semoga pemerintah dapat segera bertindak.

<https://riau.bps.go.id>

Mampukah Riau Swasembada Pangan

Oleh : JOKO PRAYITNO, S.SI,MSE

TAYANG DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM,TANGGAL 7 MEI 2020



Pencanangan Sensus Penduduk 2020 Online di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, 15 Februari 2020 lalu, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, di akhir sambutannya menyatakan bahwa ke depan Provinsi Riau harus mampu mencukupi kebutuhan pangan. Walau belum sampai pada tahap swasembada, namun setidaknya mampu meningkatkan jumlah produksi beras. Sektor pertanian tidak harus selalu kelapa sawit, namun tanaman pangan perlu dikembangkan agar Provinsi Riau tidak bergantung pada provinsi lain dalam kecukupan pangan.

Lalu bagaimana dengan data pangan Provinsi Riau saat ini? Apakah sudah cukup untuk konsumsi penduduk Riau?

Pada tanggal 1 Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merilis angka produksi padi tahun 2018 dan tahun 2019. Angka ini merupakan hasil dari Survei Kerangka Sampel Area (KSA). Survei KSA merupakan kerja sama BPS, BPPT, Kementerian ATR/BPN, LAPAN dan BIG.

Ide dasarnya adalah melakukan pengamatan fase tanaman padi di lahan pertanian berbasis data Luas Baku Sawah yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. Setiap akhir bulan, selama 7 hari sebanyak 3.006 titik diamati fase tanamannya lalu dilaporkan ke pusat data.

Pengamatan dilakukan dengan

memfoto obyek dan memberikan laporan kondisi fase tanaman. Misalnya, fase vegetatif atau fase generatif atau fase panen. Dari hasil pengamatan KSA dapat diketahui berapa luas panen padi tiap bulan selama setahun.

Untuk mendapatkan data produksi padi, selain diketahui luas panen maka harus diketahui berapa produktivitasnya, karena data produksi diperoleh dari hasil perkalian luas panen dalam satuan hektar dengan produktivitas dalam satuan ton/hektare.

Cara atau metode survei untuk mengetahui produktivitas lahan pertanian adalah dengan survei tanaman pangan ubinan. Survei ubinan dilakukan pada lahan yang menjadi pengamatan survei KSA, yaitu dengan melakukan penimbangan berat padi pada saat panen, dengan bidang seluas 2,5 meter x 2,5 meter secara acak.

Dari hasil panen pada luas bidang ini diperoleh produksi padi dengan kualitas GKP (Gabah Kering Panen) untuk luasan 6,25 meter persegi, sedangkan untuk mendapatkan produksi padi per hektarenya maka hasil survei ubinan tersebut dikalikan dengan 1.600 sehingga akan diperoleh produksi per hektare dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP).

Untuk mendapatkan produksi padi pada kualitas GKG (Gabah Kering Giling), maka berat padi kualitas GKP dikalikan konversi sebesar 88,46 persen (hasil Survei Konversi Gabah ke Beras 2018). Sedangkan

untuk mendapatkan data produksi beras melalui survei yang sama dikalikan konversi 63,71 persen.

Sebagai contoh misal dalam survei ubinan diperoleh berat GKP 4,5 kg, maka diperkirakan produksi per hektare adalah 7,2 ton GKP yang kalau dijemur/dikeringkan menjadi 6,391 ton GKG dan bila digiling menjadi 4,071 ton beras.

Pada tahun 2019, Kementerian ATR/BPN menetapkan luas baku sawah nasional 2019 berdasarkan keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, tentang Penetapan Luas Baku Sawah Nasional Tahun 2019 yaitu sebesar 7.463.948 hektare.

Luas baku sawah Provinsi Riau sebesar 62.689 hektare. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Riau berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2011 yang sebesar 8.702.366 hektare maka luas baku sawah di Riau hanya 0,72 persen (tidak sampai 1 persen).

Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, persentase lahan baku sawah di Provinsi Riau relatif kecil. Bandingkan dengan Provinsi Lampung 10,45 persen, Sumatera Selatan 5,14 persen dan Sumatera Barat 4,62 persen. Bahkan masih di bawah kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 1,36 persen. Provinsi dengan persentase yang lebih rendah adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,17 persen.

Berdasarkan luas baku sawah tersebut, Survei KSA tahun 2018 menghasilkan luas panen padi seluas 71.448,08 hektare, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan 11,63 persen menjadi 63.142,04 hektare. Penurunan ini bukan tanpa sebab, seperti diketahui bersama bahwa cuaca tahun 2019 cukup ekstrim, dimana di beberapa wilayah

terjadi banjir maupun kemarau yang relatif panjang. Bahkan di beberapa wilayah terjadi kebakaran lahan.

Pola panen padi di Provinsi Riau pada periode bulanan tahun 2019 relatif sama dengan tahun 2018. Puncak panen padi terjadi pada bulan Februari, sementara luas panen terendah pada bulan November. Luas panen Februari 2019 sekitar 12 ribu hektare, sedangkan luas panen pada bulan yang sama tahun 2018 sekitar 13,5 ribu hektare. Penurunan ini diakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah yang menyebabkan gagal panen.

Produksi padi di Provinsi Riau tahun 2019 sebesar 230,87 ribu ton GKG dan yang menjadi beras siap konsumsi sebesar 131,82 ribu ton. Angka ini tentu jauh dari harapan mencapai swasembada pangan mengingat konsumsi beras Provinsi Riau pada tahun 2019 mencapai 635,94 ribu ton. Artinya, terjadi defisit 504,09 ribu ton, atau baru sekitar 21 persen kebutuhan beras dipenuhi dari Provinsi Riau, sedangkan sisanya sekitar 79 persen diperoleh dari luar daerah.

Untuk mengurangi ketergantungan dari luar daerah, maka produksi harus ditingkatkan. Lalu bagaimana cara meningkatkan produksi?

Bila dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor tanaman pangan yang lebih rendah dari sub sektor perkebunan, memang merupakan tantangan tersendiri untuk meningkatkan produksi padi. Bila berhitung secara bisnis jelas budidaya sawit untuk saat ini memang lebih menggiurkan. Namun untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, produksi padi memang perlu ditingkatkan.

Guna meningkatkan produksi padi, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan; Pertama, luas baku sawah ini sedapat

mungkin dipertahankan, jangan sampai tergerus oleh komoditas lain, atau istilah lain menjadi lahan sawah abadi. Bahkan perlu dilakukan pencetakan lahan sawah baru serta mengotimalkan kembali beberapa lahan sawah yang mungkin terbengkalai, karena luas baku sawah kurang dari 1 persen jelas kurang memadai untuk mencukupi kebutuhan pangan. Misalkan dengan produktivitas 4 ton per hektare, dengan asumsi hanya sekali panen dalam setahun, maka untuk memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada dibutuhkan luas sawah minimal sebesar 324 ribu hektare.

Tentu saja ini membutuhkan dana serta sarana prasarana yang tidak sedikit. Bila semua sawah mampu untuk dua kali panen, maka perlu 100 ribu hektar lagi lahan baru yang perlu dicetak. Kedua, luas panen harus ditingkatkan. Bila diamati ternyata indeks panen tahun 2019 hanya 1,01, artinya mayoritas sawah hanya ditanami 1 kali. Sedangkan indeks panen 2018 ketika cuaca relatif lebih baik indeks panen sebesar 1,14, artinya ada beberapa lahan yang dapat ditanami lebih dari dua kali.

Bila semua lahan dapat ditanami dua kali tentu produksi dapat meningkat. Bagaimana meningkatkan luas panen dalam satu tahun, itu yang perlu dipikirkan. Karena fakta di lapangan, banyak faktor yang menyebabkan sawah tidak ditanami lebih dari satu kali, seperti faktor cuaca, faktor air (terkait irigasi), atau faktor kultur budaya masyarakat (tanaman pangan tidak menjadi komoditas yang menarik untuk dijual).

Sistem pengairan yang baik dan ketersediaan air yang cukup merupakan faktor penunjang untuk meningkatkan luas panen. Peran penyuluh pertanian dalam hal ini sangat dibutuhkan.

Barangkali perlu dikaji penerapan

teknologi budidaya padi salibu yaitu teknik menanam padi dengan memanfaatkan rumpun padi sisa panen sehingga dapat menekan biaya produksi, baik pengolahan lahan maupun biaya tanam.

Langkah ketiga adalah meningkatkan produktivitas padi. Rata-rata produktivitas padi berdasarkan hasil ubinan adalah 4,1 ton/hektare GKP. Karena angka rata-rata berarti ada yang produktivitasnya di atas 4 ton/hektare dan ada yang di bawahnya. Berdasarkan hasil Survei Ubinan tahun 2019, angka produktivitas tertinggi mencapai 9 ton per hektare. Artinya ada peluang meningkatkan produktivitas. Bila produktivitas naik maka secara produksi padi akan naik.

Metode atau cara meningkatkan produktivitas padi, tentu dinas yang berkompeten terhadap masalah pertanian yang jauh lebih paham, baik dari pemilihan bibit, pemeliharaan sampai pada proses panen.

Meningkatkan produksi pangan terutama padi di Provinsi Riau merupakan suatu tantangan. Karena secara ekonomi, budidaya sawit lebih menggiurkan. Namun bila mengacu pada konsep ketahanan pangan, maka produksi tanaman pangan memang harus ditingkatkan. Secara besaran Nilai Tukar Petani (NTP) memang tanaman pangan lebih rendah dibanding NTP perkebunan.

Tapi, apakah selamanya kita akan bergantung pada provinsi lain dalam mencukupi kebutuhan pangan. Apalagi di tengah badai virus corona yang bisa mengancam sistem distribusi barang, kemampuan untuk mencukupi pangan secara mandiri harus segera diwujudkan.

Kontroversi Ekonomi Dan Lingkungan Saat Pandemi Covid-19

Oleh : Fitri Hariyanti, SST,MM
TERBIT DI [HTTPS://THECOLUMNIST.ID](https://thecolumnist.id) 15 MEI 2020



Banyak model statistik yang meramalkan kapan pandemi Covid-29 akan berakhir, tetapi kenyataannya sampai saat ini masih terus merajalela.

Akhir April lalu ilmuwan di Singapore University of Technology and Design (SUTD) memperkirakan Covid-19 selesai 99 persen pada akhir Juni mendatang. Namun kemudian SUTD merevisi prediksinya menjadi akhir pada September 2020 (merdeka.com). Dan masih banyak lagi prediksi-prediksi dari para ahli lainnya tentang kapan pandemik ini akan berakhir baik di Indonesia maupun di dunia.

Kendati belum berakhir, pemerintah sudah mulai melakukan relaksasi pelaksanaan PSBB dengan memberikan beberapa kelonggaran. Diantaranya dengan memberlakukan kembali moda transportasi dengan syarat tertentu dan mempersilahkan masyarakat berusia dibawah 45 tahun untuk dapat beraktivitas kembali. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang sempat terpuruk pada triwulan I kemarin.

Dampak Ekonomi

Pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 (2,97 persen) masih boleh dibilang tumbuh walaupun jauh melambat dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,06 persen.

Melambatnya pertumbuhan ekonomiditandai dengan perlambatan pada sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam ekonomi, seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta transportasi. Pengaruh dari kegiatan ekonomi yang melambat menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja pada beberapa perusahaan melalui pemberhentian hubungan kerja (PHK). Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran selama pandemi Covid-19.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 lebih disebabkan karena konsumsi rumah tangga, yang meskipun tumbuh, tapi melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi yang cukup besar dari konsumsi rumah tangga yaitu hampir 57 persen membuat ekonomi Indonesia terguncang dan sedikit terpuruk. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat akibat dari pengurangan pendapatan dan pemberlakuan PSBB.

Dampak Lingkungan

Tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, Covid-19 juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Berbeda dengan dampak terhadap ekonomi yang

negatif, Covid-19 memberikan dampak yang cukup positif terhadap kondisi lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh aktivitas ekonomi baik produksi maupun konsumsi pasti akan menghasilkan “ampas” berupa limbah, sampah, ataupun polusi. Apabila tidak diolah secara tepat akan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Mari kita lihat satu persatu dampak terhadap lingkungan akibat Covid-19.

Kegiatan industri yang menurun cukup signifikan saat pandemik dapat mengurangi limbah dari produk yang dihasilkan. Limbah industri baik padat, cair atau gas yang selama ini dapat mencemari udara, tanah, dan air berkurang cukup signifikan.

Jika pada saat normal (tidak ada pandemi), gas emisi CO₂e yang dihasilkan oleh industri adalah sebesar 55,34 ribu ton maka kemungkinan besar akan berkurang saat terjadi pandemik Covid-19. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berapa pengurangannya.

Polusi udara juga jauh berkurang saat pandemik Covid-19. Hal ini ditandai dengan fenomena dimana Gunung Salak dan Gunung Gede dapat terlihat dari kota Jakarta. Ditambah dengan penjelasan dari Dodo Gunawan, Kepala Pusat Perubahan Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mengatakan bahwa “secara kualitatif udara di Jakarta membaik, terutama setelah anjuran pemerintah provinsi DKI untuk melakukan social distancing” (nationalgeographic.grid.id).

Fenomena tersebut dapat terjadi karena bersihnya langit kota Jakarta yang disebabkan berkurangnya asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik sekitar Jakarta. Selama ini

Kota Jakarta menjadi salah satu dari lima kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan nilai indeks kualitas udaranya mencapai 113 yang masuk kategori tidak sehat.

Kegiatan konsumsi rumah tangga akan menghasilkan sampah rumah tangga. Saat terjadi pengurangan konsumsi rumah tangga maka otomatis jumlah sampah yang dihasilkan juga akan berkurang. Pengurangan sampah bisa mencapai 620 ton perhari untuk kota Jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa. Dengan pendekatan ini, kita dapat memperkirakan besaran pengurangan sampah untuk kota-kota atau daerah lainnya di Indonesia.

Kontroversi Ekonomi dan Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hubungan yang kontroversial antara ekonomi dan lingkungan. Di saat aktivitas ekonomi berupa produksi dan konsumsi meningkat atau positif maka akan terjadi kondisi sebaliknya pada lingkungan. Kondisi lingkungan akan menjadi tidak baik atau negatif yang ditandai dengan banyaknya terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas ekonomi tersebut. Begitu juga dengan kondisi sebaliknya.

Situasi saat pandemik Covid-19 menunjukkan hal yang sejalan dengan statement di atas. Di saat aktivitas ekonomi berkurang karena dibatasi, maka kondisi lingkungan menjadi jauh lebih baik.

Sangat naif, jika lingkungan menjadi baik dan terkendali disebabkan karena terjadinya pandemik yang mengakibatkan aktivitas ekonomi berkurang, bukan disebabkan karena kesadaran umat manusia untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan.

Atau sebaliknya, apakah kita harus menghilangkan aktivitas ekonomi hanya untuk mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Sangat tidak mungkin mengingat aktivitas ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya terutama kebutuhan primer.

dapat jauh berkurang dan bumi menjadi lebih bersih. Dengan mengusung konsep berkelanjutan, mari kita ciptakan Indonesia menjadi negara yang sukses secara ekonomi dan lingkungan yang terjaga.

SDGs Kunci Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan

Pembangunan dalam bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan hanya untuk mengejar pertumbuhan semata sering mengesampingkan kondisi lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan. Konsep berkelanjutan menjadi solusi bagi kontroversi antara ekonomi dan lingkungan. Kita dapat melakukan pembangunan melalui kegiatan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan.

“No One Left Behind” merupakan prinsip pelaksanaan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang artinya pelaksanaan pembangunan tersebut harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan tanpa ada terkecuali.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengusung tiga lingkup yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Aspek ekonomi mengacu kepada kesejahteraan dan peningkatan pendapatan, aspek sosial mengacu kepada keterlibatan masyarakat, dan aspek lingkungan mengacu kepada keberlanjutan fungsi ekologi atau lingkungan.

Harapan kedepan setelah pandemik Covid-19 dapat dilalui dan berakhir, kita tetap dapat menikmati kondisi lingkungan seperti saat ini dimana limbah industri, sampah rumah tangga, polusi udara

Cukup Tangguhkah Ekonomi Riau Hadapi Covid-19?

Oleh :Ferdian Fadly, SST

TERBIT DI [HTTPS://THECOLUMNIST.ID](https://thecolumnist.id) 19 MEI 2020



Perekonomian Provinsi Riau triwulan I - 2020 tumbuh sebesar 2,24 persen sedikit lebih lambat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,89 persen. Namun, hal ini dapat dikatakan relatif cukup tangguh mengingat perekonomian Indonesia mengalami perlambatan yang cukup dalam dari 5,07% menjadi hanya tumbuh 2,97% pada triwulan I 2020 di tengah pandemi penyakit virus corona yang baru (Covid-19).

Melambatnya perekonomian Provinsi Riau di tengah pandemi Covid-19 ini diindikasikan oleh turunnya pertumbuhan nilai tambah bruto (NTB) beberapa lapangan usaha terutama jasa-jasa. Jasa perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi, administrasi pemerintahan, pendidikan dan jasa lainnya berkontribusi negatif terhadap laju pertumbuhan perekonomian Riau Triwulan I - 2020. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa wabah virus Covid-19 telah memukul sektor transportasi dan perdagangan RI.

Itu semua tergambar jelas dari anjloknya penerimaan pajak dari sektor perdagangan dimana mengalami perlambatan dari 8,4 persen menjadi hanya 2,8 persen. Dampak Covid-19 juga terjadi pada industri pariwisata dimana efek dominonya dapat terlihat pada penurunan output yang terjadi pada sektor-sektor penunjang, seperti hotel, restoran, transportasi udara maupun pengusaha retail. Pada jasa pendidikan, untuk menekan penyebaran Covid-19, sejak 16

Maret 2020 pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah.

Namun demikian, tidak semua jasa mengalami pertumbuhan negatif, ada pula yang tumbuh positif bahkan berkali kali lipat, misalnya jasa informasi dan komunikasi. Hal ini erat kaitannya dengan lonjakan penggunaan internet pasca-anjuran bekerja dan sekolah dari rumah akibat Covid-19. Sumbangannya terhadap laju pertumbuhan meningkat tajam dari 0,05 persen menjadi 0,16 persen setelah tumbuh mencapai 17,26 persen. Begitu pula halnya dengan jasa kesehatan yang tumbuh 18,03 persen akibat meningkatnya pelayanan jasa ini selama Covid-19. Meskipun sumbangannya terhadap laju perekonomian Riau sebesar 0,04 persen masih relatif kecil dibandingkan lapangan usaha lainnya.

Pada triwulan I - 2020, perekonomian Riau memang tumbuh melambat akibat Covid-19 tetapi dinilai masih cukup tangguh. Hal ini tak terlepas dari peran Industri pengolahan; Pertanian, kehutanan dan perikanan; serta pertambangan dan penggalian yang mendominasi struktur perekonomian Provinsi Riau. Dalam periode triwulan I - 2020, ketiga lapangan usaha dominan tersebut masing-masing memiliki kontribusi sebesar 27,46 persen; 25,79 persen dan 21,16 persen. Menariknya, 3 lapangan usaha ini belum menunjukkan dampak dari Covid-19 di Provinsi Riau.

Industri pengolahan selama triwulan I - 2020 tumbuh sebesar 5,66 persen lebih lambat dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya sebesar 6,39 persen. Namun demikian, sumbangsihnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi masih cukup besar yaitu 1,73 persen. Hal ini tidak terlepas dari impresifnya laju pertumbuhan Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi. Ekspor pulp meningkat akibat penurunan produksi negara lain terutama Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan internasional. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton menyatakan ada peningkatan pulp rayon (dissolving pulp) di pelabuhan dari RAPP sejak diresmikannya pabrik rayon PT Asia Pacific Rayon (APR) oleh Presiden RI tanggal 20 Februari 2020.

Tingginya peningkatan permintaan pulp bubuk kertas dari luar negeri menarik peningkatan tambahan bahan baku industri kertas berupa kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Akibatnya, terjadi peningkatan produksi kayu bulat. Sehingga, pertanian, kehutanan dan perikanan dalam periode ini tumbuh sebesar 7,81 persen jauh lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh hanya sebesar 2,22 persen.

Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi sebesar -5,22 persen sedikit lebih turun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar -3,56 persen. Adapun kontraksi yang masih terus berlanjut tersebut di latarbelakangi oleh natural declining yaitu penurunan alami pada produksi minyak terkait produksi yang masih memanfaatkan sumur-sumur tua. Sedangkan, konstruksi pada triwulan I 2020 tumbuh 2,22 persen lebih lambat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,37 persen. Namun demikian, sektor ini masih tumbuh positif. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangu-

nan infrastruktur di tengah merebaknya pandemi Covid-19 dan upah tetap dibayar sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020.

Covid-19 telah mengguncang perekonomian Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Riau. Menariknya, berdasarkan gambaran perekonomian Riau triwulan I 2020 dapat ditunjukkan bahwa sektor jasa-jasa lebih responsif terkena imbas Covid-19. Lain halnya dengan sektor barang dimana efek dari Covid-19 belum terlalu terlihat nyata pada triwulan I-2020. Boleh jadi, hal ini tidak terlepas dari Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.596/III/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana non alam akibat virus corona di provinsi riau tahun 2020 baru mulai berlaku 17 Maret 2020 atau di penghujung triwulan sehingga pengaruhnya belum terasa. Beruntung, 73,9 persen perekonomian Provinsi Riau didominasi sektor barang yaitu Industri pengolahan; Pertanian, kehutanan dan perikanan; serta pertambangan dan penggalian sehingga dampak perlambatan akibat Covid-19 tidak terlalu besar.

Kita semua tentu berharap pandemi ini dapat selesai secepatnya. Namun, tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, triwulan II 2020 akan menjadi titik terberat dalam perekonomian Indonesia. Dalam skenario pemerintah, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini bisa hampir mendekati nol persen. Terbuka kemungkinan Indonesia bisa mengalami resesi ekonomi, apabila wabah penyakit Covid-19 tidak kunjung usai. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Riau? ke depan, apa sektor-sektor dominan pada perekonomian itu masih tetap tangguh? Tentu kita berharap demikian. Semoga.

#StaySafe #StayHealthy

The New Normal: Harus Bangkit dan Bertahan Menjalannya

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TULISAN DIMUAT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID , 22 MEI 2020



Beberapa waktu lalu, World Health Organization (WHO) melalui Direktur Kedaruratan, dr. Mike Ryan, menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan: “virus corona mungkin tidak akan hilang”. Informasi tersebut membuat khawatir apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa sampai saat ini vaksin yang diharapkan dapat mengatasi virus Corona belum ditemukan.

Rasa optimisme yang disampaikan oleh para ahli melalui ramalan model statistik, yang semula yakin bahwa COVID akan berakhir Juli 2020 berubah menjadi keragu-raguan setelah mendengar apa yang disampaikan oleh WHO. Penambahan jumlah kasus baru yang setiap hari terus muncul meskipun kebijakan PSBB sudah diterapkan sejak beberapa waktu lalu, serta dengan melihat kenyataan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini ikut terpuruk akibat pandemi COVID membuat kita berpikir, akan seperti apa kehidupan kita ke depan?

Hal tersebut di atas, mungkin menjadi alasan hingga akhirnya Jokowi mengeluarkan statement yang disampaikan melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden “ Kita harus berkompromi dengan COVID, hidup berdampingan dan harus berdamai dengan COVID” (news.detik.com).

Pola Hidup Baru “The New Normal”

“Berkompromi dengan COVID” dapat dimaknai kita harus dapat beradaptasi

dengan pola atau gaya hidup baru atau dikenal dengan istilah “The New Normal”. Yaitu dengan cara menjalani hidup kembali seperti sebelumnya tetapi dengan tetap berhati-hati karena virus corona selalu mengintai dan bisa kapan saja menjangkiti kita.

Pola hidup baru ini menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan mengubah cara berpikir, berperilaku, berhubungan atau berelasi di semua sendi kehidupan baik sosial, budaya, maupun ekonomi.

Semua aktivitas yang dilakukan harus diiringi dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar dan harus penuh dengan disiplin, harus tetap menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi kontak fisik, selalu mencuci tangan, dan mengurangi perjalanan yang tidak perlu merupakan protokol kesehatan yang harus kita terapkan.

Dampak Pandemi COVID

Sudah banyak menjadi bahan diskusi bahkan menjadi bahan kajian ilmiah bahwa pandemi COVID memberikan dampak ke dalam seluruh sendi kehidupan. Dampak sosial yang dirasakan diantaranya adalah perubahan perilaku individu yang ditandai dengan semakin seringnya melakukan aktivitas mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain-lain. Begitupun perubahan perilaku masyarakat, aturan menjaga jarak membuat kehidupan sosial jadi terbatas.

Dampak terhadap budaya yang

sangat terasa saat ini adalah tidak adanya kegiatan mudik dan beberapa kegiatan tradisi lainnya di daerah, biasanya kegiatan tersebut rutin dilakukan pada saat bulan Ramadhan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan alasan untuk pencegahan penyebaran virus Corona, pemerintah mengeluarkan aturan pelarangan mudik untuk ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN di tahun ini.

Dampak terberat yang dirasakan adalah ekonomi. COVID membuat ekonomi terpuruk, pertumbuhan ekonomi melambat yang disebabkan perlambatan pada sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam ekonomi, seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta transportasi.

Selain itu pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan meningkatkan jumlah pengangguran. Hal ini semakin memperparah kondisi ekonomi karena menyebabkan berkurangnya pendapatan yang berimbas kepada penurunan konsumsi rumah tangga.

Kreatif Kunci Bangkit dan Bertahan

Pemerintah mempunyai wacana berupa timeline atau skenario untuk menerapkan new normal di Indonesia yang dibuat dan dipresentasikan oleh Ekonom Senior Raden Pardede. Meskipun diakui Raden Pardede bahwa itu baru sebatas proposal saja (cnbcindonesia.com). Skenario dimulai dengan mengaktifkan kegiatan ekonomi secara bertahap mulai awal Juni.

Dimulai dengan mulai beroperasinya industri dan jasa bisnis di fase pertama; diikuti dengan pembukaan toko, pasar dan mall pada fase kedua; mengaktifkan kembali sektor pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah pada

fase ketiga ; membuka kembali sarana tempat ibadah dan travelling ke luar kota pada fase keempat; hingga membuka seluruh kegiatan ekonomi pada fase kelima di akhir Juli 2020. Semua skenario yang dirancang tersebut tetap dengan memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan.

Kondisi new normal akan menuntut perubahan pada proses bisnis suatu aktivitas ekonomi. Yang sebelumnya interaksi fisik tidak dibatasi, kini interaksi fisik sangat diperhatikan dan dibatasi. Penggunaan teknologi informasi juga akan intens digunakan. Sangat dibutuhkan kreativitas untuk menjalankan kembali bisnis untuk bangkit dan tetap bertahan di tengah situasi pandemi COVID. Bentuk kreativitas seperti apa saja yang bisa membuat sektor ekonomi bertahan saat new normal?

Sektor pendidikan, aktivitas belajar mengajar yang selama ini identik dengan tatap muka secara langsung di kelas atau di ruangan, ternyata tidak selamanya harus berjalan secara konvensional. Proses belajar mengajar atau transfer ilmu dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan fasilitas media online atau tatap muka secara virtual.

Hal ini sudah gencar dilakukan mulai dari pemberian tugas-tugas sekolah yang dilakukan menggunakan media sosial sampai bentuk seminar-seminar yang dilakukan oleh para pakar melalui media web meeting online. Ke depannya hal ini bisa terus dikembangkan.

Pedagang-pedagang kecil baik bahan makanan atau makanan jadi, aktivitas jual beli tetap bisa berjalan dengan memanfaatkan media sosial. Cukup dengan menginformasikan apa saja yang dijual dan berapa harganya serta nomer kontak yang bisa dihubungi maka proses jual beli atau pemesanan dapat dilakukan dan barang

dapat diantar langsung ke tempat pembeli.

Rumah makan dan restoran, sektor bisnis ini sangat terpuak akibat COVID. Efek dari pemberlakuan PSBB membuat masyarakat mengurangi konsumsi di rumah makan atau restoran. Tetapi dengan kondisi new normal dimana aktivitas ekonomi sudah dibuka kembali maka sektor ini bisa bangkit. Dengan tetap memberlakukan sistem take away ditambah merubah sedikit interior ruangan dengan tetap menerapkan aturan jaga jarak, sektor ini dapat Kembali bangkit.

UMKM, penggunaan masker akan menjadi trend baru untuk saat ini dan kedepannya. Hal ini memberikan peluang para UMKM untuk mengembangkan produk masker dengan berbagai kreaitifitas bentuk dan model. Ditandai dengan semakin maraknya penjualan hijab masker sebagai bukti bahwa kreatifitas pada UMKM sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan.

Tempat wisata atau taman hiburan, dengan kondisi new normal yang masih diselimuti dengan rasa khawatir akan COVID, bisnis tempat wisata dapat dikembangkan dalam bentuk virtual. Mengingat bahwa harga tiket penerbangan pasti akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan membuat jumlah wisatawan akan berkurang drastis. Dengan model wisata virtual, masyarakat masih dapat menikmati dan melihat keindahan tempat wisata meskipun tidak secara langsung.

Sektor pemerintahan, proses bisnis sektor pemerintahan mengalami perubahan cukup signifikan dengan penerapan work from home. Walaupun aktivitas dilakukan dari rumah, tetapi hal ini tidak mengurangi produktivitas pegawai. Bahkan banyak pengeluaran negara yang bisa ditekan dan dihemat, seperti pengeluaran paket meeting atau rapat.

Yang biasanya kegiatan ini membutuhkan anggaran yang sangat besar tetapi pada saat pandemik dapat dialihkan bentuk meeting secara virtual menggunakan web meeting online.

Beberapa contoh di atas adalah bentuk kreatifitas yang dapat dilakukan sektor ekonomi untuk tetap bertahan dan bangkit di era new normal. Seperti untaian pada kalimat bijak “Menyerah dan menyatu pada keterpurukan, maka hanya akan memperlambat jalan menuju sukses. Buka matamu, hadapi dunia, tunjukkan kamu mampu”. Selama ada kemauan pasti ada jalan. The show must go on. Bersama kita bangkit dari pandemi COVID-19.

Dana Desa: Penggerak Cakra Pembangunan

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TULISAN DIMUAT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID , 30 MEI 2020



Dalam tiga bulan terakhir, berita tentang Covid-19 selalu mengisi keseharian hidup kita. Mulai dari berita kapan pertama kali masuk ke Indonesia sampai akhirnya berita tentang keputusan pemerintah yang meminta kita untuk berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid dengan cara menjalani hidup “The New Normal”. Tidak hanya itu, bahkan Covid-19 pun menjadi sumber inspirasi lima tulisan saya dalam satu bulan terakhir.

Salah satu sumber anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah dana desa. Dimana aturan penggunaannya adalah maksimal 35% dari total jumlah dana desa yang didapat walaupun masih bisa lebih itu dengan kondisi tertentu. Tetapi kali ini bukan penggunaan untuk Covid-19 yang kita angkat tetapi penggunaan dana desa untuk pembangunan di Indonesia.

Membangun dari Pinggiran

Pemerintahan Jokowi dikenal dengan sembilan program prioritas yang bertajuk Nawacita. Nawacita butir ketiga berbunyi: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Artinya, strategi pembangunan di era Jokowi mengusung konsep “Membangun Dari Pinggiran”.

Konsep ini agak berbeda mengingat biasanya pembangunan memprioritaskan

daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi baik kepemilikan sumber daya alam maupun potensi wisata yang dapat dikembangkan.

Pembangunan yang didasarkan karena kepemilikan sumber daya alam biasanya akan berujung kepada kondisi yang memprihatinkan. Di saat sumber daya alam habis maka habis pula masa kejayaan daerah tersebut, contohnya Venezuela sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia dan Provinsi Riau sebagai provinsi penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Sementara pembangunan yang didasarkan dari potensi wisata akan sangat membutuhkan modal besar untuk mengembangkannya. Karena pariwisata membutuhkan infrastruktur pendukung seperti sarana jalan untuk sampai ke tempat wisata, fasilitas akomodasi dan konsumsi yang cukup memadai, serta teknik marketing untuk mempromosikan pariwisata itu sendiri. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pariwisata akan memiliki efek domino yang cukup besar bagi ekonomi suatu wilayah.

Kita kembali ke konsep membangun dari pinggiran, strategi membangun dari pinggiran merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan juga bertujuan agar pembangunan bisa secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat pedesaan.

Konsep ini tidak melihat apakah suatu desa memiliki potensi atau tidak

tetapi lebih diarahkan untuk membangun desa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan. Penggerak konsep membangun dari pinggiran menggunakan dana desa sebagai motor penggeraknya.

Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 tentang Desa menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dana desa didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis suatu desa. Jadi jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa akan berbeda.

Secara tujuan, adanya dana desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Tujuan yang sangat mulia sekali apabila penggunaan dana desa benar-benar digunakan sebagaimana seharusnya dan tidak diselewengkan. Beberapa waktu lalu kita mendengar hampir seribu kepala desa bermasalah dengan hukum karena kasus dana desa (waspada.co.id). Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di desa ternyata untuk beberapa kepala desa dianggap sebagai tambahan penghasilan dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan dana desa diharapkan berputar di dalam desa dan tidak keluar. Contohnya jika suatu desa ingin membangun infrastruktur, maka gunakan bahan material dan tenaga kerja yang tersedia di desa, jangan menggunakan pihak ketiga dan menggunakan tenaga kerja dari luar. Dengan demikian perekonomian dapat

berputar dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Efektivitas Dana Desa

Pemberian dana desa telah berjalan beberapa tahun tepatnya sejak 2014. Dengan melihat besarnya jumlah dana desa yang telah digelontorkan pemerintah, harusnya sudah dapat mengangkat kondisi desa-desa di Indonesia menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa.

Mari kita lihat perubahan pembangunan desa dengan membandingkan kondisi awal digelontorkannya dana desa (2014) dengan kondisi beberapa tahun setelah dana desa digelontorkan (2018). Data yang kita gunakan untuk membandingkan adalah data Potensi Desa tahun 2014 dan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kantor Desa, sudah selayaknya desa memiliki sarana dan prasarana berupa kantor desa untuk memberikan layanan kepada masyarakat desa. Salah satu penggunaan dana desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kantor desa. Terdapat penambahan 6,3 ribu kantor desa sampai dengan tahun 2018 atau terdapat peningkatan jumlah keberadaan kantor desa sebesar 8,37 persen. Dengan penambahan yang cukup signifikan, diharapkan aparat desa dapat lebih maksimal memberikan layanan.

PAUD, atau Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu fasilitas penting untuk mengembangkan cara belajar anak usia 0-3 tahun. Menurut Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar “selain berguna untuk pengembangan sosial, kognitif, dan emosional anak, PAUD juga berguna untuk

pertumbuhan fisik anak” (edukasi.kompas.com).

Terjadi penambahan jumlah POS PAUD dari tahun 2014 sampai 2018 sebanyak 13,3 ribu pos. Dengan penambahan yang cukup banyak ini diharapkan dapat mencetak generasi muda sebagai Sumber daya Manusia yang unggul di masa depan.

Posyandu, pembangunan posyandu dengan menggunakan dana desa sangat bermanfaat untuk memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terdapat penambahan sebanyak 568 posyandu dari kurun waktu 2014-2018.

Keberadaan Bank, status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, BKD, dll. Keberadaan BPR di desa mencerminkan kegiatan perekonomian berjalan. Terdapat penambahan sebesar 876 BPR sejak kurun waktu 2014-2018. Dan masih banyak lagi bukti pembangunan lainnya di desa-desa.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat terjadi pembangunan yang cukup signifikan di desa. Penambahan infrastruktur dan fasilitas pada aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi yang ada cukup signifikan dan harusnya tujuan dari diberikannya dana desa dapat tercapai. Meskipun secara jumlah dan kasat mata terlihat bukti dari pembangunan di desa tetapi perlu di kaji tingkat efektifitas dari penggunaan dana desa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Tingkat efektivitas dapat dilihat bukan saja dari output yang dihasilkan tetapi kita juga harus melihat outcome dari penggunaan dana desa. Apakah dana desa yang dikeluarkan begitu besar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat

desa? Apakah ekonomi dapat tumbuh dan berkembang di desa? Apakah masih terjadi ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah? Apakah dana desa dapat mengurani kemiskinan dan pengangguran di desa?

Perlu kajian lebih lanjut untuk melihat tingkat efektivitas penggunaan dana desa. Jangan sampai dana desa yang begitu besar ternyata hanya memberikan efek yang kecil pada pembangunan di Indonesia.

Membangun dari pinggir sudah tepat tetapi butuh pengawasan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaannya. Bukan hanya tugas inspektorat atau BPK saja, tetapi menjadi tugas kita semua untuk mengawal penggunaan dana desa. Dana desa yang efektif dan efisien dapat menjadi penggerak roda pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik.

Perumahan di Indonesia: Haruskah dengan TAPERA?

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TULISAN DIMUAT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID , 7 JUNI 2020



Memiliki rumah sendiri pasti menjadi idaman bagi semua keluarga, karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Di saat dua kebutuhan utama tersebut telah terpenuhi, pasti manusia mulai berpikir untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman. Selain itu, rumah juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Dengan melihat kualitas, fasilitas, dan status kepemilikan, kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan di dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan jelas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahanyangsehat,aman,harmonis,dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi perumahan saat ini

Kebutuhan akan perumahan di Indonesia bukannya berkurang tetapi

justru semakin bertambah setiap tahunnya. Salah satunya disebabkan karena dinamika kependudukan berupa pertumbuhan, penyebaran, dan mobilitas penduduk. Seringkali perkembangan penduduk tidak sejalan dengan pembangunan perumahan sehingga setiap tahun jumlah kebutuhan akan perumahan semakin bertambah. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati di Indonesia didominasi dengan status milik sendiri yaitu 80,07 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga dengan kepemilikan rumah milik sendiri di perdesaan (90,53 persen) lebih tinggi daripada di perkotaan (71,85 persen). Dengan kata lain, penduduk perkotaan lebih cenderung untuk tinggal di rumah kontrak, sewa, atau bebas sewa.

Program Perumahan Pemerintah

Tingginya harga rumah yang setiap tahun pasti mengalami kenaikan, membuat rumah tangga dengan kondisi ekonomi terbatas mengalami kesulitan untuk mewujudkan impian memiliki rumah layak huni. Atas dasar itulah sejak tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Program Nasional Sejuta Rumah. Program ini menjadi salah satu program andalan

pemerintahan Jokowi untuk menyediakan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Disampaikan oleh Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid menyatakan pembangunan rumah untuk masyarakat melalui Program Nasional Sejuta Rumah hingga 31 Desember 2019 mencapai 1.257.852 unit dan program ini akan tetap dilanjutkan mengingat masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan hunian yang layak huni (mediaindonesia.com).

Kejutannya Tapera

Saat ini masyarakat Indonesia masih berada pada kondisi yang tidak menentu karena Covid-19. Pandemi yang telah berlangsung beberapa bulan membuat seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi serba terbatas dan juga berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Meskipun saat ini pemberlakuan PSBB di sebagian besar wilayah sudah berakhir dan sedang menuju ke tahapan hidup new normal, tetapi tidak serta merta dapat mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat yang terlanjur terpuruk.

Di tengah upaya masyarakat untuk bangkit dan bertahan serta mengembalikan kondisi ekonomi, pemerintah kembali memberikan kejutan. Setelah sebelumnya pemerintah menaikkan iuran BPJS untuk kelas I dan II yang akan dimulai terhitung 1 Juli 2020, kini kejutan selanjutnya adalah dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah No.25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2020.

Tapera dibentuk dengan tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja yaitu PNS, prajurit TNI dan POLRI, pekerja di perusahaan BUMN dan

BUMD, dan perusahaan swasta. Adapun besaran iuran Tapera adalah 3 persen dengan rincian sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja melalui pemotong gaji karyawan setiap bulannya.

Jika kita telaah lebih lanjut, PP tentang Tapera yang mewajibkan seluruh PNS, prajurit TNI dan POLRI, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta menjadi bentuk “pemaksaan” pemerintah untuk mengumpulkan dana dari rakyat. Menjadi kurang pas karena berdasarkan data status kepemilikan rumah, boleh dibilang sebagian besar rumah tangga di Indonesia sudah memiliki tempat tinggal (80,07 persen). Bahkan mungkin untuk beberapa PNS, prajurit TNI dan POLRI, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan perusahaan swasta, bisa jadi mereka memiliki rumah lebih dari satu (perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hal ini).

Akan lebih baik dan bijak jika aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk perumahan tidak bersifat “memaksa” kepada rakyatnya. Cukup dengan melanjutkan program sejuta rumah yang telah ada, serta pemberian subsidi dan menghilangkan uang muka (down payment/ DP) untuk kepemilikan rumah pertama atau dengan tingkatan pendapatan tertentu, diharapkan dapat mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia.

Problematika Kehidupan Anak

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 14 JUNI 2020



Salah satu penyanyi papan atas Indonesia yang juga merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia sedang menjadi topik perbincangan di berbagai media sosial.

Konflik internal keluarga yang terjadi antara ibu dan anak yang disampaikan melalui media sosial mengundang reaksi berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari netizen, youtuber, pakar psikolog anak, bahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI berkomentar dalam kasus ini.

Konflik yang terjadi disebabkan karena selisih paham di antara mereka. Kondisi mereka yang tinggal berjauhan akibat perceraian bisa jadi menjadi pangkal permasalahannya. Tidak hanya itu, berbagai akibat dari tinggal terpisah antara anak dan orang tua akan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh sang anak.

Tidak hanya masalah perceraian, masih banyak masalah lainnya yang harus dihadapi anak Indonesia saat ini. Mulai dari masalah hak sipil anak sampai ke masalah kesehatan anak. Semuanya butuh perhatian dan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Kondisi anak Indonesia saat ini

Proyeksi BPS terhadap jumlah penduduk 0-17 tahun mencapai 79,55 juta jiwa (30,11 persen) di tahun 2018. Jumlah ini menunjukkan tren menurun dan

diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 78,97 juta jiwa (27,96 persen). Hal ini diasumsikan sebagai akibat dari penurunan jumlah kelahiran total (TFR) pada masa mendatang.

Ada hal menarik, persentase penduduk 0-17 tahun tertinggi adalah Provinsi Riau mencapai 35,5 persen dari total penduduk Riau. Perlu penelitian lebih lanjut untuk dapat menjelaskan mengapa terjadi demikian.

Jika dilihat rasio jenis kelamin penduduk Indonesia 0-17 tahun tahun 2018 adalah sebesar 103,26; ini menandakan bahwa anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Dan jika dilihat berdasarkan komposisinya, usia terbanyak adalah pada usia 7-12 tahun (33,4 persen) dan usia di bawah 5 tahun (21,9 persen). Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah baik di sektor Pendidikan maupun Kesehatan untuk kedua kelompok umur tersebut.

Masalah kehidupan anak

Tidak hanya orang dewasa saja yang mengalami permasalahan dalam hidupnya, tetapi anak-anak pun bisa mengalami banyak permasalahan. Menurut Psikolog keluarga dari Lembaga Bantuan Psikologi dan Pengembangan Diri, Nana Maznah Prasetyo, menjelaskan keadaan anak saat ini, setelah anak lahir, tumbuh serta berkembang di lingkungan keluarga, akan disertai masalah demi masalah. Bahkan

lebih dari 90 persen permasalahan pada anak disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktahuan orang tua (republika.co.id). Mari kita telisik satu persatu permasalahan yang terjadi pada anak di Indonesia.

Hak Sipil Anak, melalui UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menekankan bahwa akta kelahiran merupakan hak anak dan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Pengabaian atas hak sipil anak tidak hanya berdampak pada status warga negara serta perlindungan terhadap anak tetapi juga berdampak pada hak dan kewajiban anak di masa yang akan datang.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 16,13 persen anak usia 0-17 tahun tidak mempunyai akta kelahiran. Bahkan masih terdapat 0,32 persen orang tua yang tidak tahu apa itu akta kelahiran. Angka ini masih cukup besar mengingat pemerintah semakin memberikan kemudahan di dalam pengurusan akte kelahiran.

Saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran yaitu cukup dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM/Supertajam). Ini merupakan inovasi yang dibuat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk mengatasi permasalahan kepemilikan sekaligus meningkatkan kepemilikan akta kelahiran (mediaindonesia.com).

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Keluarga yang lengkap merupakan impian seluruh keluarga Indonesia. Tetapi seringkali perceraian atau perpisahan tidak dapat dihindari di dalam berjalannya waktu. Perceraian tidak hanya terjadi pada artis papan atas Indonesia saja, tetapi juga bisa terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, seperti buruh pabrik, pegawai

swasta, guru, pejabat, bahkan seorang kyai atau ulama pun bisa mengalami perceraian.

Banyak yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya; faktor ekonomi, mabuk, judi, obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, cacat fisik, pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan masih banyak sebab lainnya. Bahkan karena pekerjaan pun bisa menyebabkan terjadinya perceraian/perpisahan.

Hidup terpisah akibat perceraian tidak hanya mengakibatkan selisih paham tetapi juga bisa menyebabkan insecurity, perasaan sedih, rasa kesepian, marah, merasa kehilangan, merasa tidak diinginkan, bahkan rasa menyalahkan diri sendiri pada anak.

Di Indonesia terjadi penurunan jumlah anak usia 0-17 tahun dan belum kawin yang tinggal bersama bapak dan ibu kandung. Dari 87,15 persen di tahun 2009 menjadi 84,33 persen di tahun 2018. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya perceraian yang terjadi di Indonesia. Sejak 2009 sampai 2018, perceraian naik sebesar 82,75 persen. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mencari penyebab tingginya perceraian di Indonesia.

Pernikahan dan Melahirkan Dini, pernikahan anak di bawah usia 18 tahun akan memberikan dampak negatif. Dalam bidang pendidikan, anak yang telah menikah akan kehilangan kesempatan untuk bersekolah, baik disebabkan karena dari diri anak sendiri atau dari pihak sekolah. Dan kedepannya akan berpengaruh pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pada tahun 2018, untuk anak yang berstatus kawin dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya hanya sampai SMP mencapai 51,88 persen. Artinya separuh dari anak perempuan usia 10-17 tahun sudah mengalami perkawinan

dan hanya mengenyam pendidikan sampai SMP.

Usia yang masih terlampau muda untuk menikah dapat meningkatkan resiko kesehatan baik pada ibu maupun anak yang dikandungnya. Resiko kematian pada ibu dan bayi sangat tinggi karena disebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh pada ibu muda. Selain itu juga dapat meningkatkan risiko komplikasi medis seperti pendarahan saat persalinan dan meningkatkan risiko bayi lahir mati atau lahir sekarat (skata.info).

Perilaku merokok, merokok biasanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi saat ini anak-anak pun sudah banyak yang merokok. Berawal dari rasa ingin tahu atau coba-coba yang kemudian berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan anak-anak merokok diantaranya: contoh dari orang terdekat (ayah, paman, kakek, dan sebagainya), pengaruh pergaulan, pelarian dari masalah serta persoalan yang lainnya.

Meskipun proporsi merokok yang dilakukan setiap hari pada anak usia 10-14 tahun tidak terlalu besar (0,7 persen) tetapi hal ini tidak boleh dibiarkan karena bahaya yang ditimbulkan dari merokok dapat menyebabkan penyakit berbahaya bahkan kematian. Dan juga, merokok yang sudah menjadi kebiasaan akan sangat sulit untuk dihentikan.

Upaya mengatasi masalah

Seperti yang disampaikan dalam pidato Bung Karno “Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia”. Begitulah dahsyatnya kemampuan generasi muda dalam pembangunan. Oleh karena itu, permasalahan dalam kehidupan anak harus ditangani dengan serius, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan

dipundaknya beban pembangunan akan diletakkan. Untuk itu ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah kehidupan anak. Agama, menjadi modal atau landasan utama untuk mengatasi bahkan mencegah terjadinya permasalahan dan hidup anak. Dengan bekal agama yang kuat, anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupannya. Selain itu kehidupan spiritual akan membuat anak-anak selalu ingat kepada sang penciptanya.

Kasih sayang orang tua, perhatian dan kasih sayang yang tulus dari orang tua dapat meningkatkan rasa nyaman dan membuat anak menjadi terbuka. Orang tua dapat menjadi tempat berkeluh kesah sehingga komunikasi akan tercipta dengan baik. Perceraian atau perpisahan bukan menjadi alasan untuk mengurangi perhatian dan kasih sayang terhadap anak tetapi justru harus ditingkatkan sehingga komunikasi pun tidak terputus walau jarak memisahkan.

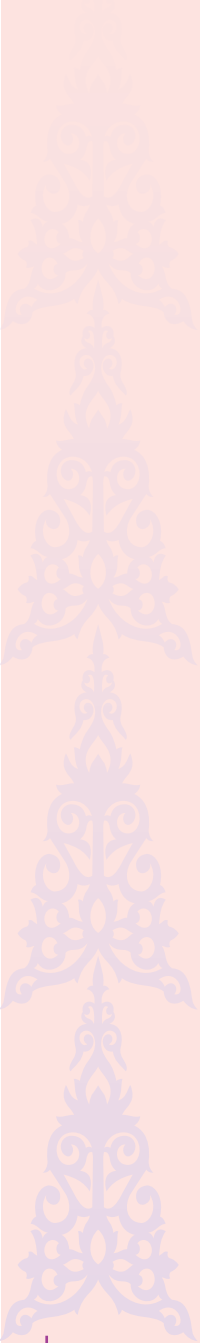
Lingkungan yang baik, anak-anak yang tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan yang baik, kemungkinan besar akan mempengaruhi karakter anak dan dapat menghasilkan generasi muda yang baik. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat bermain, dan lingkungan sekolah.

Pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berbagai permasalahan menyangkut anak menjadi tanggung jawab kementerian ini.

Kerjasama dan koordinasi semua pihak diharapkan dapat mengatasi permasalahan kehidupan anak di Indonesia. Butuh keseriusan dan langkah konkrit untuk mencetak generasi penerus bangsa. Bangsa yang kuat memiliki generasi muda

yang hebat.

<https://riau.bps.go.id>



Kekerasan pada Perempuan: Dosa Siapa?

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 21 JUNI 2020



Perempuan Indonesia saat ini (World Bank, 2016). memiliki capaian yang luar biasa. Dibuktikan dengan semakin besarnya kesempatan untuk menjadi orang-orang hebat di negeri ini, seperti menjadi wakil rakyat, menteri, pengusaha, tenaga profesional, bahkan pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Jumlah penduduk perempuan di Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 134,27 juta jiwa atau sekitar 49,80 persen. Jumlah ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan mulai tahun 2032 jumlah penduduk perempuan akan lebih banyak dari laki-laki (proyeksi hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015).

Walaupun perempuan seringkali dianggap sebagai mahluk yang lemah, ternyata perempuan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Entah karena memang ingin berkarya dan berkarir, atau karena tuntutan ekonomi yang memaksa kaum perempuan untuk ikut bekerja mencari nafkah. Sekitar 9,4 juta perempuan Indonesia bekerja pada sektor industri kreatif. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pekerja laki-laki yang sebesar 7,5 juta (hasil Sensus Ekonomi 2016).

Tidak hanya sebatas bekerja menjadi buruh atau pegawai, tetapi perempuan Indonesia juga banyak yang memiliki usaha atau menjadi pengusaha. Sebanyak 36 persen menjadi pengusaha, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga kita Malaysia yang hanya sekitar 20 persen

(World Bank, 2016).

Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan capaian perempuan Indonesia. Tetapi di sisi lain cukup mengkhawatirkan, karena peran ganda perempuan biasanya berdampak ke dalam kehidupan keluarga dan anak, seperti menjadi mudah marah dan kurang peduli dikarenakan lelah bekerja, perasaan suami yang merasa tersaingi oleh istri, dan lalai dalam mengurus rumah tangga.

Kekerasan pada Perempuan

Meskipun tidak sedikit yang berhasil dan sukses dalam kehidupan, ternyata masih banyak perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan di dalam hidupnya. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Kita dibuat terhenyak dengan berita kasus pemerkosaan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan. Pemerkosaan dilakukan oleh 7 orang pemuda terhadap seorang gadis remaja berusia 16 tahun dan berujung kematian. Kejadian biadab ini terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2020 (news.detik.com)

Kasus pemerkosaan ini merupakan satu dari sekian ratusan ribu kasus yang menimpa kaum perempuan di Indonesia. Ibarat puncak gunung es di tengah lautan, kasus yang terlihat dan terungkap hanya sedikit padahal masih banyak kasus kekerasan lainnya yang terjadi dan tidak dilaporkan. Entah karena ancaman yang dilakukan terhadap korban atau karena

rasa malu jika masyarakat luas mengetahui apa yang menimpa korban.

Pemeriksaan merupakan satu dari lima belas bentuk kekerasan seksual. Masih banyak lagi bentuk kekerasan seksual lainnya yang terjadi pada perempuan seperti pelecehan seksual, prostitusi paksa, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual dan masih banyak lagi. Selain itu, tidak hanya kekerasan seksual saja yang terjadi pada perempuan tetapi juga kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan emosional (psikis), dan kekerasan dalam bentuk pembatasan aktivitas oleh pasangannya.

Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Mulai dari 54,42 ribu kasus pada tahun 2008 naik berkali-kali lipat menjadi 431,47 ribu kasus di tahun 2018. Dan yang sangat memprihatinkan, kasus kekerasan justru paling besar terjadi di wilayah tempat tinggal. Selain itu, pelaku kekerasan tertinggi ternyata dilakukan oleh keluarga, teman dan tetangga (Komnas Perempuan, 2019).

Hal ini sangat mengerikan dan memprihatinkan, rumah atau tempat tinggal yang seharusnya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya, justru menjadi ancaman dan sumber kekerasan terhadap perempuan.

Penyebab Kekerasan pada Perempuan

Kekerasan pada perempuan tidak serta merta terjadi begitu saja. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya kekerasan pada perempuan, baik berasal dari internal individu maupun eksternal individu.

Faktor Individu, kondisi emosi seseorang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Ketidakkampuan mengendalikan emosi, seperti rasa senang yang berlebihan, marah yang teramat sangat, atau takut terhadap sesuatu

dapat berakibat fatal. Banyak kasus yang terjadi hanya karena rasa senang yang berlebihan sehingga timbul rasa cemburu dan curiga yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan.

Hidup di tengah-tengah lingkungan yang terbiasa dengan tindak kekerasan juga dapat menyebabkan seseorang menganggap biasa dalam melakukan kekerasan. Misalnya, seorang anak terbiasa melihat kedua orangtuanya bertengkar setiap saat dan sering melihat sang ayah melakukan tindak kekerasan kepada ibunya, kemungkinan anak akan menganggap apa yang dilakukan sang ayah menjadi hal yang biasa.

Selain itu, pernah menjadi korban kejahatan di masa lalu juga bisa menjadi pemicu seseorang melakukan tindak kejahatan. Karena perasaan marah dan dendam membuat seseorang melakukan kekerasan yang sama yang pernah dialaminya.

Faktor Sosial, sikap pembiaran atau permisif masyarakat sekitar dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam rumah tangga, seringkali masyarakat membiarkannya dengan alasan tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain.

Lingkungan kumuh dan padat penduduk yang selalu identik dengan kemiskinan juga sering kali menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan. Lingkungan yang padat penduduk mudah menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan antara sesama warganya. Selain itu rumah yang tidak layak “kumuh” dengan kondisi luas yang sangat terbatas menyebabkan keterbatasan beraktivitas penghuninya.

Dengan kemudahan terhadap akses internet, menyebabkan siapapun dan kapanpun dapat membuka internet.

Orang dewasa, anak-anak, pelajar, pekerja, bahkan pengangguran sekalipun bisa dengan mudah berselancar di dunia maya. Tidak sedikit kekerasan yang terjadi pada media sosial seperti kasus “bullying”. Selain itu konten yang ada di internet juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan tidak kejahatan, contohnya konten orang dewasa menyebabkan timbulnya kasus pemerkosaan

Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan

Banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang dibentuk untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan, tetapi kenyataannya setiap tahun kasus ini semakin meningkat. Perlu adanya penegakan hukum terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada sehingga dapat membuat pelaku menjadi jera.

Upaya selanjutnya adalah melakukan dengan pemberdayaan terhadap perempuan sehingga kesetaraan dan ketimpangan yang terjadi antar perempuan dan laki-laki tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan program pengentasan kemiskinan dan hidup sehat, serta program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang kekerasan terhadap perempuan, baik bentuk, dampak yang ditimbulkan bagi korban, maupun hukuman yang akan ditanggung pelaku tindak kekerasan. Serta dengan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, juga dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Tenaker Indonesia: Capaian Kualitas atau Hanya Kuantitas?

Oleh : Heni Nainggolan SST, M.M

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 30 JUNI 2020



Seringkali perkembangan dunia angkatan kerja hanya dipandang dari naik turunnya persentase penduduk bekerja atau pengangguran secara umum. Padahal angka tersebut belum dapat membaca secara utuh apakah terjadi perkembangan dalam dunia angkatan kerja ke arah lebih baik dari periode sebelumnya.

Sejalan dengan itu, belum lama ini kita juga mendengar kabar adanya kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk pembangunan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara. TKA yang direkrut dari China tersebut ada sebanyak 500 orang. Dengan alasan belum ada sumber daya lokal yang mampu menangani proyek tersebut tanpa campur tangan TKA.

Memang angka 500 tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia yang lebih dari 131 juta orang. Lagipula boleh-boleh saja menggunakan TKA dalam pengerjaan berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah investasi seyogyanya harus tetap diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Buktinya di pertengahan Juni 2020, Institute for Management Development (IMD) menyampaikan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat 40 dari 63 negara atau mengalami penurunan 8 peringkat dari tahun sebelumnya. Salah satu indikator

yang berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja adalah keterampilan dan kompetisi. Indikator tersebut masih perlu diperbaharui agar kita dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kondisi Tenaga Kerja Indonesia

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional memang terlihat menurun dari 5,01 persen pada Februari 2019 menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Namun, menurunnya angka TPT tersebut belum dapat menggambarkan peningkatan kualitas angkatan kerja Indonesia dalam setahun terakhir.

Begitu pula jika ditelusuri dari nilai Employment to Population Ratio (EPR) Indonesia yang mencapai angka 65,72 pada Februari 2020. Nilai EPR Indonesia ini menggambarkan dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas terdapat 65 orang yang bekerja. EPR digolongkan low ratio jika berada di bawah 50 dan high ratio jika berada di atas 70. EPR Indonesia dapat dikatakan cukup moderat tetapi angka ini masih belum dapat menjamin produktivitas dan kualitas kerja yang dihasilkan.

Pada November 2019, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tetapi memiliki kualitas tenaga kerja yang rendah. Dalam buku laporannya

yang berjudul “The Promise of Education in Indonesia” disampaikan bahwa Indonesia perlu mencermati beberapa hal, yakni: pembelajaran siswa yang masih rendah; tingginya kesenjangan hasil belajar; dan generasi muda tidak dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja (kompas.com).

Dengan kondisi sumber daya alam yang berlimpah, harapannya kita mampu mengelola secara mandiri. Akan tetapi pada kenyataannya, Sumber Daya Manusia (SDM) kita sebagian besarnya bekerja pada jenis tenaga produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar (29,36 persen). Sementara untuk tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenisnya (7,74 persen) masih perlu untuk ditingkatkan. Ditambah lagi, tenaga profesional dan teknisi yang ada terlihat belum sepenuhnya menguasai perkembangan teknologi sehingga masih memerlukan bantuan tenaga kerja asing.

Menelusuri lapangan pekerjaan pada Februari 2020, jumlah penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,04 persen) dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran (18,63 persen). Artinya sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di dua kategori tersebut.

Kategori yang mendominasi ini masih perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. Seperti kurangnya penyediaan tenaga ahli/profesional untuk menciptakan berbagai teknologi modern dalam usaha pertanian atau penciptaan bibit unggul untuk meraih produktivitas tinggi. Selain itu juga perlu diadakan rutinitas pendidikan dan pelatihan pertanian modern di seluruh perdesaan. Dengan demikian relevansi dan kualitas pertanian dapat lebih ditingkatkan.

Demikian juga pada kategori perdagangan besar dan eceran, sebagai contoh kita melakukan pengembangan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun di tengah situasi pandemi diperlukan perubahan strategi bisnis yang menggunakan teknologi digital. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan pemberian edukasi kepada pengusaha kecil dan menengah sehingga dapat menganalisa kebutuhan pasar dan mampu memasarkan produk UMKM secara daring.

Bersama Membangun

Setiap angkatan kerja diwajibkan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang atau akan digelutinya. Rekomendasi International Labour Organization (ILO) untuk pengembangan SDM 2004, mengidentifikasi tanggung jawab bersama untuk pengembangan keterampilan, yang dilakukan pemerintah, mitra sosial, dan individual.

Kita sebaiknya jangan berhenti melangkah jika sudah tersedianya suatu lapangan usaha yang dapat merekrut banyak tenaga kerja. Penyediaan lapangan kerja barulah langkah awal yang seharusnya dikembangkan dengan memperhatikan nilai keterampilan dan kompetisi para pekerja lokal.

Jika terjadi hubungan yang kuat antara pemerintah, pengusaha dan pekerja maka akan dapat membangun kesesuaian antara dunia kerja dan dunia pendidikan di negara kita. Dialog sosial dan perundingan bersama perlu senantiasa dilakukan sebagai dasar pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dalam hal ini, pemerintah juga mesti memantau produktivitas yang dihasilkan agar dapat didistribusikan secara adil dan merata.

Penggunaan TKA sebagai tenaga profesional sebaiknya dijadikan tolak ukur bahwa kita perlu banyak belajar dari negara-negara yang memiliki peringkat

daya saing di atas kita. Apakah itu dengan pembangunan berbagai sarana pendidikan politeknik di kawasan industri atau mendatangkan tim ahli khusus ke Indonesia untuk memberikan pengajaran/pelatihan dalam penciptaan dan penggunaan teknologi baru. Diharapkan kita mampu menciptakan hal-hal baru secara adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif dalam setiap lapangan kerja.

Berbagai pembangunan infrastuktur berupajalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya memang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing. Akan tetapi jika tidak diiringi pembangunan SDM akan tetap sulit untuk mencapai nilai produktivitas yang diharapkan.

Untuk itu, Indonesia masih perlu meningkatkan investasi pendidikan dan keterampilan dalam menciptakan SDM unggul di berbagai sektor. Pemerintah tentunya memerlukan dukungan masyarakat untuk membentuk SDM yang berkualitas bukan hanya dari pendidikan tetapi juga dari karakter yang dimulai dari pribadi, orangtua atau keluarga. Khususnya di masa pandemi ini, kita sebaiknya tidak menggunakan kata 'sulit' dalam hal apapun melainkan wajib berinisiatif untuk 'bisa' maju dalam belajar dan bekerja dengan menerapkan kemandirian, kedisiplinan, dan tetap menjaga kesehatan. Berbagai dilema yang terjadi haruslah dijadikan tantangan untuk menciptakan ide-ide kreatif anak bangsa sehingga dapat meningkatkan kualitas angkatan kerja kita.

Ekonomi Riau: Upaya Bertahan Menghadapi Ancaman Resesi

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 1 JULI 2020



April 2020, Internasional Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh 1,5 persen. Tetapi beberapa hari yang lalu prediksi ini diralatnya dengan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi RI pada 2020 sebesar -0,3 persen dan akan rebound di 2021 menjadi 6,1 persen (cnbcindonesia.com). Prediksi ekonomi ini merupakan peringatan bagi Indonesia akan kemungkinan terjadinya resesi. Ekonomi Indonesia yang terpuruk pada triwulan I 2020 tercermin pada kondisi ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan I 2020 (2,24 persen) yang tumbuh tetapi melambat boleh dibilang masih agak lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya yang sangat menggantungkan ekonominya pada sektor pariwisata.

Untuk mengatasi keterpurukan ekonomi, pemerintah melakukan intervensi berupa kebijakan “New Normal” yaitu pola atau gaya hidup baru dengan cara menjalani hidup kembali seperti sebelumnya dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan. Riau mulai memberlakukan kebijakan ini pada awal Juni setelah PSBB Tahap 4 berakhir (4 Juni 2020), dengan harapan ekonomi dapat kembali berjalan dan normal walaupun harus perlahan-lahan.

Kondisi Ekonomi Riau Saat ini

Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan perilaku individu dan juga masyarakat Riau. Dari hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara online, diketahui responden lebih mengurangi aktivitas di luar rumah seperti berkumpul, jalan-jalan, belanja, menghindari keramaian. Sebaliknya, aktivitas di rumah menjadi lebih sering dilakukan seperti memasak, bersih-bersih rumah, mencuci, menonton, belajar di rumah dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi Riau salah satunya sektor transportasi. PSBB menyebabkan sektor transportasi baik darat, laut maupun udara menjadi lumpuh. Ditambah dengan penutupan Bandara Sultan Syarif Qasim II menyebabkan tidak adanya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di bulan April (nol persen).

Penurunan wisman sejalan dengan berkurangnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Penurunan TPK terjadi sejak kasus perdana Covid-19 Riau diumumkan, dengan nilai TPK bulan Maret yang sebesar 26,71 persen menjadi 14,73 persen di bulan April. Begitu juga dengan usaha restoran dan rumah makan sebagai sektor pendukung, banyak yang tutup dan tidak beroperasi selama pemberlakuan PSBB.

Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) kita dapat melihat tingkat kemampuan/daya beli petani pedesaan di Riau, terlihat bahwa pada NTP Mei 2020 (111,74) turun sebesar -3,38 persen dibanding NTP April 2020 (115,64). Penurunan NTP disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar -3,08 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,30 persen. Hal ini mencerminkan peningkatan pengeluaran petani sedangkan pendapatan berkurang. Meski demikian, tingkat kemampuan/daya beli petani Riau masih lebih baik karena berada di atas 100.

Ekspor Riau pada bulan April 2020 mencapai US\$ 921.01 miliar atau mengalami penurunan sebesar 12,50 persen dibanding ekspor bulan Maret 2020, tetapi kembali mengalami kenaikan 3,62 persen pada bulan Mei yaitu mencapai US\$ 954.3 miliar. Peningkatan ekspor Riau terjadi karena negara-negara pengimpor CPO sudah mulai membaik dan berhasil menghadapi pandemi, China salah satu contohnya.

Data-data tersebut (jumlah wisman, TPK, NTP, dan ekspor) diambil dari Berita Resmi Resmi Statistik yang dikeluarkan BPS setiap bulan.

Kelapa Sawit dan CPO Kunci Bertahan

Hampir 75 persen struktur perekonomian Riau didominasi oleh tiga sektor utama yaitu pertanian; industri pengolahan; dan pertambangan. Pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan, industri pengolahan didominasi adalah industri Crude palm Oil (CPO), dan pertambangan didominasi oleh pertambangan minyak bumi. Ketiga sektor ini mampu membuat Riau bertahan menghadapi pandemi Covid-19.

Meskipun pertambangan minyak bumi menjadi sektor dominan di Riau, tetapi

produksi terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Ini merupakan pengaruh dari usia sumur-sumur minyak yang ada semakin menua dan ditambah dengan anjloknya harga minyak dunia semakin memperparah pertambangan minyak bumi Riau. Jadi penurunan yang terjadi saat ini bukan disebabkan karena pandemi.

Untuk sub sektor perkebunan dan industri pengolahan, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit merupakan hasil dari perkebunan kelapa sawit dan menjadi bahan baku utama untuk industri pengolahan CPO. Hasilnya sebagian besar akan diekspor.

Sifat kelapa sawit yang harus segera dipanen dan diolah menjadikan sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan CPO terus memproduksi dan beroperasi. Karena alasan itulah kedua sektor ini mampu bertahan dan tidak tergoyahkan oleh pandemi Covid-19. Besaran permintaan negara pengimpor dan harga CPO dunialah yang dapat mempengaruhi dan sedikit mengganggu besaran ekspor CPO Riau.

Persentase ekspor non migas Riau sebesar 97,33 persen dan 60,93 persen diantaranya adalah untuk golongan lemak & minyak hewan/nabati (CPO termasuk dalam golongan ini). Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya pengaruh perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan CPO terhadap perekonomian Riau secara umum.

Upaya Untuk Bangkit

Walaupun perkebunan dan industri pengolahan menjadi sektor andalan di Riau, tetapi kita tidak boleh lupa dengan keberadaan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil (UMK). Jumlah usaha ini mencapai 509 ribu atau 98,26 persen dari total usaha non pertanian di Riau. Usaha ini juga mampu

menyerap tenaga kerja lebih dari 1,24 juta orang atau sekitar 67,68 persen dari total tenaga kerja di luar sektor pertanian di Riau (Potensi UMK Provinsi Riau, 2018).

Ketangguhan UMK terbukti ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998. UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Ini disebabkan karena pengelolaan usaha dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi.

Kondisi ini menjadi berbeda di saat pandemi, UMK merupakan usaha yang paling terdampak Covid-19. Aturan Social Distancing dan PSBB membuat usaha ini banyak yang mati secara serentak karena tidak adanya permintaan dan menyebabkan produksi menjadi benar-benar terhenti. Pemerintah daerah harus berupaya untuk menghidupkan kembali UMK. Selain karena mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian, UMK juga dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian pinjaman kredit usaha tanpa persyaratan yang rumit dan upaya untuk memasarkan hasil produk secara online sehingga jangkauan penjualan menjadi lebih luas.

Mengembangkan potensi yang dimiliki Riau juga merupakan salah satu upaya untuk bangkit saat ini. Luasnya lahan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tanaman ubi kayu/singkong. Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan akan meningkatkan produksi ubi kayu sebagai pangan lokal alternatif selama pandemi Covid-19. Pengembangan itu menjadi bagian dari program jangka panjang diversifikasi pangan pokok selain beras (republikasi.co.id).

Selain itu, singkong sebagai bahan baku tapioca digunakan untuk pemutih kertas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan pulp and paper (GoRiau.com). PT Indofood Sukses Makmur (Tbk) pun melakukan import singkong yang dikeringkan (gapplek) setiap tahunnya dari Vietnam. Dalam jumlah mencapai antara 700.000 sampai 1.000.000 ton pertahun (riaupotenza.com), Sungguh potensi luar biasa yang harus ditangkap dan dikembangkan oleh pemerintah daerah Riau di saat pandemi ini.

Dana desa juga dapat digunakan untuk bangkit di saat pandemi. Melalui program padat karya dengan menggunakan anggaran dana desa dapat menyerap tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat desa. Selain dapat membangun desa, program tersebut juga dapat memberikan pendapatan untuk masyarakat di desa.

Semua upaya di atas dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat mendorong daya beli serta konsumsi rumah tangga. Hasil akhir yang diharapkan adalah roda perekonomian Riau berputar dan dapat bertahan menghadapi ancaman resesi. Upaya lainnya yang tidak kalah penting dan harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengembalikan Riau kembali menjadi zona hijau Covid-19 untuk selamanya.

Bebaskan Indonesia dari Narkoba

Oleh : Nelayesiana Bachtiar

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 3 JULI 2020



Bebaskan Indonesia dari Narkoba

Hidup 100 persen di Era New Normal Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba” kutipan tema hari anti narkoba sedunia 2020, yang diperingati setiap tanggal 26 Juni yang lalu. Tema ini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah narkoba di dunia dan membina kerja sama internasional yang lebih besar untuk melawan dampaknya terhadap kesehatan, tata kelola dan kemananan. Persoalan penyalahgunaan narkoba yang kerap terjadi, menjadi sorotan bagi masyarakat hingga saat ini, seakan tak ada habisnya, hampir setiap saat ada saja kasus baru maupun kasus berulang yang terungkap, termasuk di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, sebagai badan khusus menangani narkoba yang beredar di Indonesia serta sekaligus berupaya mencegah dan memberantas narkoba, menyatakan bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan perhatian khusus dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa.

Kepedulian akan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dari tokoh nasional, melainkan menjadi persoalan penting di mata dunia, yang membuat resah dan khawatir akan masa depan generasi mendatang. Pada tahun 1988 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggagas penetapan Hari Anti Narkoba

Internasional (HANI) setiap tanggal 26 Juni, terkait momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu, pejabat yang terkenal dengan penjuangan menentang perdagangan opium di Tiongkok. Penetapan ini merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, selain itu juga sebagai bentuk pergerakan perlawanan terhadap bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang yang berdampak buruk terhadap kesehatan terlebih dapat menyebabkan kematian, perkembangan sosial ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga turut serta dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba, walaupun masih banyak juga kasus yang perlu ditindaklanjuti.

Ancaman Narkoba di Indonesia

Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan yang akan berkembang menjadi lebih kompleks bila tidak segera ditindaklanjuti. Membutuhkan usaha yang terintegrasi baik secara nasional maupun internasional untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Saat ini, Indonesia berada pada situasi “Darurat Narkoba”. Membebaskan Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan pencapaian yang

ingin diwujudkan. Tingkat kesadaran masyarakat akan anti narkoba, setidaknya mengalami peningkatan sejalan dengan hasil penelitian BNN secara periodik setiap tiga tahunnya. Data resmi BNN menunjukkan angka prevalensi terhadap narkoba mulai tahun 2011 hingga tahun 2019, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Tren prevalensi narkoba yang cenderung menurun merupakan keberhasilan bersama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2019 adalah sebesar 1,80 persen atau setara dengan 3,49 juta jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding angka prevalensi pada 2011 sebesar 2,23 persen, setara dengan 4,53 juta jiwa. Turunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba ini menunjukkan sudah banyak penduduk yang berhasil diselamatkan dari jeratan narkoba, bahkan hampir mencapai sekitar 1 juta jiwa. Namun begitu, bila ditelisik lebih rinci, angka prevalensi pada 2019 sebenarnya ada sedikit kenaikan bila dibanding pada 2017, terjadi kenaikan 0,03 persen yakni dari besaran 1,77 persen menjadi 1,80 persen. Dengan demikian upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba tetap terus selalu ditingkatkan, tidak boleh lengah dalam pengawasan yang ketat. Terlebih lagi tingkat penyalahgunaan narkoba telah menyasar pada generasi-generasi muda. Peralpnya, lebih mencengangkan, menurut BNN pada 2019 kalangan remaja Indonesia yakni generasi muda nan milenial yang justru banyak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, terdapat sebesar 24 hingga 28 persen remaja dan anak-anak yang mengonsumsi narkoba, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya pada besaran 20 persen. Sejauh ini, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja,

dengan jumlah pemakai mencapai hingga 63 persen. Ancaman kerusakan kesehatan fisik maupun mental bahkan dapat berujung kematian tak dapat lagi dihindari, bila pengguna narkoba telah berada pada fase kecanduan. Setidaknya 30 hingga 40 jiwa setiap harinya menjadi korban meninggal dunia karena narkoba. Tentunya persoalan ini menjadi bentuk keprihatinan bangsa, semakin mengkhawatirkan mengingat bahwa kalangan anak dan remaja adalah generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa, terlebih juga generasi muda merupakan bonus demografi yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju. Generasi muda yang telah terpapar narkoba lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, karena memiliki waktu yang lebih panjang dalam mengonsumsi narkoba. Sejalan dengan itu berdasarkan UNODC pada 2019 tercatat setidaknya terdapat 271 juta jiwa di seluruh dunia atau sekitar 5,5 persen dari jumlah populasi penduduk dunia pada rentang umur produktif (15 – 64 tahun) telah mengonsumsi narkoba.

Pengguna narkoba pun bahkan seperti tidak pandang profesi maupun pendidikan. Saat ini banyak sekali kalangan selebritas terkenal yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, bahkan ada pula tertangkap berulang kali dengan kasus serupa. Acap kali gaya hidup dan lingkungan sosial dapat memicu seseorang terjerumus menjadi pengguna narkoba. Tak disangka pula, pada tahun 2014 lalu, sosok pendidik seorang guru besar universitas pun tersandung dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tertangkap saat menggunakan shabu. Hal ini menjadi bukti bahwa ancaman narkoba sangat luar biasa bahaya. Narkoba tidak hanya menyasar pada kelompok tertentu di kalangan muda akan tetapi realitanya, kalangan kaum elit yang dilatarbelakangi tingkat pendidikan cukup

tinggi justru menjadi salah satu pengguna barang haram tersebut. Persoalan global ini tentulah membutuhkan solusi yang global pula, merupakan tugas bersama setiap lini elemen bangsa untuk selalu konsisten dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba hingga ke akarnya.

Sinergisitas Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Pembangunan bangsa, dengan berbagai prestasi dan karya dari generasi muda merupakan harapan dari para pemimpin bangsa, namun dengan adanya persoalan jeratan narkoba baik di kalangan generasi muda maupun kalangan usia lanjut, tentunya dapat menjadi hambatan ke depannya. Untuk itu diperlukan kerja sama erat antar elemen bangsa, karena bahaya narkoba menjadi persoalan bersama tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk membumihanguskan narkoba di tanah Indonesia. Sikap tegas dan keras dari presiden sangat diperlukan terkait hukuman bagi penyalahgunaan narkoba. Sejak tahun 2014, masyarakat takjub akan keputusan yang diambil presiden terhadap penolakan pengajuan grasi 64 terpidana mati narkoba, hal ini menjadi bentuk efek jera sekaligus shock therapy baik bagi para bandar pengedar maupun pengguna agar tidak ada lagi yang terlibat dalam candu narkoba. Eksekusi pidana mati terkait narkoba memang telah dilaksanakan di Indonesia, namun masih saja ada kasus baru yang terungkap. Sisi penguatan hukum perlu dijaga kekonsistennya agar semakin kuat dan tajam, karena terkadang hukum yang kurang tegas juga membuat pelaku narkoba tidak jera untuk melakukan aksinya.

Sisi lain, diperlukannya gerakan kesadaran untuk membangun komitmen dan solidaritas dalam rangka mencegah dan

memberantas peredaran jaringan narkoba. Solusi persoalan narkoba harus dilakukan secara bersinergi, diperkuat dengan adanya rencana aksi tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang memerintahkan seluruh unsur pemerintahan melakukan aksi nasional dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Presiden berharap perwujudan pelaksanaan metode pencegahan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, adanya integrasi kongkrit dari BNN, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia (TNI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bergerak bersama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perlu prinsip dan tindakan tegas untuk menutup adanya celah pemasokan serta peredaran narkoba dan diperlukan juga program rehabilitasi untuk memotong rantai candu narkoba. Komitmen bersama dari berbagai lini, untuk terus memberantas narkoba harus selalu digalakkan, agar semangat membara tidak akan kendor walau banyak pengaruh dari lingkungan sosial. Bentuk upaya lain dalam pemberantasan sindikat jaringan narkoba tidak hanya berhenti pada tahap menangkap pelaku dan menyita serta pemusnahan barang bukti, akan tetapi BNN juga memberikan sanksi yang lebih berat lagi melalui upaya pemiskinan bagi para bandar narkoba dengan melakukan penyitaan aset dan harta yang dimilikinya melalui penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Memberantas narkoba memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun apabila dari awal pemerintah dan tiap lapisan masyarakat melakukan

pengawasan ketat dalam tiap rangkaian kegiatan yang terkait penyalahgunaan narkoba, tentunya dapat mengurangi terjadinya kasus terbaru. Poin yang tidak kalah penting adalah menanamkan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup sehat, menjauhi berbagai aktivitas yang mengarah pada penggunaan narkoba, dari hal sederhana seperti aktif dalam kegiatan olahraga kesehatan, tentunya tetap akan mendatangkan manfaat di kemudian hari. Menghindari terjadinya stres dalam diri sendiri dapat juga menjadi salah satu solusi menjauhkan diri dari godaan narkoba. Selanjutnya kita dapat saling mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam dunia haram tersebut.

Pencapaian membebaskan Indonesia dari narkoba memang menjadi cita-cita bersama. Harapannya seluruh pemangku kepentingan untuk mampu bersinergi dan bersatu padu dalam rangka menyatakan “Perang Terhadap Narkoba” serta dapat menggalang seluruh kekuatan bangsa agar tercipta masa depan yang cerah khususnya bagi generasi milenial sebagai penerus kemerdekaan bangsa. Semakin berkurangnya tingkat penyalahgunaan narkoba, tentunya akan memperlancar pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.

Potensi Kota Pekanbaru di Penambahan Usia

Oleh : Nelayesiana Bachtiar

TERBIT DI MEDIA ONLINE BETUAH.COM , 6 JULI 2020



Kilas Balik Kota Pekanbaru

Pada 236 tahun yang lalu, tepatnya 23 Juni 1784 didirikanlah Kota Pekanbaru yang mulanya di tepi sungai Siak. Dahulunya, nama Pekanbaru dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi dusun Payung Sekaki, yang memiliki peranan penting dalam lintas perdagangan. Hingga saat ini Kota Pekanbaru tumbuh pesat. Letak yang strategis sampai saat ini masih membuat posisi Pekanbaru semakin menguntungkan, dengan adanya jalur transportasi yang lancar sekaligus mempunyai peranan penting dalam lintas perdagangan membuat Kota Pekanbaru menjadi kota dagang yang multi-etnik. Hal ini menjadikan Kota Pekanbaru menjadi salah satu pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Gambaran Pekanbaru di Usia 236 Tahun

Kini di usia 236 Tahun, kondisi perekonomian Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sektor perdagangan memang merupakan primadona bagi Kota Pekanbaru. Dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Riau sebanyak 1.149.359 jiwa pada tahun 2019, perekonomian Pekanbaru disokong

dan didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 31,41 persen. Kota Pekanbaru bahkan mampu menyokong perekonomian Riau sebesar 19,57 persen (tanpa migas), menempati urutan teratas. Dilihat dari sisi pembangunan manusia, Pekanbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 81,35 persen. Angka ini menempatkan Pekanbaru pada rangking teratas di Riau. Dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai IPM dengan kategori sangat tinggi.

Perekonomian Pekanbaru mampu tumbuh positif, dengan besar 6,01 persen dan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini mampu menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan Pekanbaru mengalami penurunan yang cukup berarti, walau masih bertengger di kisaran angka 2 persen. Sampai dengan 2019 jumlah penduduk miskin tercatat 28,60 ribu orang atau 2,52 persen, di mana tahun sebelumnya pada 2018, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru sebanyak 31,62 ribu orang atau 2,85 persen.

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan dilihat dari sisi pengangguran pun turut mampu bergerak turun. Hingga Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pekanbaru

tercatat 7,86 persen. Dibanding tahun sebelumnya, tingkat pengangguran 2018 sebesar 8,42 persen. Namun yang cukup mencengangkan, lebih dari separuh jumlah pengangguran ini justru didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta ditambah pula dari lulusan universitas. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja Pekanbaru didominasi oleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah sebesar 55,44 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena pengangguran terdidik, yang dapat menjadi hambatan upaya Pekanbaru untuk bersaing di kancah global pembangunan.

Gambaran kemiskinan dan pengangguran merupakan sebagian kecil persoalan yang akan dihadapi, terkait kesehatan, pendidikan serta sarana dan infrastruktur juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Walau demikian Pekanbaru tentunya terus dapat tumbuh dan melaju dengan pembangunan yang lebih baik ke depannya. Kebijakan pemangku kepentingan tentunya sangat dinanti oleh masyarakat demi tercipta Pekanbaru yang semakin maju. Harapannya para pengambil keputusan dapat mengoptimalkan sumber-sumber potensi unggulan yang telah ada, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan potensi-potensi baru lainnya, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memungkinkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Unggulan Perekonomian Pekanbaru

Selang kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Pekanbaru didominasi 3 (tiga) sektor unggulan. Ketiga sektor ini mampu

berkontribusi sebesar 80,81 persen. Secara berturut adalah, sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 31,41 persen; sektor konstruksi sebesar 30,16 persen serta sektor industri pengolahan sebesar 19,24 persen. Upaya untuk mengoptimalkan nilai tambah pada ketiga sektor unggulan, diharapkan mampu menopang laju perekonomian Pekanbaru ke depannya.

Peranan sektor perdagangan yang dominan mampu menunjang sektor terkait lainnya, termasuk sektor pariwisata yang perlu ditonjolkan. Kota Pekanbaru yang kental dengan adat melayu serta ciri khas arsitektur bangunan melayu merupakan salah satu daya tarik bagi sektor pariwisata. Sarana akomodasi yang memadai serta adanya objek-objek wisata baru yang mulai tumbuh, membuat Pekanbaru semakin dilirik sebagai kota tujuan wisata dan bisnis. Dengan tumbuhnya sektor pariwisata tentunya tidak menutup kemungkinan akan bermunculan serta lahirnya aktivitas terbaru yang tidak kalah bagusnya untuk menggiatkan perekonomian masyarakat. Ide kreatifitas mau tidak mau akan terasah untuk menghadirkan nuansa baru dalam perekonomian, sehingga terciptanya lapangan usaha serta kewirausahaan dari para generasi muda, seperti semakin maraknya usaha-usaha kuliner baru seiring meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tak hanya sampai disitu, sisi seni dan artistik pun turut terpancing untuk tumbuh, ditandai dengan berjamurnya usaha jasa design, videografi serta fotografi.

Hal ini menandakan perlunya integrasi serta sinergi dari berbagai lini lapisan perekonomian untuk dapat menciptakan Pekanbaru yang semakin kondusif dan sejahtera. Upaya optimalisasi serta dukungan dan kerja sama yang erat antar sektor perekonomian diharapkan

menjadi perwujudan visi Kota Pekanbaru, yakni “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Selamat Hari Jadi Kota Pekanbaru.

<https://riau.bps.go.id>

Riau: Kaya tapi Timpang

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TERBIT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID , 10 JULI 2020



Riau dikenal sebagai provinsi kaya di Indonesia. Memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah menjadi modal utama bagi perekonomian Riau. Meskipun demikian, tetap saja masih terdapat jurang atau kesenjangan antar wilayah yang cukup lebar di Provinsi ini.

Eksistensi Riau di tingkat nasional dibuktikan dengan masuknya Riau dalam kelompok enam besar provinsi sebagai penyumbang Poduk Domestik Regional Bruto di Indonesia dengan nilai share sebesar 4,76 persen. Struktur perekonomian Riau dibentuk oleh tiga sektor “seksi” yaitu pertambangan minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan industri Crude Palm Oil (CPO).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Gubernur Riau , Syamsuar “ Provinsi Riau masuk dalam daftar daerah terkaya di Indonesia. Potensi sektor migas dan industri kelapa sawit di Riau berkontribusi besar membuat Riau menjadi daerah yang kaya” (cnbcindonesia.com, 2019).

Kekayaan Riau

Kekayaan Riau bersumber dari Minyak Bumi, dimana di Provinsi ini memiliki Blok Rokan sebagai ladang minyak terbesar di Indonesia yang mampu memproduksi 251 ribu barel per hari di tahun 2016. Kemampuan ini terus menurun seiring

dengan semakin tuanya usia sumur-sumur minyak yang ada. Hingga pada tahun 2019 kemampuan produksi Blok Rokan hanya sebesar 180 ribu barel perhari. Nilai produksi ini berada di bawah Blok Cepu yang mampu menghasilkan 212 ribu barel perhari (gatra.com). Dengan demikian predikat sebagai blok penghasil minyak terbesar bergeser menjadi posisi nomor dua.

Meskipun masih menjadi andalan pendapatan namun kemilau minyak bumi di Provinsi Riau mulai memudar. Hal ini ditandai dengan penurunan produksi minyak ditambah dengan merosotnya harga minyak dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terus menurun dan stagnan. Serta tidak pernah mencapai angka 3 persen per tahun selama beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, kontribusi sektor ini terhadap total perekonomian Provinsi Riau tetap tinggi sebesar 21,16 persen.

Sumber kekayaan Provinsi Riau lainnya adalah kelapa sawit. Di Bumi Lancang Kuning ini memiliki luas wilayah yang besar menjadikan satu keuntungan bagi Riau untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Tahun 2019, luas areal perkebunan kelapa sawit Riau sebesar 5,49 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia. Selain itu luasnya lahan gambut yang dimiliki Riau juga bisa menjadi potensi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, meskipun bertentangan dengan prinsip lingkungan yang harus melindungi

keberadaan lahan gambut.

Luasnya areal perkebunan kelapa sawit secara otomatis akan menghasilkan produksi tandan buah segar (TBS) yang besar pula. Riau menjadi produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu mencapai 9,1 juta ton di tahun 2019. Perkebunan kelapa sawit Riau juga mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Dengan demikian, sah mengatakan bahwa Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan dan primadona bagi perekonomian Riau (Statistik Indonesia, BPS).

Industri CPO, TBS kelapa sawit menjadi bahan baku utama dalam proses pengolahan CPO. Hal ini menyebabkan industri pengolahan CPO juga menjadi sektor unggulan di Riau. CPO juga menjadi sumber devisa bagi Riau karena besarnya nilai ekspor CPO dan produk turunannya. China, India, dan beberapa negara lainnya merupakan negara-negara tujuan ekspor CPO Riau.

Adanya ancaman larangan CPO dari Indonesia masuk ke Uni Eropa dengan alasan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan tidak serta merta mengurangi atau menurunkan produksi dan ekspor CPO ke luar negeri. Pemanfaatan produk turunan CPO untuk biodiesel yang dibutuhkan di dalam negeri membuat industri CPO tetap menjadi andalan bagi perekonomian Riau.

Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang muncul dalam proses pembangunan di Provinsi Riau. Walaupun memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi perbedaan kandungan sumber daya alam serta perbedaan kondisi demografi menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah.

Potensi yang dimiliki antar wilayah

karena perbedaan kondisi geografis dan kandungan SDA terjadi di Bumi Lancang Kuning ini. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten penghasil minyak terbesar di Indonesia dan memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas menyebabkan daerah ini memiliki PDRB tertinggi di Riau. Sebaliknya, untuk kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak memiliki cadangan minyak serta perkebunan kelapa sawit menyebabkan daerah ini memiliki nilai PDRB paling kecil di Provinsi Riau.

Berbeda dengan Kota Pekanbaru, meskipun memiliki luas wilayah yang paling kecil dari semua kabupaten/kota yang ada di Riau tetapi diuntungkan dengan posisi sebagai ibu kota provinsi. Aktivitas perdagangan dan konstruksi menjadi modal penggerak utama perekonomiannya. Hal inilah yang menjadikan perekonomian di Pekanbaru dapat tumbuh. Dibuktikan dengan kontribusi PDRB kota Pekanbaru sebesar 15,48 persen terhadap total PDRB Riau, sehingga menempati posisi kedua setelah kabupaten Bengkalis.

Kita pun dapat melihat ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah dengan menggunakan indeks Williamson. Secara umum, ketimpangan wilayah di Riau masih cukup tinggi tetapi dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2011 indeks Williamson sebesar 0,72 turun menjadi 0,44 di tahun 2019 (riau.bps.gi.id).

Upaya Mengatasi Ketimpangan

Mengacu dengan tulisan sebelumnya yang telah dipublikasikan di The Columnist “Dana Desa: Penggerak Cakra Pembangunan” menceritakan bagaimana konsep membangun dari pinggiran. Strategi membangun dari pinggiran merupakan upaya untuk mengurangi

kesenjangan antar wilayah dan juga bertujuan agar pembangunan bisa secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Konsep ini tidak melihat apakah suatu desa memiliki potensi atau tidak tetapi lebih diarahkan untuk membangun desa itu sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Penggerak konsep membangun dari pinggiran menggunakan dana desa sebagai motor penggeraknya. Ini menjadi upaya pemerintah yang dtuangkan dalam Nawacita ketiga yang berbunyi: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Artinya, strategi pembangunan di era Jokowi mengusung konsep “Membangun Dari Pinggiran”.

Upaya lainnya untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. SDM yang berkualitas dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan pemerataan kualitas pendidikan, Kesehatan dan juga ketenagakerjaan.

Memperbaiki infrastruktur juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan. Dengan melakukan akselerasi program pemerataan pembangunan infrastruktur secara proposional di seluruh wilayah. Membuka akses jalan yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat menghidupkan perekonomian wilayah yang sulit berkembang. Pembangunan jalan tol dan tol laut di semua pulau dilakukan dalam upaya membuka dan mempermudah akses antar wilayah.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah di provinsi yang kaya akan SDA ini, tetapi tidak akan bisa berjalan maksimal apabila tidak ada keselarasan, keseimbangan, keserasian

dan kebulatan serta inklusivitas dalam segala proses kegiatan pembangunan. Mari bersama membangun Riau yang cemerlang.

Mengatasi Sampah: Antara Etika dan Pengelolaan

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 13 JULI 2020



Pretty, clean, and nice. Itulah deskripsi dari seorang influencer Nas Daily tentang Singapura melalui video yang diunggah ke media sosial. Negara kecil ini berbatasan langsung dengan Indonesia, lebih tepatnya berada di seberang Pulau Batam Kepulauan Riau. Gambaran kota bersih ini sangat bertolak belakang dengan kondisi Indonesia yang saat ini dinilai sebagai negara penghasil sampah plastik nomor dua terbanyak di dunia.

Apa yang membuat Singapura menjadi negara yang begitu bersih? Ternyata, karena keterbatasan lahan membuat negara ini tidak mengenal Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Mereka menggunakan sistem pembakaran untuk semua sampah yang dihasilkan dengan menggunakan suhu 1.000 derajat celsius. Panas yang dihasilkan diubah menjadi energi untuk menghidupkan listrik. Asap dan abu hasil pembakaran juga diproses lebih lanjut hingga tidak merusak lingkungan (travel.detik.com).

Sangat berbeda dengan kondisi di Singapura. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan TPA sebagai tempat penampungan sampah, terutama di kota-kota besar. Banyaknya jumlah sampah yang diproduksi setiap hari membuat TPA nampak seperti bukit atau gunung kecil. Tidak hanya mengeluarkan bau dan menyebabkan berbagai penyakit, gunung sampah ini juga bisa menelan

korban jiwa jika terjadi longsor sampah.

Beberapa kota Besar di Indonesia memproduksi sampah yang luar biasa banyak perharinya. Perkiraan sampah yang dihasilkan DKI Jakarta perhari mencapai 7,2 ribu ton di tahun 2018. Produksi sampah kota Surabaya perharinya juga tidak kalah banyak yaitu sebesar 2,2 ribu ton. Yang lebih memprihatinkan, Kota Pekanbaru yang jumlah penduduknya hanya sepertiga dari kota Surabaya tetapi jumlah produksi sampah perhari hampir separuhnya yaitu sebesar 1,1 ribu ton (Statistik Lingkungan Hidup 2019, BPS).

Dilansir dari katadata.co.id, jika dilihat berdasarkan jenisnya, sampah organik merupakan jenis sampah terbanyak yang dihasilkan yakni mencapai 60% dari total sampah. Sampah plastik menempati posisi kedua dengan 14% disusul sampah kertas 9% dan karet 5,5%. Sampah lainnya terdiri atas logam, kain, kaca, dan jenis sampah lainnya.

Sampah yang dihasilkan tidak hanya merusak keindahan (kumuh) dan menimbulkan berbagai penyakit, tetapi juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, jika pengelolaan dan penanggulangan sampah tidak baik maka potensi terjadinya banjir akan jauh lebih besar. Untuk jangka panjang mengakibatkan berkurangnya daya tarik daerah baik untuk wisatawan maupun untuk investor. Yang sering terlupa dan tidak kalah penting, jenis sampah tertentu

dapat merusak makhluk kecil yang tidak terlihat (mikroorganisme) serta unsur abiotik lainnya.

Jika memperhatikan jumlah, jenis, dan dampak dari sampah yang dihasilkan, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua mengapa masyarakat Indonesia tidak menyadari akan hal penting tersebut. Apakah karena kurangnya pengetahuan tentang sampah? Apakah karena lemahnya pengawasan terhadap peraturan pemerintah? Apakah karena buruknya pengelolaan dan penanggulangan sampah? Atau Karena kurangnya etika lingkungan yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat?

Dalam upaya mengatasi masalah sampah, hal penting yang dibutuhkan adalah mengetahui, memahami, serta mengimplementasikan etika lingkungan dan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dibutuhkan penegakan dan pemberian sanksi yang jelas bagi mereka yang melakukan pengrusakan lingkungan.

Etika Lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir bersikap, dan bertindak yang didasari atas nilai-nilai positif untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Dikutip dari Tim MKU PLH, (2016), etika lingkungan hidup memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara kita menghormati, menggunakan dan melestarikan alam. Apabila perilaku manusia terhadap alam baik maka alam akan berlaku baik pula kepada manusia. Terjadinya bencana pada saat-saat ini merupakan ulah dari manusia sendiri yang tidak bisa menjaga alam dengan baik. Oleh karena itu, bersahabat baiklah dengan alam.

Jika seluruh lapisan masyarakat memahami etika lingkungan maka akan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia memiliki

tanggungjawab terhadap keberlangsungan alam, sehingga dituntut untuk dapat melakukan pelestarian lingkungan. Tidak hanya mampu sebatas memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam, tetapi juga mampu menjaga kesinambungan alam itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan apabila memiliki pengetahuan yang cukup tentang lingkungan hidup.

Hal tersebut mengacu kepada konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengusung tiga lingkup yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Aspek ekonomi mengacu kepada kesejahteraan dan peningkatan pendapatan, aspek sosial mengacu kepada keterlibatan masyarakat, dan aspek lingkungan mengacu kepada keberlanjutan fungsi ekologi atau lingkungan.

Selain etika lingkungan yang harus dimiliki, pengelolaan lingkungan hidup yang disarankan dalam bentuk peraturan juga menjadi hal penting lainnya. Sistem pengelolaan yang meliputi pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup secara terpadu. Melalui pengelolaan yang baik diharapkan kelestarian lingkungan terwujud dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana.

Secara pribadi, masyarakat juga dapat melakukan upaya mengurangi dan mengelola sampah, yaitu dengan mengurangi konsumsi, melakukan konsumsi barang dan jasa yang ramah lingkungan, memilah sampah sesuai jenisnya, serta melakukan daur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomis. Untuk jenis sampah organik, dapat dilakukan pengolahan dan pemanfaatan, yaitu untuk pupuk/kompos, makan ternak, atau diolah menjadi biogas dan energi listrik.

Yang terakhir, dalam hal pengelolaan

perlu penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan pengrusakan lingkungan. Seringkali kita melihat masyarakat dengan santainya melakukan pelanggaran hukum lingkungan, seperti membuang sampah di jalan, di sungai, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada upaya penindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Butuh penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera agar masyarakat tidak melakukan dan mengulangi kembali.

Dengan memahami etika dan pengelolaan lingkungan, diharapkan masalah sampah di kota-kota besar khususnya di Indonesia pada umumnya dapat teratasi atau minimal berkurang. Dan predikat Indonesia sebagai negara penghasil sampah plastik nomor dua terbanyak di dunia dapat segera berubah menjadi negara yang bersih dan dapat menyaingi Singapura. Semoga.

<https://riau.bps.go.id>

Prostitusi: Mulai dari Kemiskinan Sampai Tuntutan Gaya Hidup

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TERBIT DI MEDIA ONLINE THECOLUMNIST.ID , 22 JULI 2020



Kasus prostitusi kembali menjadi trending topic, seorang artis wanita muda Indonesia tertangkap tengah berduaan dalam kamar hotel di kota Medan. Ini bukanlah kasus pertama. Jika kita flash back sedikit, kasus yang sama pernah terjadi beberapa kali dan juga menimpa beberapa artis muda Indonesia. Apakah ini akan menjadi hal yang lumrah untuk masyarakat Indonesia?

Kasus tersebut merupakan bagian kecil dari ribuan kasus prostitusi lainnya di Indonesia baik yang terungkap maupun yang tidak terungkap. Di Indonesia bahkan dunia, ada berbagai macam jenis prostitusi, ada yang dilakukan secara langsung dan perorangan, menggunakan induk semang, berada dalam lokalisasi, berselubung panti pijat, dan yang saat ini sedang marak adalah prostitusi online.

Jika kita telisik lebih dalam, ada berbagai alasan atau latar belakang yang menyebabkan mereka terjerumus dalam lembah hitam tersebut. Mari kita bandingkan dua contoh kasus prostitusi yang terjadi. Kasus pertama, prostitusi dilakukan oleh seorang wanita dengan lima orang anak yang hidup secara pas-pasan akibat ditinggal pergi suaminya yang menikah lagi. Ditambah wanita ini tidak memiliki pekerjaan serta keahlian apapun. Singkat cerita, sang wanita akhirnya harus terlibat dalam prostitusi demi menjaga kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya.

Kasus kedua, prostitusi dilakukan oleh seorang gadis remaja yang belum berkeluarga dengan profesi sebagai artis dan hidup secara berkecukupan. Karena gaya hidup yang serba waaah, membuat sang gadis hidup dengan kebiasaan menggunakan barang-barang mewah, berpesta, mengikuti trend fashion terbaru, dan menjadi konsumtif. Karena tuntutan gaya hidup yang demikian, akhirnya membuat sang gadis jatuh ke dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari kasus tersebut terlihat bahwa keduanya sama-sama terjerumus ke dalam lingkaran prostitusi tetapi dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Di antara beberapa alasan/penyebab seseorang terlibat dalam dunia prostitusi adalah: pertama, kemiskinan.

Tidak hanya menjadi penyebab prostitusi, kemiskinan juga menjadi penyebab untuk tindak kejahatan lainnya. Di saat perut lapar dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan pikiran yang pendek bisa membuat perempuan terjerumus ke dalam prostitusi.

Sebab kedua adalah pendidikan yang rendah, yang menyebabkan wanita tidak dapat memiliki pekerjaan yang layak. Minimnya keahlian dan keterampilan membuat seorang wanita menjadi pasrah dan memilih jalur pintas dengan terjerumus dalam prostitusi.

Di tahun 2019, jika kita bandingkan rata-rata lama sekolah perempuan (7,89 tahun) masih di bawah laki-laki (8,81 tahun). Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk (BPS, 2020).

Ketiga, hedonisme. Gaya hidup ini mengarah pada perilaku konsumtif. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, hedonismeos dengan kata dasar hedone. Kata hedone berarti 'kesenangan', sedangkan hedonismeos ialah sebuah cara pandang yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Kesenangan tersebut bisa didapatkan melalui berbagai cara, seperti menikmati hiburan, memiliki harta, kegiatan seksual, dan sebagainya (Alinea.id).

Gaya hidup hedonisme sangat membutuhkan uang yang tidak sedikit, apalagi jika masuk ke dalam kelompok atau pergaulan yang juga terbiasa dengan gaya hidup ini. Di saat kebutuhan hidup bersenang-senang melebihi dari pendapatan yang diterima, maka prostitusi menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan uang yang banyak dan dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Selain kemiskinan, pendidikan, dan gaya hidup hedonisme, masih ada beberapa penyebab lainnya yang juga menjadi alasan seorang wanita masuk ke dalam prostitusi. Faktor internal individu, seperti pernah menjadi korban perkosaan atau karena disakiti oleh kekasihnya. Dengan anggapan dirinya sudah kotor, seseorang bisa masuk ke dalam dunia prostitusi.

Ibarat seorang dokter yang akan mengobati pasiennya, tindakan, penanganan atau obat dapat diberikan

jika penyebab sakit si pasien diketahui dengan jelas. Begitu juga dengan masalah prostitusi, dengan diketahui penyebab seseorang masuk ke dalam dunia prostitusi, dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.

Pertama, pemerintah harus terus berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Wanita yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejahtera akan sangat jauh dari dunia prostitusi. Bagaimana dapat hidup sejahtera? Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan untuk bekerja.

Kedua, pendidikan menjadi modal dasar bagi wanita untuk menghindari dari prostitusi. Wanita berpendidikan tinggi dan memiliki skill atau keterampilan akan dapat diterima di dunia kerja. Meskipun tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, tetapi keahlian dan keterampilan akan menjadi modal untuk bisa bertahan dan menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, berusaha menghindari gaya hidup hedonis yaitu dengan cara menyusun prioritas kebutuhan mana saja yang akan dipenuhi, menerapkan pola hidup sederhana, berhati-hati dalam memilih pergaulan, membiasakan menabung, dan fokus bekerja (popmama.com).

Keempat, penegakan hukum juga harus diterapkan semua pelaku kejahatan prostitusi. Dengan memberikan sanksi yang tepat dapat membuat orang lain berpikir 1000 kali untuk melakukan kejahatan prostitusi. Selain itu rehabilitasi juga sangat dibutuhkan untuk korban prostitusi terutama anak-anak.

Kelima, upaya pembangunan dan pemberdayaan gender diharapkan dapat meningkatkan peran wanita baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam negara. Nilai pembangunan dan pemberdayaan gender cenderung semakin baik, meskipun demikian tetap saja masih ada ketimpangan antara laki-laki dan wanita di Indonesia. Capaian di tahun 2019 sebesar 91,07 naik 1,65 point dari tahun 2010 yang hanya sebesar 89,42. Begitu juga dengan nilai pemberdayaan gender, selama kurun waktu 10 tahun (2010-2018) naik 14,64 point (BPS, 2020)

<https://riau.bps.go.id>

Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Indonesia

Oleh : Lina Agustina Pujiwati SST., M.Ec.Dev

TERBIT DI MEDIA RIAU POS, 22 JULI 2020



Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual (Senin, 15 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya tata kelola pengawasan keuangan untuk mencegah praktik korupsi. Bahkan, Presiden mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindak tegas mereka yang korupsi dana penanganan COVID-19.

“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan. Tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu, digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan”. Demikian disampaikan Presiden Jokowi yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/6/2020).

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan virus Corona (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional. Banyak kalangan berharap, dana yang sedemikian besar tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna meminimalisir dampak pandemi yang kian berat dirasakan rakyat Indonesia.

Makin Meluas

Korupsi di Indonesia sudah semakin mewabah. Hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi dari berbagai media. Jumat, 12 Juni 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan kerugian negara akibat korupsi Eks Dirut PT. Dirgantara Indonesia sekitar Rp 330 miliar. Jumlah tersebut setara dengan bantuan sosial untuk 1,1 juta kepala keluarga (KK) terdampak covid-19.

Korupsi tidak hanya terjadi dikalangan pejabat publik ataupun wakil rakyat, tetapi juga menyebar ke masyarakat bawah. Sejak Mei 2020, KPK melalui aplikasi JAGA Bansos menerima 303 keluhan tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan virus Corona (COVID-19). 44 persen keluhan terkait tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, 11 persen masyarakat mengeluhkan bantuan dana yang kurang dari seharusnya, dan 9 persen mengeluhkan bantuan tidak dibagikan oleh aparat.

Penyebab Korupsi

Ada banyak pendapat yang menjelaskan mengapa korupsi sulit diberantas. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi di Indonesia berasal dari rendahnya integritas para pelaku dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindak korupsi. Masalah integritas dan budaya inilah yang disinyalir

menjadi penyebab pemberantasan korupsi tidak pernah tuntas. Perilaku anti korupsi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia.

Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Indonesia

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia adalah IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi). IPAK diperoleh melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berinteraksi dengan layanan publik. SPAK berusaha menangkap perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism) yang dilakukan masyarakat. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sejumlah pertanyaan dengan menggunakan Explanatory Factor Analysis (EFA)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) telah dihitung secara internasional sejak tahun 1995. Di Indonesia IPAK mulai dihitung tahun 2012. IPAK dibangun dari dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dan pengalaman. Dimensi persepsi dibangun dari sub dimensi keluarga, komunitas, dan publik. Sementara itu, dimensi pengalaman dibangun dari sub dimensi pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

IPAK memiliki rentang nilai 0–5. Jika nilai indeks semakin mendekati 5, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Dalam memaknainya, nilai IPAK bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu

sangat permisif (0-1,25), permisif (1,26-2,50), anti korupsi (2,51-3,75), dan sangat anti korupsi (3,76-5).

Pertama kali dirilis tahun 2012, nilai IPAK Indonesia berada pada angka 3,55. Nilai IPAK cukup fluktuatif, hingga pada tanggal 15 Juni 2020, BPS merilis angka IPAK Indonesia sebesar 3,84. Angka ini naik 0,14 poin dibanding tahun 2019 yang senilai 3,70. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum berperilaku semakin anti korupsi. Meskipun meningkat, nilai IPAK 2020 masih terpaut 0,16 poin dari target RPJMN 2020. Sekedar informasi, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa sasaran nasional yang ingin dicapai tahun 2024 adalah meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,14.

Upaya Pencegahan

Untuk percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan demikian pencegahan korupsi diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih terukur dan berdampak langsung.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, korupsi menjadi salah satu tujuan global, di mana sasaran globalnya adalah mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Pemberantasan korupsi perlu dilakukan dari sumbernya. Untuk itu,

perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bertindak korupsi. Mengambil Teori Segitiga Fraud atau Fraud Triangle Theory, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu dorongan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran (rationalization).

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Contoh dorongan tersebut adalah hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Secara umum, hal yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Dalam banyak kasus, keserakahan juga menjadi dorongan kuat seseorang berbuat korupsi.

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Opportunity biasanya disebabkan oleh internal control organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling mungkin untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol, dan upaya deteksi dini terhadap fraud.

Rasionalisasi merupakan sikap/pikiran pelaku yang mencari pembenaran atas tindakan korupsi. Contohnya adalah pikiran bahwa korupsi dilakukan untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Begitu juga dengan anggapan bahwa masa kerja pelaku cukup lama dan pelaku merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah didapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll.)

Pemberantasan korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pemberantasan korupsi membutuhkan strategi pencegahan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat

ditutup. Selain itu, usaha pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Komitmen nyata dari para pemimpin sangat dibutuhkan. Hasil IPAK 2020 yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berperilaku semakin anti korupsi, menjadi secercah harapan optimisme pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

Penyimpangan Adaptasi Kebiasaan Baru

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TERBIT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID, 8 AGUSTUS 2020



Tidak salah rasanya saat media Sydney Morning Herald (SMH) memberitakan Indonesia berpotensi menjadi episentrum virus corona dunia. Hal ini juga di-amin-kan oleh dosen public health di University of Derby, Dono Widiatmoko yang mengatakan “Menurut saya sudah, bukan cuma bisa, sudah jadi episentrum baru virus corona di dunia” (kompas.com). Mengapa Indonesia bisa menjadi epicentrum corona, apakah kebijakan pemerintah yang salah atau sikap tidak peduli masyarakat yang jadi penyebabnya?

Penambahan kasus baru Covid-19 di Indonesia kian hari kian banyak. Sampai saat ini lebih dari 115 ribu kasus. Angka tersebut sudah melebihi kasus Covid-19 di China tempat virus ini muncul pertama kali. Tidak hanya bertambah dari sisi jumlah tetapi penyebaran virus ini semakin meluas. Ditandai dengan semakin banyaknya kabupaten/kota yang pada awalnya berada pada zona hijau kini berubah menjadi zona merah karena mulai terjangkit virus ini.

Untuk melihat lebih jelas penambahan kasus corona di Indonesia, mari kita pilah menjadi dua kondisi yaitu: pertama, sejak diumumkannya pertama kali kasus Covid-19 di Indonesia (2 Maret 2020) sampai berakhirnya masa social distancing sekitar akhir Mei 2020 jumlah kasus sebanyak 26.473. Kedua, sejak diberlakukannya “New Normal” atau “Adaptasi Kebiasaan baru” sampai tanggal

4 Agustus 2020 jumlah kasus sebanyak 88.583. Terjadi kenaikan tiga kali lipat dengan jangka waktu yang lebih pendek.

“Adaptasi Kebiasaan Baru”

Haruskah kita khawatir, mengingat bahwa jumlah yang disampaikan secara resmi oleh lembaga terkait adalah data yang hanya mencakup orang yang sudah dites dan dinyatakan positif saja? Padahal kenyataannya banyak warga yang belum atau tidak melakukan tes dan berpotensi tinggi membawa serta menyebarkan virus ini di luar rumah.

Kekhawatiran kita cukup beralasan, mengingat aktivitas di luar rumah saat ini sudah mulai kembali normal. Sebenarnya pemerintah sudah cukup tanggap untuk mengantisipasi masalah penyebaran virus corona, yaitu melalui kebijakan “New Normal” atau “Adaptasi Kebiasaan Baru”. Secara konsep, kebijakan atau aturan ini sangat baik. Dengan menimbang dan mengkhawatirkan kondisi perekonomian, pemerintah membolehkan masyarakat untuk beraktivitas kembali di luar rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Protokol kesehatan yang dimaksud yaitu dengan tetap menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menghindari berjabat tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian atau pertemuan, dan membiasakan mencuci

tangan. Harapan pemerintah dengan memberlakukan protokol kesehatan, penyebaran virus corona dapat ditekan, masyarakat dapat beraktivitas, dan roda perekonomian dapat berputar kembali.

Kondisi Menyimpang

Namun apa yang terjadi, ternyata kenyataan tidak sesuai harapan. Saat masyarakat sudah kembali beraktivitas di luar rumah dan roda perekonomian pun sudah mulai berjalan, ternyata jumlah kasus covid-19 justru semakin bertambah di saat kondisi “Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Hal ini tidak mengherankan mengingat masih banyak perilaku masyarakat yang cenderung abai, misalnya dalam hal penggunaan masker. Masker memang menjadi barang wajib yang harus ada saat kondisi sekarang. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membawa dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang lebih konyol lagi, ada yang sudah menggunakan tetapi tidak tepat, seperti dibiarkan tergantung di dada atau justru digunakan untuk menutupi dagu atau leher.

Selain abai dalam menggunakan masker, masih banyak juga masyarakat yang kurang disiplin dalam menghindari keramaian atau pertemuan. Dibuktikan dengan mulai banyak digelarnya pesta/hajatan yang dihadiri banyak orang yang berpotensi terjadi penyebaran virus corona. Ibu-ibu sosialita yang selama beberapa bulan terakhir terkungkung tidak bisa berkumpul, saat ini mulai melepaskan kerinduannya walau hanya sebatas bertemu di kafe atau rumah makan.

Tidak terkecuali perkantoran, saat ini telah menjadi cluster baru penyebaran virus corona. Beberapa kasus baru muncul dan merebak dari perkantoran dimana terdapat pegawai atau pimpinan yang dinyatakan

positif corona. Istana negara pun sempat dibuat heboh setelah mendapat kunjungan dari wakil wali kota Solo, Achmad Purnomo yang ternyata dinyatakan positif corona (cnnindonesia.com).

Sikap abai masyarakat juga terjadi pada perilaku menjaga jarak. Perilaku ini seharusnya diterapkan saat mendatangi keramaian dan pertemuan, berada dalam antrian, mengunjungi rumah makan atau pusat perbelanjaan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dengan mendatangi keramaian saja resiko penyebaran sudah cukup tinggi, apalagi jika perilaku menjaga jaga tidak diterapkan, maka resiko penyebaran menjadi semakin besar. Terbukti dengan munculnya cluster baru di mal. Masih banyak lagi penyimpangan perilaku lainnya yang dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan terjadinya penambahan kasus Covid-19.

Sikap Apatis Masyarakat

Penyimpangan perilaku yang dilakukan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan lebih disebabkan karena sikap tidak peduli atau “apatitis”. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang penerapan protokol kesehatan di luar rumah. Hal inilah yang menyebabkan terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang cukup pesat baik untuk orang yang paham maupun yang tidak paham tentang protokol kesehatan.

Sikap apatis menurut Luis Rey merupakan kondisi dimana kejiwaan seseorang atau individu ditandai dengan ketidaktertarikan, ketidakpedulian, atau ketidakpekaan terhadap kehidupan sosial, emosional, atau fisik. Jika seseorang memiliki sikap ini maka dampak negatif akan muncul seperti tidak peduli, meningkatkan potensi individualisme,

dan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar yaitu perpecahan (maxmanroe.com).

Menghadapi sikap apatis masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan saat “Adaptasi Kebiasaan baru” tidaklah mudah. Penegakan dalam pemberian sanksi atau hukuman saat terjadi pelanggaran sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang bersikap apatis. Penerapan protokol kesehatan oleh pemilik usaha yang memaksa pengunjung untuk mentaati protokol kesehatan juga dapat membantu menekan penyebaran virus corona.

Selain itu, peran semua pihak seperti pimpinan/kepala, guru, pemuka agama atau masyarakat serta pemerintah untuk saling mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan sangat dibutuhkan. Jika ini berhasil kita lakukan maka penyebaran virus corona dapat kita tekan dan Indonesia dapat segera terbebas dari Covid-19. Semoga.

<https://riau.bps.go.id>



75 Tahun dan Potret Lingkungan Indonesia

Oleh : Fitri Hariyanti SST, M.M.

TERBIT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID, 19 AGUSTUS 2020



Tepat 75 tahun Indonesia merdeka. Begitu banyak permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia yang belum dapat diselesaikan. Mulai dari bagaimana mengembalikan kondisi perekonomian; bagaimana meningkatkan neraca perdagangan di tengah ketidakpastian kondisi global; bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran; dan masalah lainnya terkait kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Selain itu, masih ada masalah penting lainnya yang sangat berarti dan menjadi daya dukung bagi kehidupan yaitu “Masalah Lingkungan”.

Masalah lingkungan yang tengah dihadapi Indonesia tercermin dari nilai “Environmental Performance Index “ (EPI) atau Indeks Kinerja Lingkungan tahun 2020. Nilai EPI yang dihasilkan oleh Yale Center for Environmental Law & Policy memperlihatkan seberapa besar keseriusan dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Dilansir dari epi.yale.edu, Indonesia berada pada peringkat 116 dari 180 negara di dunia. Posisi ini jauh di bawah dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapura yang masing-masing berada pada peringkat 68 dan 39. Mengapa peringkat Indonesia jauh di bawah dan seperti apakah kondisi lingkungan di Indonesia hingga penilaian kinerja lingkungan sangat jauh tertinggal? Terdapat beberapa hal yang dapat

mencerminkan kondisi tersebut (data publish Badan Pusat Statistik).

Hal pertama yang dapat kita lihat adalah masalah yang ditimbulkan karena pemanfaatan sumber daya alam. Istilah “Gemah Ripah Loh Jinawi” yang memiliki arti tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya, menggambarkan betapa kayanya negeri Indonesia dengan limpahan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.

Salah satunya bahan tambang, melimpahnya bahan tambang dan bahan galian menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi Indonesia. Di beberapa provinsi, lahan bekas tambang yang tidak dilakukan reklamasi menyebabkan masalah baik sosial maupun lingkungan. Contoh di Kalimantan Timur, lahan bekas tambang batu bara dibiarkan terbuka dan membahayakan bagi masyarakat sekitar bahkan sampai menelan korban jiwa (regional.kompas.com).

Permasalahan juga terjadi pada hutan Indonesia. Selama kurun waktu 8 tahun (2011-2018), telah terjadi penurunan luas hutan dari 98,7 juta ha menjadi 93,52 juta ha yang disebabkan karena adanya kerusakan hutan. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, paling luas adalah Papua diikuti oleh Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Jawa, dan Bali serta NTT. Bukan tidak mungkin hutan yang semula menjadi Mega Biodiversity dan paru-paru dunia lambat laun akan terus

berkurang akibat perubahan fungsi dan peruntukannya.

Salah satu bentuk kerusakan hutan adalah kegiatan deforestasi yang dilakukan karena desakan konversi lahan untuk pemukiman, infrastruktur, pertanian, pertambangan, perkebunan, dan pemanenan hasil kayu untuk industri. Salah satu kegiatan deforestasi adalah pembakaran lahan dan penebangan kayu liar di kawasan hutan. Deforestasi kawasan hutan yang terjadi di Indonesia di tahun 2017-2018 adalah sebesar 195,73 ribu ha (KLHK).

Residu berbahaya yang dihasilkan dari hasil akhir dari proses produksi, konsumsi atau akumulasi keduanya pun menjadi masalah yang tidak kalah beratnya. Residu berbahaya yang langsung dilepaskan ke lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan contohnya: emisi ke udara, gas rumah kaca (GRK), limbah cair, sampah, dan penghasil zat kimia. Selama kurun waktu 2000-2015, Emisi GRK yang dihasilkan meningkat sebesar 1.440 juta CO₂e.

Efek dari peningkatan GRK secara global dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi dan pemanasan global yang berujung kepada bencana dan perubahan iklim atau "Climate Change". Selama kurun waktu 1961-1990, Indonesia mengalami peningkatan suhu rata-rata 0,5 derajat celcius dan diproyeksikan antara tahun 2020 – 2050, rata-rata suhu di Indonesia akan meningkat 0,8 – 1,0 derajat celcius. Pada kurun waktu 2017-2018 terjadi peningkatan suhu maksimal sebesar 1,2 derajat celcius di DKI Jakarta dan maksimal sebesar 3,6 derajat celcius di Kalimantan Timur. Begitu juga di beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Dari semua masalah lingkungan yang dihadapi, sangat dibutuhkan keseriusan dan kerjasama semua pihak untuk

mengatasi masalah lingkungan. Tidak hanya pemerintah sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab tetapi juga harus didukung oleh perusahaan, masyarakat, dan individu sebagai manusia yang memiliki moral.

Pemerintah harus lebih fokus dalam menjalankan perannya. Salah satunya dalam hal pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Setelah lima tahun sejak dicetuskannya SDGs, atau sepertiga dari target di tahun 2030, pemerintah masih berkuat dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan mengumpulkan data-data indikator SDGs. Dibuktikan dengan jumlah provinsi yang telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mendukung pelaksanaan SDGs sebanyak 25 provinsi (Bappenas.go.id).

Belum lagi ditambah dengan masalah data yang bersumber dari mana yang akan digunakan. Begitu juga dengan pencapaian target-target SDGs, boleh dibilang masih terfokus pada capaian sosial dan ekonomi saja. Sementara untuk capaian lingkungan masih jauh tertinggal bahkan data yang digunakan untuk indikator-indikator SDGs dimensi lingkungan masih banyak belum tersedia.

Selain pemerintah, peran perusahaan tidak kalah pentingnya untuk mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. Tanggung jawab perusahaan dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Lembaga Filantropi di bidang lingkungan harus dapat diapresiasi dan dikelola dengan baik. Menurut Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia mengatakan dalam perkembangannya, filantropi dimaknai sebagai upaya untuk berbagi menyalurkan sumber daya dan berderma secara terorganisir untuk kepentingan strategis jangka panjang dan berkelanjutan (kabar24.bisnis.com)

Walaupun demikian, perusahaan tidak boleh lupa dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan akibat dari kegiatan atau proses bisnis yang dilakukan. Jangan sampai pemberian CSR dan keterlibatannya dalam Lembaga Filantropi hanya menjadi kedok untuk menutupi dosa lainnya terhadap lingkungan.

Masyarakat pun berperan penting dalam mengatasi masalah lingkungan. Peran masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk membentuk kelompok-kelompok sadar lingkungan, membentuk kampung bersih dan sehat, melakukan kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga di tingkat RT atau RW, dan berpartisipasi aktif dan masi dalam memperbaiki dan menjaga lingkungan. Akan tetapi, saat ini peran aktif dan kepedulian masyarakat masih sangat sedikit dan rendah. Lebih banyak masyarakat yang bersikap tidak peduli terhadap kondisi lingkungan.

Masalah lingkungan hidup yang terjadi dapat dikatakan sebagai masalah moral karena berhubungan dengan perilaku manusia. Pencemaran dan kerusakan yang terjadi di hutan, laut, air, tanah, atmosfer dan berbagai macam bentuk kerusakan lainnya diakibatkan oleh perilaku manusia yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja (Keraf, 2010).

Sikap egosentrime manusia terhadap lingkungan dapat dilihat dari kebiasaan dalam hidup sehari-hari, contohnya membuang sampah sembarangan padahal mengetahui aturan dan akibat yang ditimbulkan. Yang membuat miris adalah perilaku tersebut juga dilakukan oleh individu yang mengenyam pendidikan tinggi, bukan hanya oleh mereka yang tidak mengerti tentang aturan dan akibatnya.

Dengan melihat banyaknya kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi, menjadi hal yang wajar jika saat ini

Indonesia berada pada peringkat 116 dunia. Ditambah dengan sikap dan perilaku kita yang kurang peduli terhadap lingkungan. Apakah kita bangga dengan posisi ini? Mudah-mudahan bertepatan dengan 75 tahun Indonesia Merdeka, kita semua mau membuka mata dan hati untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita.

Data Berkualitas adalah Emas

Oleh : Lina Agustina Pujiwati SST., M.Ec.Dev

TERBIT DI MEDIA RIAU POS, 5 OKTOBER 2020



Dalam era pandemi Covid-19, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial (bansos). Pemerintahpun telah menggelontorkan dana trilyunan rupiah. Namun kenyataannya, belum semua rakyat yang membutuhkan telah menikmati “kue” bansos karena data belum berkualitas.

Demikian gambaran pendistribusian bantuan sosial yang kita lihat di Indonesia. Masyarakat yang secara kasat mata seharusnya menerima bansos, ada yang belum sama sekali menerima. Sebaliknya, mereka yang seharusnya tidak berhak menerimabantuan justru mendapatkannya, bahkan berkali-kali. Besaran nominal bantuan sosial (bansos) mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan sebulan. Tetapi, dalam masa pandemi seperti sekarang, sekecil apapun bantuan yang diterima masyarakat terdampak Covid-19 akan menjadi sangat bernilai. Betapa sayangnya bantuan yang sangat berarti itu tidak bisa dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Ekonomi Turun, Kemiskinan Naik

Untuk mengurangi penularan virus Covid-19, pemerintah membatasi aktivitas fisik seluruh penduduk Indonesia. Kebijakan ini memberi dampak multisektor yang kian hari makin berat dirasakan masyarakat. Rumah tangga mengalami tekanan dari sisi pendapatan. Gelombang pemutusan

hubungan kerja terjadi dimana-mana dan jumlah penduduk miskin semakin banyak. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, penduduk yang dikatakan miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp. 454.652 (Maret 2020). Jika jumlah penduduk miskin naik, hal ini juga berarti bahwa banyak penduduk dengan status hampir miskin jatuh menjadi miskin.

Pada Juli 2020, BPS merilis jumlah penduduk miskin Indonesia kondisi Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa (9,78 persen). Angka tersebut naik 1,63 juta orang atau 0,56 persen dibanding September 2019.

Jika ditelisik lebih lanjut, peningkatan penduduk miskin di perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin 12,82 persen, naik 0,82 poin dibanding September 2020, sedang di perdesaan jumlah penduduk miskin hanya naik sebesar 0,22 poin.

Kondisi ini terlihat semakin miris, karena kenaikan jumlah penduduk miskin juga dibarengi dengan makin lebarnya jurang kesenjangan ekonomi. Hal ini terlihat dari koefisien gini ratio yang naik 0,001 menjadi 0,381.

Gini Ratio merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan antara

kelompok penduduk lapisan bawah dengan lapisan atas.

Senada dengan BPS, Bank Dunia memprediksi bahwa di Indonesia akan terjadi penambahan 71-100 juta orang miskin pada 2020 dan angka kemiskinan ekstrem (extreme poverty rate) naik dari 8,23 persen pada 2019 menjadi 8,82 persen pada 2020. Hal ini merupakan peningkatan kemiskinan global terburuk setelah krisis finansial global pada 2008.

Lembaga SMERU Research Institute dalam publikasi terbarunya berjudul "The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia" juga memprediksi bahwa akan terjadi penambahan 8,5 juta penduduk miskin akibat dari pandemi covid-19. Angka ini adalah proyeksi terburuk jika wabah tidak bisa dikendalikan dalam jangka pendek.

Bantuan Sosial

Untuk menanggulangi efek multidimensi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam instrumen vital, diantaranya adalah bantuan sosial (bansos). Bansos merupakan bagian dari jaring pengaman sosial yang disiapkan negara. Harapannya, masyarakat bisa bertahan hidup terutama mereka yang terkena dampak terparah dari krisis ini.

Tercatat, ada tujuh macam bansos yang telah diprogramkan untuk membantu warga dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kementerian Sosial menyediakan empat macam, yaitu dua bansos reguler (Program Keluarga Harapan Rp 8,3 triliun dan kartu sembako bantuan pangan nontunai Rp 15,2 triliun) serta dua nonreguler (bansos sembako Rp 3,4 triliun dan bansos tunai Rp 16,2 triliun). Bantuan kelima adalah bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dari Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp 21,57 triliun. Keenam, bansos yang disediakan pemerintah provinsi. Ketujuh, bansos yang disediakan pemerintah kabupaten/kota.

Total anggarannya tentu tak sedikit. Lima bansos pertama mencapai Rp 64,67 triliun. Apabila didistribusikan tepat sasaran, bisa menjangkau 52,8 juta keluarga atau hampir 69 persen dari total keluarga nasional yang berkisar 75,7 juta. Hal ini belum termasuk bansos dari provinsi, kabupaten/kota yang jumlahnya juga sangat besar.

Miskin Data Kemiskinan

Setelah pemerintah menetapkan status bencana nasional non-alam dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ternyata realisasi penyaluran bantuan sosial masih minim. Beberapa persoalan pun terjadi di lapangan. Salah satunya tidak akuratnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai database pendistribusian bansos. Banyak daerah yang belum meng-update data 2016 yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Ini merupakan persoalan klasik yang terjadi berulang kali dalam penanganan kemiskinan di Tanah Air. Data kemiskinan tak pernah valid. Padahal, sudah banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam akuisisi data kemiskinan, tetapi tetap saja tak kunjung berhasil membangun sistem basis data kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebenarnya setiap tahun merilis angka kemiskinan. Namun, data tersebut hanya data makro dalam bentuk agregat, yang level terendahnya adalah kabupaten/kota. Basis data kemiskinan BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang pengukurannya menggunakan

pendekatan kebutuhan dasar (basic need).

Selain itu, BPS juga melakukan pendataan penduduk miskin untuk penargetan bantuan langsung tunai (BLT) pada 2005 (Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk), yang dimutakhirkan pada 2008 melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial.

Berbeda dengan Susenas, pendataan ini dilakukan secara mikro pada level rumah tangga. Selain BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga melakukan pendataan penduduk miskin dengan pendekatan dan indikator berbeda dengan BPS.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Salah satu tujuannya adalah melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Sampai saat ini, TNP2K masih ada dan berada di bawah koordinasi Wakil Presiden. Beberapa pemerintah daerah juga melakukan pendataan penduduk miskin, seperti yang dilakukan DKI Jakarta.

Data Berkualitas adalah Emas

Selama ini, kita masih tertatih-tatih merapikan data kependudukan terutama data mikro penduduk miskin dengan sistem kerja tradisional. Padahal, dalam era industri 4.0 sekarang ini negara-negara di dunia kian gencar mengembangkan big data, baik dari sisi prosens bisnis, volume, maupun variasi.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan. Tanpa data berkualitas, Indonesia tak akan mampu membuat kebijakan yang mumpuni dan mengimplementasikannya secara cepat dan tepat, karena data berkualitas sesungguhnya adalah emas.

Profesionalitas Ibu Menjadi Perempuan Bekerja

Oleh : Arni Juwita Novisda

TERBIT DI MEDIA ONLINE THE COLUMNIST.ID, 19 DESEMBER 2020



Berperan menjadi ibu rumah tangga dan perempuan bekerja harus seimbang. Adanya tingkat prioritas sebagai tolak ukur kesuksesan dalam hal manajemen waktu itu penting. Ibu yang menjadi perempuan bekerja akan berusaha fokus dalam memaksimalkan waktu selama di tempat kerja untuk menyelesaikan pekerjaan agar nanti setelah pekerjaannya selesai bisa memanfaatkan waktunya dengan keluarga tercinta.

Mengawali dengan rasa syukur bahwa perjalanan setiap hari merupakan momen yang berharga dan suatu hal yang tidak mudah bagi ibu yang bekerja. Sebelum berangkat kerja, Ibu akan menyiapkan kebutuhan anak-anak dan suami baik dari mulai memasak untuk sarapan pagi dan mengerjakan aktivitas pekerjaan rumah tangga lainnya mulai dari mencuci piring, membersihkan rumah, menemani anak bermain dan belajar yang harus dikerjakan dengan ikhlas.

Problema dan Tantangan Ibu Rumah Tangga dalam Bekerja

Perempuan harus menyadari bahwa dirinya sebagai ibu rumah tangga yang menjadi perempuan bekerja, membuat setiap ibu bekerja harus memiliki profesionalitas yang tangguh. Tugas pekerjaan rumah tangga harus diselesaikan begitu juga tugas di tempat bekerja. Pikiran

harus dijaga agar bisa memprioritaskan tugas mana yang harus didahulukan. Hati dan raga senantiasa dirawat supaya tetap merasa bahagia serta sehat.

Di masa pandemi penyakit virus corona (Covid-19) ini, kondisi yang membuat suasana hati ibu bekerja maupun ibu rumah tangga serta yang merangkap sebagai ibu rumah tangga dan perempuan bekerja menjadi khawatir. Khawatir dengan kondisi orang tua, anak-anak, suami, sahabat akan terpapar dengan virus apapun itu termasuk yang sedang melanda negeri ini dengan pandemi Covid-19 yang masih belum kunjung hilang. Ibu yang bekerja akan selalu menyediakan vitamin, obat-obatan, makanan dan minuman bergizi lainnya untuk keluarga yang dicintai.

Ketika kondisi sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga kampus di tutup dan menjalankan proses belajar mengajar melalui kelas online. Di sinilah peran ibu yang bekerja diuji, saat anak-anak perlu dibimbing belajar di sekolah. Namun saat masih pandemi covid-19 menjadikan anak-anak dituntut belajar di rumah di dampingi orang tua.

Belajar dengan kelas online maupun belajar didampingi dengan orang tua, perlu peranan ibu, ibu diminta untuk paham dan mengerti dengan ilmu pendidikan dan sekolah anak-anak. Ibu harus bisa menjadi pendidik yang menyenangkan untuk anak-anaknya. Baik Ibu maupun ayah juga saling bekerjasama untuk mendampingi

anak-anak belajar saat kelas online berlangsung bersama dengan gurunya. Apalagi pembelajaran melalui kelas online tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada labtop atau handphone serta paket data untuk mengakses internet untuk bergabung di kelas online, orang tua harus memantau dan membantu anak saat mendapat penugasan dari guru. Agar tugas - tugas yang diberikan guru saat kelas online terselesaikan.

Diharapkan tugas - tugas sekolah anak bisa mendapatkan nilai dan hasil yang bagus. Selain itu, anak-anak bisa memahami pelajaran sekolah secara baik. Tidak terlepas dari ibu dan ayah yang berusaha mengajarkan anak-anak untuk belajar dengan baik mulai dari belajar membaca, berhitung, menulis, dan mengaji bahkan dengan memberikan permainan yang bernuansa edukasi.

Pemberlakuan sistem Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi ibu yang bekerja memiliki dampak yang berbeda- beda bagi setiap ibu. Bagi ibu yang diberikan oleh atasan pemberlakuan sistem WFH, ibu yakin dengan memindahkan pekerjaan di kantor bisa fokus mengerjakan pekerjaan di rumah. Alasannya dengan sistem WFH bisa memantau anak di rumah sedang bermain, belajar, dan istirahat. Sekaligus dengan mudah menyelesaikan pekerjaan di rumah.

Di sisi lain, ada ibu diamanahi dengan sistem WFO karena pekerjaan bisa fokus diselesaikan dan tidak merasa bersalah jika pekerjaan tersebut memang sebaiknya dikerjakan di kantor. Dengan mempertimbangan pekerjaan di bawa ke rumah akan membuat konsentrasi buyar dan merasa akan diganggu anak yang ingin bermain. Beberapa ibu diberikan pemberlakuan sistem yang menerapkan selang-seling antara sistem WFH dan WFO dengan tujuan yang sama agar bisa fokus

kerja saat sistem WFO di tempat bekerja dan fokus kerja saat sistem WFH di rumah.

Fenomena Perempuan Indonesia Bekerja

Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) menuntut kemajuan pola pikir dan pengetahuan yang luas bagi setiap orang, khususnya para perempuan mulai bangkit dan bisa menunjukkan bahwa keberadaan perempuan layak untuk diapresiasi.

Kecerdasan dan kemampuan para perempuan Indonesia telah terbukti berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Hal ini bisa dilihat dari indikator pasar tenaga kerja Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu indikator yang standar digunakan untuk melihat seberapa banyak jumlah perempuan bekerja adalah Employment to Population Ratio (EPR).

Employment to Population Ratio (EPR) perempuan pada Agustus 2019 sebesar 49,11 mengalami kenaikan 0,59 poin dan pada Agustus 2020 EPR menjadi sebesar 49,70. Angka EPR sebesar 49,70 dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk perempuan umur 15 tahun ke atas terdapat (sekitar 49 orang) merupakan perempuan bekerja. Adanya kenaikan EPR dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah perempuan bekerja di Indonesia semakin banyak dari waktu ke waktu.

Ditinjau dari segi lapangan pekerjaan utama, sebagian besar (66,03 persen) perempuan Indonesia bekerja mengabdikan dirinya di bidang perdagangan, industri pengolahan, akomodasi makan dan minum, jasa pendidikan, jasa lainnya, serta jasa kesehatan. Sedangkan selebihnya perempuan Indonesia berkecimpung bekerja di bidang pertanian, administrasi pemerintah, jasa keuangan, jasa

perusahaan, informasi dan komunikasi, transportasi, konstruksi, dan lainnya.

Sementara itu, berdasarkan jenis pekerjaan sekitar 27,55 persen perempuan Indonesia bekerja pada jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan dan 26,65 persen perempuan Indonesia bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Selebihnya, perempuan Indonesia bekerja sebagai tenaga produksi, tenaga profesional, tenaga usaha jasa, dan lainnya.

Profesionalitas Ibu, Perlu Dukungan Keluarga

Apapun bidang pekerjaan yang ditekuni oleh ibu yang menjadi perempuan bekerja, haruslah mendapat dukungan keluarga dan sahabat yang senantiasa membantu dan memotivasi ibu.

Kadang kala kondisi tertentu, pekerjaan menyita banyak waktu yang menyebabkan rutinitas pekerjaan di rumah terbengkalai dan menumpuk. Di saat inilah, keluarga dan orang terdekat seperti suami, adik serta orang tua memahami dan berupaya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah. Memaklumi ibu yang sudah lelah seharian bekerja di tempat bekerja, tentu saja perlu adanya bantuan apa lagi jika hanya mengandalkan diri sendiri untuk membenahi pekerjaan rumah yang menumpuk, tentu tidak bisa terselesaikan dengan cepat. Bantuan suami dan orang terdekat, sangatlah berarti buat ibu.

Profesionalitas tetap selalu dijaga, merupakan komitmen ibu dari semenjak awal akan memasuki dunia pekerjaan dengan kerja yang beraneka ragam di tempat kerja. Konsekuensi yang terjadi harus siap untuk dihadapi bersama.

Bagi ibu dan suaminya secara bersamaan bekerja di luar rumah. Rintangan yang dihadapi pun berbeda. Ada ibu yang

berupaya mencari asisten rumah tangga dan pengasuh anak dengan memberikan kepercayaan penuh dan gaji yang memadai untuk asisten rumah tangga dan pengasuh anak.

Ada ibu yang bekerja di bidang perdagangan lalu senang hati membawa anaknya berdagang di pasar, karena sang suami bekerja di perkebunan karet. Ada ibu yang bekerja sebagai guru dan di kantoran, dengan membawa anak-anak yang masih kecil berharap ketika ibu bekerja bisa sekaligus mengajari sang anak belajar dan menemani bermain. Intinya tergantung ibu yang menjadi perempuan bekerja, merancang jadwal kegiatan dan alur kehidupan keluarga dan pekerjaannya agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Ibu yang bekerja meyakini dirinya mampu memberikan manfaat agar membantu ekonomi keluarganya. Kerja sebagai wujud bakti atas jasa orang tua yang telah menyekolahkan hingga kuliah. Dukungan keluarga penting, menguatkan hati ibu berjuang mengurus keluarga dan pekerjaannya. Ibu menjadi perempuan bekerja mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan ini membutuhkannya dan selama ibu membutuhkan pekerjaan.

Semoga ibu menjadi perempuan bekerja senantiasa bertanggung jawab pada keluarganya, menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dari segala hal namun masih tetap bisa mempertahankan kredibilitas dan profesionalitas dari pekerjaannya.

Perempuan, Korona, dan Kemiskinan

Oleh : Lina Agustina Pujiwati SST., M.Ec.Dev

TERBIT DI MEDIA RIAU POS, 30 DESEMBER 2020



Rilis data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32% pada triwulan II, 2020. Meski triwulan III kondisi ekonomi berangsur membaik hingga mampu tumbuh positif 5,05%, namun ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Berbagai aktivitas masyarakat belum kembali normal, walaupun kini kita semua memasuki era new normal.

Merebaknya virus korona di Indonesia juga berimbas pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Pada 15 Juli 2020 BPS merilis jumlah penduduk miskin kondisi Maret 2020 sebesar 26,42 juta jiwa. Angka tersebut naik 1,63 juta orang dibanding September 2019. Secara persentase, penduduk miskin Indonesia sebesar 9,78 persen pada Maret 2020, naik 0,56 persen dari semester sebelumnya.

Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp. 454.652. Kenaikan jumlah penduduk miskin juga mengindikasikan banyak penduduk dengan status hampir miskin jatuh menjadi miskin.

Kondisi kemiskinan terlihat semakin memburuk. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang semakin

naik. Data BPS menunjukkan pada Maret 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan naik menjadi 1,61 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik menjadi 0,38.

Secara kewilayahan, peningkatan penduduk miskin di perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin kondisi Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik 0,82 poin dibanding September 2020, sedang di perdesaan kenaikan jumlah penduduk miskin hanya sebesar 0,22 poin.

Kemiskinan menjadi semakin miris, karena kenaikan jumlah penduduk miskin akibat pandemi covid-19 juga dibarengi dengan makin lebarnya jurang kesenjangan ekonomi. Hal ini terlihat dari koefisien gini ratio yang naik 0,001 menjadi 0,381.

Gini Ratio merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan antara kelompok penduduk lapisan bawah dengan lapisan atas.

Perempuan dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan musuh negara manapun. “Selamatkan planet, entaskan kemiskinan, tumbuhkan ekonomi, itu merupakan medan perang kita semua”. Demikian statement yang pernah disampaikan Ban Ki Moon, Sekjen PBB kedelapan.

Bisa jadi, perempuan adalah korban pertama kemiskinan. Mereka adalah pihak yang paling merasakan efek kehidupan di bawah garis kebutuhan hidup minimum. Data BPS 2020 menyebutkan bahwa Head Count Index perempuan (7,82) lebih tinggi dari Head Count Index laki-laki (7,79). Artinya, dari seluruh rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, 7,82 persen diantaranya adalah miskin. Kondisi ini lebih tinggi dibanding rumah tangga yang dikepalai laki-laki.

BPS 2020 juga merilis bahwa dari seluruh rumah tangga miskin di Indonesia, 15,88 persen diantaranya dikepalai oleh perempuan. Keadaan ini membuat perempuan bekerja lebih keras untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarganya.

Kondisi ini menjadi semakin berat kala pandemi covid-19 mewabah di Indonesia. Perempuan dihadapkan pada tantangan kelesuan ekonomi dan tingginya pengangguran. Perempuan harus tetap survive saat pendapatan menurun tapi pengeluaran selalu ada. Di sisi lain, perempuan juga dituntut untuk menjaga ketahanan keluarga, terlebih saat anak-anak menjalankan School From Home. Peran perempuan sebagai “sekolah pertama” bagi anak-anaknya tetap melekat, karena ada tanggungjawab dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa.

Upaya Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Berbagai kebijakan seperti Program Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain telah dijalankan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Bahkan, khusus untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun guna meningkatkan daya tahan ekonomi secara keseluruhan, termasuk kesehatan.

Untuk mengoptimalkan berbagai kebijakan tersebut, kiranya perlu untuk lebih memberdayakan dan memberi akses lebih terhadap perempuan melalui program peningkatan kapabilitas. Mengingat perannya yang vital, peningkatan kapabilitas di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menjadi sangat urgent bagi perempuan untuk keluar dari ketidakberdayaan. Dalam jangka panjang, investasi pada perempuan diyakini akan berdampak besar dan signifikan mengakhiri kemiskinan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://riau.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru 28131
Telp : (0761) 23042 , Fax : (0761) 21336
Homepage : <http://riau.bps.go.id> E-mail:bps1400@bps.go.id